

**Pelaksanaan *Alternative Dispute Resolution (ADR)* Pada  
Sengketa Lingkungan Hidup Akibat Industrialisasi  
(Studi Kasus: PT Kayu Lapis Indonesia Kabupaten Kendal).**



**Tesis  
Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar  
Magister Ilmu Hukum**

**Dibuat Oleh :**

**JOKO MARDIYANTO, SH  
B4A001041**

**Pembimbing :**

**Prof. Dr. Koesnadi Hardjasoemantri, S.H., M.L.  
NIP. 130.427.629**

**PROGRAM PASCA SARJANA MAGISTER HUKUM  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG  
2003**

**Pelaksanaan *Alternative Dispute Resolution* (ADR) Pada  
Sengketa Lingkungan Hidup Akibat Industrialisasi  
(Studi Kasus: PT Kayu Lapis Indonesia Kabupaten Kendal).**



**Tesis  
Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar  
Magister Ilmu Hukum**

**Dibuat Oleh :**

**JOKO MARDIYANTO, SH  
B4A001041**

**Pembimbing :**

**Prof. Dr. Koesnadi Hardjasoemantri, S.H., M.L.  
NIP. 130.427.629**

**PROGRAM PASCA SARJANA MAGISTER HUKUM  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG  
2003**

**Pelaksanaan *Alternative Dispute Resolution* (ADR) Pada  
Sengketa Lingkungan Hidup Akibat Industrialisasi  
(Studi Kasus: PT Kayu Lapis Indonesia Kabupaten Kendal).**

Disusun oleh :

**JOKO MARDIYANTO, SH**  
**B4A001041**

Dipertahankan di depan Dewan Penguji  
Pada Tanggal .....2003

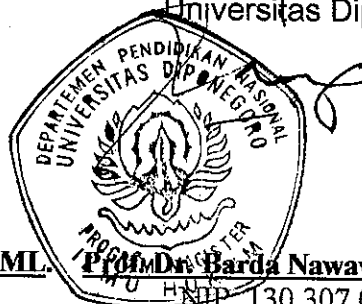
Tesis ini telah diterima  
Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar  
Magister Ilmu Hukum

Pembimbing,

  
\_\_\_\_\_

**Prof. Dr. Koesnadi Hardjosoemantri, SH ML.**  
NIP. 130.427.629

Mengetahui,  
Ketua Program Magister Ilmu Hukum  
Universitas Diponegoro



**Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, SH.**  
NIP. 130.307.058

## KATA PENGANTAR

Tiada kata yang lebih pantas selain ucapan Puji Syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan petunjuk kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan penulisan tesis ini yang berjudul : Pelaksanaan *Alternative Dispute Resolution (ADR)* Pada Sengketa Lingkungan Hidup Akibat Industrialisasi (Studi Kasus: PT Kayu Lapis Indonesia Kabupaten Kendal).

Penulisan tesis ini dimaksudkan sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang.

Penulis menyadari akan keterbatasan pengetahuan yang dimiliki, khususnya menyangkut pelaksanaan *Alternative Dispute Resolution* dalam sengketa lingkungan hidup. Untuk itu tanpa bantuan berbagai pihak rasanya sulit untuk menyelesaikan penulisan tesis ini.

Untuk itu penulis menghaturkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Prof. Dr.Koesnadi Hardjasoemantri, S.H., M.L. selaku pembimbing, yang telah memberikan pengarahan dalam penulisan tesis ini. Pandangan beliau yang *komprehensif* mengenai hukum lingkungan sangat menunjang selesainya penulisan tesis ini.

Rasa terimakasih penulis juga sampaikan kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penyelesaian studi dan penelitian tesis ini, antara lain :

1. Bapak Prof.Dr.Barda Nawawi Arief, S.H. selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro yang telah memberikan kesempatan penulis untuk menyelesaikan studi.
2. Bapak Dr. Paulus selaku dosen penguji proposal yang telah meluangkan waktu untuk memberi arahan penulisan tesis ini.
3. Bapak Arief Hidayat, SH. MS. selaku dosen penguji proposal yang memberikan masukan dalam penulisan tesis ini.
4. Bapak Bawor, SH selaku Divisi Lingkungan Hidup LBH Semarang yang banyak memberikan bahan dalam penelitian penulisan tesis ini.
5. Bapak Siswolaksono, SH selaku kepala Biro Hukum Propinsi Jawa Tengah yang telah memberikan bahan-bahan yang berarti dalam proses penelitian penulisan tesis ini.
6. Bapak Drs. Didiek Samadikun Msi selaku Pimpinan penulis yang memberi kesempatan dan semangat untuk menyelesaikan studi.
7. Bapak Umbu Puda, SH selaku Pimpinan penulis yang banyak memberikan motivasi dan kesempatan untuk menyelesaikan studi.
8. Rekan-rekan satu angkatan pada program Magister Hukum Universitas Diponegoro yang telah banyak memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan tesis ini.

Ucapan terimakasih yang tulus penulis juga haturkan kepada Istriku Rus Warsitaningsih, putraku Hanung Eka Atmaja, putriku Lelly Kurnia Fajarwati yang selalu mendampingi dalam suasana suka dan duka

sehingga memberi semangat penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini.

Tiada gading yang tak retak, begitulah kata pepatah yang sangat tepat untuk menggambarkan hasil penulisan tesis ini. Untuk itu kritik dan saran untuk perbaikan tesis ini sangat penulis harapkan.

Semarang, Desember 2003

Penulis

Joko Mardiyanto, SH

## *Motto*

*"Bentangkan Sayap Seluas Samudera, Sayap Iman, Ilmu dan Amal"*

## *PERSEMBAHAN*

*"Kupersembahkan untuk Ayahanda dan Ibunda,  
istriku Rus Warsitaningsih putraku Hanung Eka  
Atmaja, putriku Lelly Kurnia Fajarwati dan segenap  
civitas akademika Universitas Diponegoro"*

## ABSTRAK

### Kata kunci : Perundingan

Konflik atau sengketa yang disebabkan oleh proses-proses pembangunan merupakan fenomena yang menonjol, terutama dalam dekade terakhir ini. Gejala semacam ini dapat dijumpai di negara-negara berkembang yang sedang melakukan proses pembangunan termasuk juga Indonesia. Kondisi ini merupakan konsekuensi logis atas pilihan strategi pembangunan yang umumnya ditempuh oleh negara-negara berkembang pasca Perang Dingin II melalui konsep Industrialisasi.

Begitu pun dengan persoalan yang dialami oleh masyarakat Mangunharjo, kecamatan Tugu kotamadia Semarang di mana keberadaan PT KLI yang melakukan *reklamasi* dalam rangka pembangunan perusahaan pada tahun 1987 membuat selama bertahun-tahun merugikan masyarakat. Kerugian akibat pembangunan PT KLI seperti terjadi *abrasi* sehingga tambak-tambak penduduk sekitar menjadi tenggelam, serta kerugian-kerugian lainnya yang selama bertahun-tahun diperjuangkan masyarakat untuk menuntut ganti kerugian.

Saat ini telah berkembang lembaga penyelesaian konflik lingkungan hidup di luar pengadilan yang biasa disebut dengan *Alternative Dispute Resolution (ADR)*. Penyelesaian kasus PT KLI juga dengan menggunakan model ADR. Untuk itu tujuan dari penelitian tesis ini adalah untuk mengetahui format pelaksanaan ADR antara PT KLI dengan masyarakat korban serta permasalahan-permasalahan yang dihadapinya.

Format ADR yang digunakan dalam kasus ini adalah menggunakan pendekatan negosiasi dan mediasi. Permasalahan yang dihadapi adalah lambatnya pihak ketiga masuk dalam perundingan, seringkali PT KLI tidak hadir dalam pertemuan serta masyarakat korban tidak bersatu dalam berbagai perundingan. Secara ekonomis keberadaan PT KLI satu sisi mensejahterakan masyarakat sekitar dengan kebutuhan tenaga kerja dengan mengikutsertakan penduduk setempat, sisi lain menimbulkan kerusakan seperti abrasi serta kerusakan lingkungan masyarakat.



## ABSTRACT

### Key Words : Negotiation

Conflict or dispute from development processes is a prominent phenomenon, particularly during the recent decade. Such a phenomenon is common in developing countries, including Indonesia, which are carrying out development processes. It is a logical consequence from the development strategy adopted in most developing countries after the Cold War II, namely the concept of industrialization.

A similar case happened to Mangunhardjo society in Tugu Sub-District, Semarang Municipality, where PT KLI did reclamation for its industrial development in 1987. The reclamation brought disadvantages to the local society. Among the damages and losses are abrasion that sunk fishponds down and other losses that the local have been demanding for compensation for years.

A conflict resolution body has been established to help solve environmental conflict outside the court. This institution is called Alternative Dispute Resolution (ADR). The settlement of PT KLI case also adopts an ADR model. The objectives of this research are to study the format for ADR implementation to solve the conflict between PT KLI and the local society (the victim) and to study the problems encountered in the dispute resolution.

The Alternative Dispute Resolution method makes negotiation and mediation approach. Problems to solution finished that case is slowly mediation care that case, abstain PT KLI every meeting and then split opinion between victim people. Economically, there PT KLI can employ local community but other side broke environmental.

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Permasalahan.....	1
B. Perumusan Masalah.....	8
C Tujuan Penelitian.....	9
D. Kegunaan Penelitian.....	9
E. Kerangka Pemikiran.....	10
F. Metode Penelitian.....	22
1. Metode Pendekatan.....	22
2. Metode Pengumpulan Data.....	23
3. Metode Analisa data.....	25
G. Sistematika Penulisan.....	25
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Penegakan Hukum Lingkungan.....	27
1. Hukum Administrasi Negara.....	29

2. Hukum Perdata.....	41
3. Hukum Pidana.....	48
B. Kendala Penegakan Hukum Lingkungan.....	74
C. Hak, Kewajiban dan Peran serta Masyarakat.....	82
D. Perkembangan Pelembagaan ADR di Indonesia .....	87
E. Globalisasi dan Krisis Lingkungan.....	98

### **Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan**

A. Hasil Penelitian.....	120
1. Format Pelaksanaan ADR antara PT KLI dengan Warga Desa Mangunhardjo Kecamatan Tugu Kota Semarang.....	120
2. Masalah-masalah serta solusi yang timbul dari pelaksanaan ADR.....	149
3. Implikasi Ekonomis Keberadaan PT KLI.....	154
B. PEMBAHASAN.....	166
1. Format Pelaksanaan ADR antara PT KLI dengan Warga Desa Mangunhardjo Kecamatan Tugu Kota Semarang .....	166
2. Masalah-masalah serta solusi yang timbul, dari pelaksanaan ADR.....	178

3.Implikasi Ekonomis Keberadaan PT KLI.....	188
---	-----

## **BAB IV PENUTUP**

A.Simpulan.....	226
-----------------	-----

B.Saran.....	227
--------------	-----

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG MASALAH

Konflik atau sengketa yang disebabkan oleh proses-proses pembangunan merupakan fenomena yang menonjol, terutama dalam dekade terakhir ini. Gejala semacam ini dapat dijumpai di negara-negara berkembang yang sedang melakukan proses pembangunan termasuk juga Indonesia. Kondisi ini merupakan konsekuensi logis atas pilihan strategi pembangunan yang umumnya ditempuh oleh negara-negara berkembang pasca Perang Dingin II melalui konsep Industrialisasi<sup>1</sup>.

Konsep industrialisasi pada dasarnya mempunyai tujuan utama mengejar keuntungan yang setinggi-tingginya, sedangkan kepedulian kalangan industri terhadap lingkungan hidup biasanya sangat tipis. Kerusakan dan pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh limbah industri adalah masalah-masalah yang paling banyak ditemukan di sentra-sentra industri dan pabrik-pabrik. Jika mereka tidak segera menyadari akibat dari kerusakan dan pencemaran lingkungan tersebut, maka tidak menutup kemungkinan akan menimbulkan konflik antara pengusaha dan masyarakat di sekitar pabrik.

Sebagai upaya penyelesaian terhadap konflik atau sengketa lingkungan hidup diperlukan aturan hukum yang jelas dan tegas. Dengan

---

<sup>1</sup> Hadimulyo. 1997. *Mempertimbangkan ADR Kajian Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*. Jakarta: Elsam. Hlm. 1.

adanya hukum ini, rasa keadilan dan kepastian hukum bagi semua pihak akan dapat diwujudkan. Selain itu hukum harus mampu berperan sebagai sarana pembangunan (*agent of development*). Dengan perannya sebagai *agent of development* atau *agent of change* yang dapat diorientasikan kepada pola pembangunan yang berwawasan lingkungan (*sustainable development*).

Saat ini Indonesia telah menyempurnakan UU No. 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Lingkungan Hidup dengan UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup<sup>2</sup>. Penyempurnaan peraturan perundang-undangan tersebut dimaksudkan sebagai upaya melaksanakan pelestarian pengelolaan lingkungan hidup dan pengembangan lingkungan hidup yang serasi, selaras dan seimbang guna menunjang terlaksananya pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup.

UUPLH mengatur lingkungan hidup dari aspek hukum administrasi, hukum perdata dan hukum pidana. Khusus yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dalam wacana hukum lebih dikenal dengan sebutan lembaga *Alternatif Dispute Resolution* (ADR)<sup>3</sup>.

*Alternatif Dispute Resolution* (ADR) sudah dikenal sejak adanya UULH dan dalam UUPLH mengalami perluasan baik menyangkut pihak ataupun bentuk ADR sendiri. Landasan hukum yang digunakan untuk

---

<sup>2</sup> UU No 4 Tahun 1982 disingkat UULH dan UU No 23 Tahun 1997 disingkat UUPLH.

<sup>3</sup> *Alternatif Dispute Resolution* selanjutnya disebut ADR

penerapan ADR di bidang lingkungan hidup didasarkan sebelumnya pada Pasal 20 ayat (2) UULH dan saat ini telah diganti berdasarkan Pasal 31 sampai dengan Pasal 33 UUPH.

Pasal 31 UUPH menyatakan bahwa penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan, mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu guna menjamin tidak akan terjadinya atau terulangnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup.

Penjelasan Pasal 31 UUPH adalah bahwa penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui perundingan di luar pengadilan dilakukan secara sukarela oleh para pihak yang berkepentingan, yaitu para pihak yang mengalami kerugian dan mengakibatkan kerugian, instansi pemerintah yang terkait dengan subjek yang disengketakan, serta pihak yang mempunyai kepedulian terhadap pengelolaan lingkungan hidup. Tindakan tertentu di sini dimaksudkan sebagai upaya memulihkan fungsi lingkungan hidup dengan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat.

Pasal 32 UUPH menyatakan, bahwa dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dapat digunakan jasa pihak ketiga, baik yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan maupun yang memiliki kewenangan mengambil keputusan, untuk membantu menyelesaikan sengketa lingkungan hidup.

Penjelasan Pasal 32 menyatakan :

"Untuk melancarkan jalannya perundingan di luar pengadilan, para pihak yang berkepentingan dapat meminta jasa pihak ketiga netral yang dapat berbentuk :

- a. Pihak ketiga netral yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan. Pihak ketiga netral ini berfungsi sebagai pihak yang memfasilitasi para pihak yang berkepentingan sehingga dapat dicapai kesepakatan.
- b. Pihak ketiga netral ini harus :
  - 1) disetujui oleh para pihak yang bersengketa
  - 2) tidak memiliki hubungan keluarga dan/atau hubungan kerja dengan salah satu pihak yang bersengketa
  - 3) memiliki ketrampilan untuk melakukan perundingan atau penengahan
  - 4) tidak memiliki kepentingan terhadap proses perundingan maupun hasilnya
- c. Pihak ketiga netral memiliki kewenangan mengambil keputusan berfungsi sebagai *arbiter*, dan semua putusan *arbitrase* ini bersifat tetap dan mengikat para pihak yang bersengketa".

Kata kunci adalah *jasa pihak ketiga netral*, apabila berbagai perkara sengketa lingkungan yang diselesaikan pada waktu-waktu yang lalu, seperti misalnya sengketa kali Tapak di kotamadia Semarang, yang tidak menggunakan jasa pihak ketiga netral, akan tetapi pemecahannya diperoleh dalam proses penyelesaian oleh tim tripihak, maka tidaklah dapat dikatakan *mediasi*, akan tetapi *quasi-mediati*<sup>4</sup>

Ketentuan tentang pihak ketiga netral tersebut tercantum dalam penjelasan Pasal 32 UUPH, yang memperkuat sifat mengikatnya penjelasan Pasal, yaitu dari sudut penafsiran otentik, sedangkan Pasal dalam batang tubuh mengikat karena sifat normatifnya.

Pasal 33 UUPH menyatakan :

---

<sup>4</sup> Hardjosoemantri, Koesnadi, *Hukum Tata Lingkungan*, edisi ketujuh, cetakan keenambelas, Gadjah Mada University Press, 1999, hal 379.



"Pemerintah dan/atau masyarakat dapat membentuk lembaga penyedia jasa pelayanan penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang bersifat bebas dan tidak berpihak".

Ketentuan mengenai penyedia jasa pelayanan penyelesaian sengketa lingkungan hidup diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Penjelasan Pasal 33 menyatakan, bahwa lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup ini dimaksudkan sebagai suatu lembaga yang mampu memperlancar pelaksanaan mekanisme pilihan penyelesaian sengketa dengan mendasarkan pada prinsip ketidakberpihakan dan profesionalisme. Lembaga penyedia jasa yang dibentuk pemerintah dimaksudkan sebagai pelayanan publik.

Suatu contoh yang baik tentang bentuk kelembagaan mengenai penyelesaian persengketaan pencemaran lingkungan adalah sebuah badan pada tingkat nasional yang didirikan di Jepang berdasarkan "*Law Concerning the Settlement of Enviromental Pollution Disputes*", yaitu yang disebut *Environmental Disputes Coordination Comission*. Badan tersebut didirikan untuk menyelesaikan persengketaan pencemaran melalui *konsiliasi*, *mediasi* atau *arbitrasi*, yaitu mengenai persengketaan-persengketaan yang gawat atau menjangkau wilayah yang luas.

Untuk penyelesaian persengketaan-persengketaan lainnya dibentuk di tiap-tiap *prefecture* (propinsi) sebuah *Environmental Disputes*

*Council*, yang bertugas untuk melaksanakan *konsiliasi*, *mediasi* dan *arbitrasi*.

Para penuntut ganti kerugian di bidang hukum perdata dapat menyelesaikan persengkataannya dengan memilih mana yang lebih memberikan penyelesaian baginya, yaitu apakah melalui pengadilan perdata, *Environmental Disputes Coordination Commision* atau *Environmental Disputes Council* di propinsinya.<sup>5</sup>

Upaya menengahi untuk memecahkan masalah lingkungan hidup, yang disebut *mediasi (mediation)*, mulai dikembangkan di Amerika Serikat pada permulaan tahun 1970-an. Penerapan *mediasi* ini dimulai sebagai suatu *eksperimen* untuk menjajagi kemungkinan adanya alternatif lain selain daripada mengajukan perkara ke pengadilan.

Pengalaman membuktikan bahwa penyelesaian perselisihan lingkungan di pengadilan memakan banyak waktu, modal, dan sering tidak memecahkan masalah. Contoh yang baik tentang betapa proses di pengadilan banyak sekali kendalanya dan sering menimbulkan frustrasi adalah *kasus Storm King*.

Perusahaan swasta di New York yang bergerak di bidang penyediaan tenaga listrik, yaitu *Consolidated Edison Company of New York (Consolidated Edison)*, telah mencoba sejak 1962 untuk membangun instalasi pusat listrik tenaga air di *Storm King Mountain di Hudson Highlands*.

---

<sup>5</sup> *Ibid*, hal.380.

Rencana tersebut telah mengundang reaksi dari berbagai pihak mula-mula dengan alasan merusak keindahan alam, tetapi kemudian ditambah dengan alasan bahwa instalasi tersebut secara potensial dapat mencemarkan air di sekitarnya sehingga ikan dapat musnah.

Perselisihan antara penentang rencana tersebut dengan pihak perusahaan yang dibawa ke pengadilan telah berjalan dengan sengitnya, hingga memakan waktu hampir 20 tahun dan menghabiskan biaya lebih dari 6 juta dollar.

Dimulai pada tahun 1970, *Ford Foundation* dan *Rockefeller Foundation* menunjang eksperimen penggunaan para penengah (*mediators*) dalam memecahkan perselisihan lingkungan. Dengan bantuan kedua yayasan tersebut, di berbagai negara bagian mulai disediakan *jasa mediasi*.

Menurut Talbot lambat laun dapat dihimpun dokumentasi penyelesaian perselisihan lingkungan melalui *mediasi*, sehingga dapat dipahami *proses mediasi* ini dengan baik, berdasarkan kasus-kasus yang nyata<sup>6</sup>.

*Grenville Wood* menyatakan, bahwa *mediasi* adalah sebuah proses penyelesaian sengketa yang menyangkut bantuan dari pihak ketiga yang netral dalam upaya *negosiasi* dan penyelesaian sengketa. Para jasa pihak ketiga netral umumnya adalah mereka yang bergabung dalam *asosiasi* atau *mediasi* atau universitas dan diantara mereka ada pula yang merupakan jasa pihak ketiga netral yang mandiri. Pihak-pihak yang bersengketa mencari jasa pihak ketiga netral yang mandiri. Pihak-pihak yang bersengketa mencari jasa pihak ketiga netral dengan cara yang sama seperti mencari seorang pengacara, kecuali bahwa seorang

---

<sup>6</sup> *Loc.cit.*, hal. 381.

jasa pihak ketiga netral haruslah seseorang yang dapat diterima oleh semua pihak yang bersengketa.<sup>7</sup>

Begitu pun dengan persoalan yang dialami oleh masyarakat Mangunharjo, Kecamatan Tugu Kotamadia Semarang di mana keberadaan PT KLI yang melakukan *reklamasi* dalam rangka pembangunan perusahaan pada tahun 1987 membuat selama bertahun-tahun merugikan masyarakat. Kerugian akibat pembangunan PT KLI seperti terjadi *abrasi* sehingga tambak-tambak penduduk sekitar menjadi tenggelam, serta kerugian-kerugian lainnya yang selama bertahun-tahun diperjuangkan masyarakat untuk menuntut ganti kerugian.

Pada kasus ini telah terjadi berbagai *negosiasi* dan *mediasi* antara masyarakat dengan dibantu berbagai *stakeholders* dengan pemerintah serta PT KLI sendiri selama bertahun-tahun. sehingga pada kesempatan ini maka dipilih judul tesis ini :

Pelaksanaan *Alternative Dispute Resolution (ADR)* pada Sengketa Lingkungan Hidup Akibat Industrialisasi (Studi Kasus: PT Kayu Lapis Indonesia kabupaten Kendal).

## **B. PERUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimana format pelaksanaan ADR pada kasus kerusakan pantai Mangunharjo Kecamatan Tugu Kotamadia Semarang oleh PT Kayu Lapis Indonesia (KLI) ?

---

<sup>7</sup> *Loc.cit*, hal 381.

2. Permasalahan-permasalahan serta solusi apakah yang timbul dari pelaksanaan ADR tersebut ?
3. Bagaimana implikasi secara ekonomis dengan keberadaan PT KLI bagi masyarakat ?

### **C. TUJUAN PENELITIAN**

1. Untuk mengetahui format *ADR* dalam penyelesaian sengketa kerusakan pantai di Desa Mangunharjo Kecamatan Tugu Kotamadia Semarang oleh PT Kayu Lapis Indonesia (KLI).
2. Untuk mengetahui permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam penyelesaian konflik antara masyarakat Mangunharjo Kecamatan Tugu Kotamadia Semarang dengan PT Kayu Lapis Indonesia ( KLI)
3. Untuk mengetahui implikasi secara ekonomis keberadaan PT KLI bagi masyarakat sekitar.

### **D. KEGUNAAN PENELITIAN**

Penelitian ini akan menambahkan pemahaman bagi pola ADR berdasarkan fakta-fakta yang terdapat di masyarakat khususnya tentang persoalan penyelesaian sengketa lingkungan sehingga diharapkan berguna bagi kalangan lembaga swadaya masyarakat (LSM), pihak pengusaha maupun pemerintah dan pihak-pihak lain untuk dapat belajar dari pengalaman yang tertuang dalam hasil penelitian ini. Secara teoritis diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu hukum khususnya hukum lingkungan menyangkut masalah ADR.

## E. KERANGKA PEMIKIRAN

Untuk memperoleh gambaran umum tentang apa yang disebut ADR, George Applebey dalam tulisannya *An Overview of Alternative Dispute Resolution*<sup>8</sup>, menyatakan bahwa ADR merupakan suatu eksperimen untuk mencari :

- 1) Model-model baru dalam penyelesaian sengketa
- 2) Penerapan-penerapan baru terhadap metode-metode lama.
- 3) Forum-forum baru bagi penyelesaian sengketa
- 4) Penekanan yang berbeda dalam pendidikan hukum.

Pernyataan tersebut di dasarkan pada pemikiran Kieberman dan Hendry. Pernyataan yang lebih spesifik mengenai pengertian ADR ini juga dapat melihat yang disampaikan oleh Phillip D. Boostwick yang menyatakan bahwa ADR merupakan serangkaian praktek dan teknik teknik hukum yang ditujukan untuk :

- 1) Memungkinkan sengketa-sengketa hukum diselesaikan di luar pengadilan untuk keuntungan atau kebaikan para pihak yang bersengketa sendiri
- 2) Mengurangi biaya dan keterlambatan kalau sengketa tersebut diselesaikan melalui *litigasi konvensional*
- 3) Mencegah agar sengketa-sengketa hukum tidak dibawa ke pengadilan

Pernyataan diatas menyiratkan keberpihakan kepada masyarakat korban. Proses penyelesaian sengketa diluar pengadilan lebih diutamakan dibanding perkara untuk masuk dalam wilayah pengadilan.

Strategi tersebut merupakan pemikiran yang lama berdasarkan pengalaman yang terjadi. Kasus lingkungan hidup yang masuk dalam wilayah peradilan selama ini banyak menguntungkan pelaku pencemaran atau perusakan lingkungan hidup.

---

<sup>8</sup>Nandang Sutrisno."Dasar-dasar Penyelesaian Sengketa Alternatif."Makalah yang disampaikan dalam Pelatihan *Alternative Dispute Resolution (ADR)* yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum UII bekerjasama dengan *The Asia Foundation*.Yogyakarta.tanggal 19 s/d 22 Agustus 1999.Hlm.3-4.

Pendapat lainnya mengatakan bahwa ADR adalah sebuah konsep yang mencakup berbagai bentuk penyelesaian sengketa selain dari proses peradilan melalui cara-cara yang sah menurut hukum, baik berdasarkan *pendekatan konsensus* atau *tidak berdasarkan pendekatan konsensus*<sup>9</sup>.

Berdasarkan berbagai pendapat tersebut maka dapat dijelaskan bahwa pengertian ADR merupakan mekanisme penyelesaian sengketa alternatif di luar lembaga peradilan (*non-ligitasi*) dengan menggunakan pola pendekatan *konsensus* maupun *non-konsensus* dengan maksud untuk mempercepat penyelesaian sengketa serta memperingan biaya perkara.

Perkembangan ADR sebenarnya tidak terlepas dari kondisi *empirik* lembaga peradilan yang banyak memberikan kesan dalam setiap penyelesaian sengketa berjalan dengan berbelit-belit, memakan waktu yang lama, serta biaya yang sangat tinggi.

Anggapan ini sudah terjadi sejak abad XVII ketika Voltaire berkata: "*I was ruined but twice –once when I gained a law suit, and once when I lost one*". Kemudian Abraham Lincoln menasehatkan : "Hindarilah berperkara di pengadilan, sedapat mungkin ajaklah tetangga-tetangga

---

<sup>9</sup> Hadimulyo. *Op. Cit.* hlm.2.

anda berkompromi. Tunjukkan betapa orang yang menang berperkara seringkali merupakan orang yang kalah”.

Jadi jelaslah bahwa kehadiran lembaga ADR adalah dalam upaya mencari pola penyelesaian sengketa yang sifatnya efektif dan efisien dan saat ini model-model ADR sudah berkembang begitu pesat.

Untuk konteks Indonesia model penyelesaian sengketa alternatif sudah mulai dikembangkan dan ini dapat dilihat dengan adanya pengakomodasian model-model sengketa alternatif dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Adalah satu contoh misalnya dalam UUPLH.

Metode yang digunakan dalam penyelesaian ADR adalah:

1. *Negosiasi*<sup>10</sup>

Negosiasi merupakan sarana bagi pihak-pihak yang bersengketa untuk melakukan penyelesaiannya tanpa keterlibatan pihak ketiga yang tidak berwenang mengambil keputusan (*mediasi*) maupun pihak ketiga yang berwenang mengambil keputusan (*arbitrase*). Secara umum teknik negosiasi dapat dibagi menjadi 2 (dua), yakni *teknik negosiasi yang kompetitif* dan *teknik negosiasi yang kooperatif*.

Teknik negosiasi yang kompetitif seringkali diistilahkan dengan teknik negosiasi yang bersifat alot (*tough*) dimana unsur-unsur yang menjadi ciri seorang *negosiator kompetitif* adalah sebagai berikut :

---

<sup>10</sup>Zairin Harahap. *ADR Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Lingkungan*.”Disampaikan dalam diskusi ADR.Diselenggarakan oleh Pusdiklat FH UII.Yogyakarta tanggal 5 Maret 1999.Hlm.6



- (a) Mengajukan permintaan awal yang tinggi pada awal *negosiasi*
- (b) Menjaga tuntutan agar tetap tinggi sepanjang proses *negosiasi* berlangsung.
- (c) *Konsesi* diberikan sangat langka/jarang atau terbatas.
- (d) Secara psikologis perunding yang menggunakan teknik ini menganggap perunding lain sebagai musuh atau lawan;
- (e) Seringkali menggunakan yang berlebihan, kasar, menggunakan ancaman, *bluff* dan melemparkan tuduhan-tuduhan untuk menciptakan ketegangan dan tekanan terhadap pihak lawan.

*Teknik negosiasi yang kooperatif* merupakan kebalikannya. Teknik ini menganggap pihak lawan (*opposing party*) bukan sebagai musuh, tapi sebagai mitra kerja mencari *common ground*. Para pihak berkomunikasi untuk menjajagi kepentingan dan nilai-nilai bersama dengan menggunakan rasio, sehingga penyelesaian dilakukan berdasarkan analisis objektif yang positif dan saling percaya.

## 2. *Konsiliasi*

Dalam masyarakat istilah *konsiliasi* dalam menyelesaikan suatu masalah seringkali mempunyai *konotasi negatif*, yaitu mempermudah proses penyelesaian dengan jalan di luar prosedur yang ditetapkan dengan memberikan imbalan sejumlah uang kepada pihak-pihak yang terlibat dalam proses tersebut.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Marsudi Triatmodjo. "Alternatif Penyelesaian Sengketa Lingkungan (Industrialisasi vs Masyarakat)." disampaikan dalam *Seminar Industrialisasi dan Dampaknya Terhadap Lingkungan Hidup*. Diselenggarakan oleh LOKTIK X, KN Kimia-FMIPA UGM. Yogyakarta tanggal 28 Maret 1996. Hlm 7.

Pengertian *konsiliasi* adalah penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam suasana kekeluargaan (*friendly*).<sup>12</sup> Syarat utama dalam menggunakan cara ini adalah bahwa sejak awal kedua belah pihak harus telah menyadari hak-hak dan kewajibannya, serta telah dapat memahami keprihatinan masing-masing mengenai masalah yang disengketakan.

### 3. *Mediasi*

Mekanisme penyelesaian sengketa lingkungan dengan cara ini telah banyak digunakan di negara-negara industri maju, seperti Amerika, Kanada, dan Jepang. Menurut *Grenville-Wood*, cara ini pada pokoknya diartikan sebagai suatu proses penyelesaian sengketa dengan bantuan pihak ketiga yang netral dalam upaya negosiasi penyelesaian sengketa tersebut. Dengan cara ini, para pihak mencari jasa pihak ketiga netral dengan cara seperti mencari pengacara yang dapat diterima oleh semua pihak.<sup>13</sup>

Pihak ketiga netral pada prinsipnya akan membantu para pihak yang bersengketa untuk menyepakati suatu kesepakatan yang berorientasi ke depan sesuai kebutuhan dan memenuhi rasa keadilan. Pihak ketiga netral tidak memiliki kewenangan campur tangan untuk memutuskan dan menentukan hasil akhir kesepakatan karena para pihak yang bersengketa itu sendiri yang harus melakukannya.

---

<sup>12</sup> Henry Campbell Black, 1990. *Black's Law Dictionary*. St. Paul Minn: West Publishing Co. Hlm. 289-290

<sup>13</sup> Koesnadi Hardjasoemantri, *Op. Cit* hal. 374.

Aspek yang paling penting dalam proses *mediasi* adalah adanya kesediaan para pihak untuk berunding menyelesaikan sengketa secara jujur dan dapat diterima semua pihak. Dengan mengadakan perundingan secara jujur ini, para pihak akan saling mengetahui hak-hak dan kewajibannya, dengan demikian akan memahami keprihatinan masing-masing.

#### 4. Arbitrase

*Arbitrase* merupakan mekanisme penyelesaian sengketa dengan bantuan pihak ketiga yang netral. Namun, dibanding ketiga mekanisme tersebut, pihak ketiga bertindak sebagai "hakim" yang diberi kewenangan penuh oleh para pihak untuk menyelesaikan sengketa. Oleh karena itu ia berwenang mengambil keputusan (*award*) yang bersifat final dan mengikat (*final and binding*).

Dari berbagai macam bentuk ADR ini, maka keberadaan bentuk-bentuk itu sendiri dapat saja mengalami modifikasi-modifikasi model yang disesuaikan dengan kebutuhan situasi pada saat penyelesaian sengketa itu sendiri.

Sengketa lingkungan hidup yang sering muncul di permukaan adalah kasus-kasus yang berkaitan dengan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, dan juga konflik kepentingan atas sumber daya alam, (limbah industri, bahan beracun dan berbahaya, air, dan juga hak adat/ulayat atas hutan, dan lain sebagainya). Karena itu peraturan

perundang-undangan yang dapat menjadi rujukan atau titik tolak penyelesaian sengketa lingkungan hidup akan diusahakan pelacakannya.

Pengaturan ADR dalam Pasal 20 UULH mengatakan bahwa penyelesaian sengketa lingkungan hidup dilaksanakan terlebih dahulu melalui mekanisme pembentukan tripihak, yang terdiri dari pencemar atau kuasanya, penderita atau kuasanya, dan unsur pemerintah. Apabila kesepakatan dalam tim tripihak tidak tercapai maka sengketa tersebut dapat dibawa ke pengadilan.

Dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa pembentukan tim tripihak adalah *mandatory*, suatu keharusan. Dengan demikian sengketa lingkungan hidup tidak dapat langsung diajukan ke pengadilan, akan tetapi harus melalui penyelesaian dalam tripihak terlebih dahulu.

Dengan adanya lembaga *mediasi* sebagai bagian dari lembaga yang ada dalam ADR, di sana kedudukan dan fungsi *mediasi* bertindak sebagai pihak yang netral dan bersifat memfasilitasi berbagai alternatif penyelesaian sengketa. Seandainya salah satu alternatif penyelesaian sengketa dalam proses mediasi disetujui oleh kedua belah pihak, maka selesailah tugas pihak ketiga netral dan untuk jasanya itu mendapat imbalan.<sup>14</sup>

Pada prakteknya, pembentukan tim tripihak yang dibentuk oleh pemerintah sering tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya, hal ini disebabkan oleh faktor ketidaknetralan dari pihak pemerintah. Pada masa

---

<sup>14</sup> R.F. Saragih, *Fungsionalisasi ADR dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup*, Jurnal Hukum UII No13 Juli 2000, hlm. 143.

rejim Orde Baru kultur birokrasi yang ada telah melahirkan bentuk korupsi, kolusi dan nepotisme. Kultur ini juga berlaku dalam upaya penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan sementara dalam UULH tidak memungkinkan menjadikan pihak lainnya untuk dapat menjadi pihak ketiga netral.

Atas dasar pertimbangan dan realitas tersebut, maka berdasarkan UULH pola penyelesaian lingkungan hidup di luar pengadilan diperluas makna maupun penentuan pihak ketiga netral. Pasal 30 ayat (1) UULH menyatakan bahwa penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pihak yang bersengketa. Artinya penyelesaian sengketa lingkungan hidup tidak harus melalui upaya di luar pengadilan lebih dahulu, sebagaimana tertuang dalam Pasal 20 ayat (2) UULH beserta penjelasannya.

Pasal 31 UUPLH menyatakan bahwa penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti kerugian dan atau mengenai tindakan tertentu guna menjamin tidak akan terjadinya atau terulangnya dampak negatif terhadap lingkungan.

Penjelasan Pasal ini menyatakan bahwa penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui perundingan di luar pengadilan dilakukan secara sukarela oleh para pihak yang berkepentingan, yaitu para pihak yang mengalami kerugian dan mengakibatkan kerugian, instansi pemerintah

yang terkait dengan subjek yang mempunyai kepedulian terhadap pengelolaan lingkungan hidup.

Tindakan tertentu yang dimaksud dalam Pasal ini adalah sebagai upaya memulihkan fungsi lingkungan hidup dengan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat. Perlu diperhatikan tentang penentuan besarnya kerugian. Hal ini dapat diserahkan kepada tim ahli untuk menghitungnya. Demikian pula tentang besarnya biaya yang diperlukan untuk memulihkan lingkungan hidup dapat diserahkan perhitungannya kepada tim ahli.

Formulasi penjelasan Pasal 31 UUPLH membuktikan sifat mengikatnya penjelasan karena penafsiran otentiknya, sedangkan Pasal dalam batang tubuh mengikat karena sifat normatifnya.

Pasal 31 ayat (1) UUPLH menyatakan bahwa pemerintah dan/atau masyarakat dapat membentuk lembaga penyedia jasa pelayanan penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang bersifat bebas dan tidak berpihak.

Penjelasan ayat ini menyatakan bahwa lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup ini dimaksudkan sebagai suatu lembaga yang mampu memperlancar pelaksanaan mekanisme pilihan penyelesaian sengketa dengan mendasarkan pada prinsip ketidakberpihakan dan profesionalisme. Lembaga penyedia jasa yang dibentuk oleh pemerintah dimaksudkan sebagai pelayanan publik.

Pasal 31 ayat (2) menyatakan bahwa ketentuan mengenai penyedia jasa pelayanan penyelesaian sengketa lingkungan hidup diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah tentang hal ini diperlukan agar diperoleh pembakuan (*standarisasi*) lembaga penyedia jasa tersebut. Mengingat penyelesaian sengketa lingkungan hidup mempunyai sifat-sifat tersendiri, yang diperoleh melalui program yang mengarah kepada kualifikasi.

Salah satu faktor penyebab dari difungsikannya lembaga ADR dalam penyelesaian sengketa, semuanya ini tidak lepas dari sistem peradilan yang cenderung dalam penyelesaian sengketa-sengketa yang lebih banyak memakan waktu, biaya, dan cenderung berbelit-belit.

Fungsionalisasi ADR dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat dilakukan dengan dua cara, yakni; **pertama** melalui *Out of Court ADR* dan **kedua** melalui *Court Connected ADR*. *Out of Court ADR* adalah upaya penyelesaian sengketa lingkungan hidup dengan cara benar-benar di luar lembaga peradilan. Sedangkan cara *Court of Connected ADR* merupakan upaya penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui lembaga ADR yang dihubungkan dengan lembaga peradilan.

Dari kedua cara ini yang lebih memungkinkan untuk diterapkan di Indonesia adalah upaya *out of court ADR*, karena cara pertama ini memang sangat efektif dalam mengurangi beban perkara di pengadilan. Sebagai contoh dalam kasus pencemaran sungai Tapak antara PT.

Semarang *Diamond Chemical* (anak perusahaan dari PT. Bintaro Dharma) yang berkongsi dengan *Mitsubishi* dan *Showa Chemical* dari Jepang dan penduduk Dukuh Tapak, Kotamadia Semarang yang digambarkan oleh Santoso dan Hutapea.<sup>15</sup> Walaupun pelaksanaan kesepakatan yang dicapai pada tanggal 29 Agustus 1991 tersebut tidak berjalan dengan mulus, secara umum model mediasi mungkin lebih tepat jika dikatakan "*quasi mediasi*" karena ada keterlibatan unsur pemerintah yang digunakan di dukuh Tapak ini dapat dikatakan berhasil.

Indikator keberhasilan dapat dilihat dari kesepakatan yang dicapai oleh para pihak, di antaranya meliputi:

- a) ganti kerugian;
- b) upaya pengendalian pencemaran;
- c) upaya rehabilitasi;
- d) tanggung jawab sosial industri terhadap masyarakat, sebagai konsekuensi dari prinsip koeksistensi antara industri dan masyarakat;
- e) perombakan perijinan usaha dari para industri dengan menerapkan syarat pengendalian pencemaran tambahan;
- f) mekanisme pemantauan pasca kesepakatan dengan cara melibatkan masyarakat dan LSM.

---

<sup>15</sup>Mas Ahmad Santosa & Anthony LP Hutapea, 1992. *Sebuah Pengalaman: Mendayagunakan Mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa Lingkungan (MAPS) di Indonesia*. Jakarta: WALHI - USAID. Hlm.3-6.



Keberhasilan ini tidak terlepas dari keseriusan Pemerintah Kota Semarang dalam menyelesaikan kasus yang telah berjalan 14 tahun tersebut. Proses kesepakatan yang tercapai hanya dalam waktu 85 hari, serta pembiayaan yang relatif murah jika dibandingkan dengan *cara litigasi*, bahkan masyarakat korban pencemaran Tapak tidak dibebani biaya karena pembiayaanya diambil dari APBD Kotamadia Semarang.

Kasus di atas merupakan salah satu kasus yang dapat diselesaikan melalui lembaga ADR, meskipun penyelesaian kasus masih memakai UULH. Tetapi setidaknya dengan gambaran ini ada semacam harapan fungsi dan peran lembaga ADR akan mampu memberikan kontribusi yang positif dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup, terlebih jika melihat kepada UUPLH kesempatan dalam mengoptimalisasikan lembaga ADR ini sangat besar dan luas.<sup>16</sup>

Upaya *Court Connected ADR*, masih belum memungkinkan, hal ini disebabkan kondisi lembaga peradilan Indonesia masih menyimpan sejumlah permasalahan di antaranya masih banyaknya perkara yang masih menumpuk dan belum diselesaikan bila cara kedua dipaksa untuk dipakai, maka penumpukan perkara itu akan semakin bertambah.

Strategi lain dalam upaya fungsionalisasi lembaga ADR di Indonesia seperti diketahui akhir-akhir ini adalah sikap pemerintah yang telah membentuk Tim ADR yang diketuai oleh Menteri Hukum dan Perundang-Undangan (Menkumdam) bekerjasama dengan *Asia*

---

<sup>16</sup> Saragih, R.F, *Fungsionalisasi ADR dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup*, Makalah dalam *Jurnal Hukum*, diterbitkan oleh FHUII, vol. 7 tahun 2000.hal 145

*Foundation* yang tugasnya mempersiapkan pelaksanaan ADR dan lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup.

## F. METODE PENELITIAN

### 1. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini bersifat *yuridis-normatif*, yang meliputi penelitian terhadap asas-asas hukum untuk mengetahui sejauh mana hukum diterapkan bagi ADR dengan didukung oleh data *sekunder*. Digunakannya pendekatan *yuridis normatif* dengan pertimbangan bahwa penelitian ini bertujuan untuk membahas dan mengkaji berbagai peraturan yang ada tentang ADR. Pendekatan ini sesuai dengan pandangan yang memahami bahwa hukum sebagai norma, kaidah, dan peraturan yang berlaku dalam masyarakat yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum<sup>17</sup>.

Penelitian normatif ditujukan kepada bentuk *inventarisasi hukum* dan penelitian terhadap *taraf sinkronisasi* peraturan yang bersifat vertikal atau horizontal. Inventarisasi asas hukum adalah berkaitan dengan semua peraturan yang berkaitan dengan pelaksanaan dari ADR. Sedangkan *taraf sinkronisasi hukum* ditujukan terhadap peraturan baik

---

<sup>17</sup>Soetandyo Wignjosebroto, *Masalah Metodologi dalam Penelitian Hukum sehubungan dengan Masalah Keragaman Pendekatan Konseptualnya*, Makalah pada Pelatihan Metodologi Penelitian, Fak.Hukum UNDIP, Mei,1999, hal.30

secara vertikal, antara peraturan yang lebih rendah dengan yang lebih tinggi atau antara peraturan yang berlainan bidangnya<sup>18</sup>.

Di samping *pendekatan yuridis normatif*, penelitian ini dilengkapi pula secara empiris dengan pengambilan data di lapangan untuk mengetahui peran bekerjanya hukum ADR. Sampel ditentukan dengan menggunakan metode random sampling. Pihak-pihak yang terkait diambil sampel untuk diwawancarai. Melalui pendekatan tersebut diharapkan dapat memahami permasalahan yang ada *secara mendalam dan komprehensif* sehingga dapat diupayakan langkah-langkah selanjutnya.

## 2. Metode Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan meliputi *data primer* dan *sekunder* yang diperoleh melalui studi kepustakaan maupun studi di lapangan meliputi:

- 1) Bahan *hukum primer*, yaitu merupakan bahan pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah baru atau mutakhir, ataupun pengertian baru tentang fakta yang diketahui mengenai suatu gagasan atau ide, terdiri dari :
  - a) Norma dasar Pancasila dan UUD 1945
  - b) KUU Hukum perdata (KUH perdata)

---

<sup>18</sup>Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hal.11.

- 2) Bahan *hukum sekunder*, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan *hukum primer* dan dapat membantu menganalisa serta memahami *bahan primer*, terdiri dari :
- a) peraturan perundang-undangan,
  - b) buku-buku hasil karya para sarjana,
  - c) hasil-hasil penelitian,
  - d) majalah dan jurnal hukum, dan
  - e) berbagai hasil seminar atau kegiatan ilmiah lainnya, yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas.
- 3) Bahan *hukum tersier*, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang *bahan hukum primer* dan *bahan hukum sekunder* di antaranya adalah kamus hukum atau kamus lainnya yang menyangkut penelitian.
- 4) Studi lapangan. Di dalam studi lapangan, pengumpulan data dengan wawancara yang dilakukan terhadap sumber informasi yang ditentukan sebelumnya, sehingga merupakan wawancara yang difokuskan.

Dalam wawancara ini, yang diwawancarai mempunyai pengalaman dalam hal ini birokrat, kalangan lembaga swadaya masyarakat, pengusaha atau pihak lain yang membidangi dengan

keterkaitan permasalahan di atas. Diharapkan wawancara ini memberikan gambaran tentang pelaksanaan dari ADR tersebut.

### 3. Metode Analisis Data

Setelah semua data yang berkaitan dengan penelitian dikumpulkan dilakukan *abstraksi* untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan dari ADR, kemudian dilakukan analisis dengan metode kualitatif terhadap nilai-nilai dari bentuk ADR di mana format penyelesaian sudah memenuhi rasa keadilan semua pihak .

Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai ADR maka dilakukan telaah analisis terhadap ADR dengan menggunakan undang-undang yang berlaku di Indonesia.

### G. SISTEMATIKA PENULISAN

Hasil penelitian ini disusun dalam empat bab secara sistematis. Antara bab satu dengan bab yang lainnya terkait secara sistematis. Adapun gambaran yang lebih mengenai penelitian ini akan diuraikan dalam sistematika sebagai berikut :

#### BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini memuat tentang latar belakang permasalahan, tujuan dan kegunaan yang diharapkan dari hasil penelitian. Kerangka pemikiran atau landasan teori dari sebuah permasalahan serta metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini akan

pemikiran atau landasan teori dari sebuah permasalahan serta metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini akan tercakup metode pendekatan, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data serta analisis data.

Untuk alasan pemilihan judul diuraikan tentang hal-hal yang menjadi alasan dilakukannya penelitian mengenai ADR.

## **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini akan dibahas tentang tinjauan pustaka yang berkaitan dengan permasalahan. Di sini akan dibahas pengertian serta bahasan terhadap beberapa persoalan pokok.

## **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

Bab ini akan menguraikan hasil penelitian serta pembahasannya. Dengan demikian di dalam bab ini akan termuat data yang dikumpulkan dari penelitian beserta penyajian dan analisisnya serta penemuan penelitian ini.

## **BAB IV PENUTUP**

Bab ini akan memuat tentang simpulan serta saran yang telah dirumuskan dari hasil penelitian dan pembahasannya.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN

Hukum lingkungan yang ketentuan pokoknya diatur dalam Undang-undang Lingkungan Hidup, yaitu UU Nomor 4 Tahun 1982 yang diperbaharui dengan UU Nomor 23 Tahun 1997 mengandung berbagai ketentuan aspek hukum, yakni Hukum Administrasi Negara (HAN), hukum perdata, dan hukum pidana.

Undang-undang tersebut sifatnya pokok sehingga dikenal sebagai ketentuan hukum yang memayungi ketentuan hukum lain yang mengatur masalah lingkungan (*Umbrella Law*). Dengan demikian, undang-undang tersebut menjadi landasan untuk menilai dan menyesuaikan ketentuan hukum lain yang mengatur masalah lingkungan hidup yang sudah ada ataupun yang akan diadakan.

Beberapa ciri khusus yang berkaitan dengan ketentuan Undang-Undang Lingkungan Hidup menurut Hamrat Hamid adalah :<sup>19</sup>

- 1 Dampak negatif pencemaran atau kerusakan lingkungan tidak mengenal batas-batas teritorial suatu negara, karena tidak lepas dan pengaruh proses globalisasi ekonomi.
2. Sumber daya alam (air, laut, tanah, dan udara dengan segala isinya) merupakan komponen lingkungan hidup yang bersifat bukan tidak

---

<sup>19</sup> Hamrat Hamid, Penegakan Hukum Lingkungan Melalui Tindakan Administrasi, Perdata, dan Pidana, *Makalah Seminar Hukum Lingkungan Fakultas Hukum (UNS, Surakarta*, hal 1 dan 2

terbatas dan harus diperhitungkan sebagai faktor yang mempunyai nilai ekonomis.

3. Lingkungan hidup Indonesia merupakan karunia Tuhan sehingga menjadi hak dan kewajiban setiap orang untuk menjaga kelestarian kemampuannya agar tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi bangsa dan rakyat Indonesia serta makhluk lainnya demi kelangsungan dan peningkatan kualitas hidup itu sendiri.
4. Bagi negara dan bangsa yang sedang membangun. Maka pertentangan kepentingan antara pertumbuhan yang sering menimbulkan dampak merusak atau mencemarkan lingkungan, di satu sisi, dengan upaya pencegahan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup, di sisi lainnya, masih dirasakan sebagai beban yang berat sehingga menimbulkan konflik antara pembangunan dan penegakan hukum.
5. Ancaman dan bahaya bagi kesejahteraan dan kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya, sering hanya terjangkau oleh penalaran manusia dengan teknologi maju dan multidisiplin ilmu.
6. Pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan lingkungan hidup, terutama dalam bentuk pencemaran atau perusakan lingkungan hidup akibat kegiatan perindustrian dan pertambangan menuntut kearifan dalam memilih dan menggunakan instrumen hukum administrasi negara, perdata, dan pidana.



Faktor yang menentukan keberhasilan penegakan hukum lingkungan akan berkaitan dan tidak hanya bertumpu pada produk undang-undang yang ada, tetapi juga terletak pada kemampuan aparat penegakan hukum dan kepatuhan warga masyarakat pada peraturan undang-undang yang ada. Penegakan hukum, dalam hal ini dapat dilakukan melalui instrumen Hukum Administrasi Negara (HAN), Hukum Perdata, dan Hukum Pidana.

### **1. Hukum Administrasi Negara (HAN)**

Kalau dikaji secara mendalam, bagian terbesar hukum lingkungan di Indonesia merupakan Hukum Administrasi Negara (HAN). Hukum Administrasi Negara dapat berbentuk Undang-Undang (UU), Peraturan Pemerintah (PP), Keputusan Menteri (Kepmen), Peraturan Daerah Tingkat I dan II (Perda Tk I dan II), Keputusan Penegakan Hukum Lingkungan Gubernur, dan Keputusan Bupati/Walikota. Hukum Administrasi Negara akan tampak berkaitan dengan peran Pemerintah untuk memberikan perijinan pendirian usaha dan melakukan langkah pengamanan penyelamatan lingkungan apabila ketentuan yang disyaratkan dalam perizinan dilanggar.

#### **(a) Perizinan**

Instrumen Hukum Administrasi yang sudah ada sejak dulu adalah perizinan yang didasarkan pada undang-undang gangguan atau *Hinder Ordonantie* (HO). Macam jenis perizinan lainnya adalah izin usaha industri, izin lokasi, izin mendirikan bangunan (IMB), izin pembuangan

limbah, izin usaha kawasan industri, izin eksplorasi, izin eksploitasi sumber daya alam di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), izin usaha perikanan, izin kuasa pertambangan, izin penebangan pohon dalam hutan, izin pengelolaan, pengangkutan dan pembuangan bahan berbahaya dan beracun (B3), dan izin lainnya.

Ketentuan *Hinder Ordonantie* (HO) merupakan larangan mendirikan tempat usaha sebelum memperoleh izin. Sebagai peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup. Menurut Leenen, HO mengandung beberapa kelemahan, di antaranya :<sup>20</sup>

1. HO sifatnya hanya semacam hukum tetangga, karena jangkaun teritorialnya terbatas pada jarak 200 meter dan tempat usaha yang bersangkutan.
2. HO dilakukan terbatas oleh Pemda Tk. II, sedang pencemaran lingkungan tidak mengenal batas wilayah daerah Tk II.
3. HO hanya ditujukan kepada bahaya, kerusakan, dan gangguan yang timbul dan tempat usaha.
4. HO merupakan *ordonansi* yang bersifat individual, karena ditujukan pada gangguan yang ditimbulkan oleh perusahaan secara mandiri dan tidak terhadap beban derita yang diperbuat oleh pencemar secara kolektif.
5. Pada saat dipertimbangkan izin, tidak diperhitungkan hubungan antara pencemar yang diakibatkan oleh perusahaan yang satu dengan

---

<sup>20</sup> Leenen dalam Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan dalam Proses Pembangunan Hukum Nasional Indonesia*, Unair, 1986, hal 96-97.

pencemar dari perusahaan-perusahaan lain.

6. *HO* mengandung ketentuan tentang persyaratan sarana dan hanya dalam hal-hal tertentu ada persyaratan tujuan. Untuk industri modern tidak dapat diterapkan ketentuan persyaratan harus mencantumkan sarana yang dapat menanggulangi bahaya, kerusakan, dan gangguan. Karena itu, tempat usaha sendiri yang mempunyai tanggung jawab untuk membuat prosedur teknis sedemikian rupa sehingga tujuan itu dapat tercapai.
7. *HO* tidak cukup fleksibel, karena tempat usaha tidak saja harus dibangun sesuai dengan izin, tetapi bekerjanya hendaklah serasi. Keseluruhan prosedur *HO* sulit untuk dilaksanakan.
8. Penutupan perusahaan sebagai sanksi *HO* tidak fakultatif, berarti harus juga diterapkan pada bentuk penyimpangan-penyimpangan kecil. Dengan demikian, tidak ada hubungan yang layak antara sarana paksa dengan beratnya perbuatan yang dilakukan.
9. Batasan pengertian perusahaan (tempat usaha) dalam *HO* tidak jelas, tidak limitatif sehingga dapat menimbulkan kesulitan dalam penerapannya.

Ketentuan perizinan dalam Undang-undang Lingkungan Hidup diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2) UU No. 4 Tahun 1982 dan diperbaharui dengan Pasal 18 - 27 UU No. 23 Tahun 1997. Pasal 18 mengatur perizinan yang berkaitan dengan pembangunan suatu proyek

yang berdampak besar dan penting terhadap lingkungan diperlukan adanya analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL). Pasal 19 mengatur perizinan yang diperlukan untuk melakukan pembuangan limbah ke media lingkungan. Sedang ketentuan sanksi administrasi yang berkaitan dengan pelanggaran perizinan diatur dalam Pasal 25 dan 27, di mana kewenangan untuk menjatuhkan sanksi dapat dilakukan dan tingkat Menteri sampai pejabat di tingkat daerah tergantung bentuk dan bobot pelanggarannya.

Dalam prosedur dan proses perijinan dicantumkan sanksi terhadap berbagai resiko yang kemungkinan akan timbul, yakni mulai dari sanksi yang bersifat *preventif*, *represif* sampai pada sanksi administratif yang terberat berupa penutupan kegiatan usaha dengan disertai pencabutan ijin usaha. Disamping itu, termasuk dalam aspek hukum ini perlu adanya pembinaan, baik berupa petunjuk, panduan, maupun pengawasan.

Institusi pengawas, menurut Pasal 22 ayat (1), (2) dan (3) UU No. 23 Tahun 1997 adalah Menteri yang ditugasi untuk mengelola lingkungan hidup yang selanjutnya disebut Menteri Negara Lingkungan Hidup (MENLH). Secara lengkap disebutkan :

- (1) Menteri melakukan pengawasan terhadap penataan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan atas ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup

(2) Untuk melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat

(1) Menteri dapat menetapkan pejabat yang berwenang melakukan pengawasan

(3) Dalam hal wewenang pengawasan diserahkan kepada Pemerintah Daerah, Kepala daerah menetapkan pejabat yang berwenang melakukan pengawasan.

Ketentuan tersebut memberi wewenang kepada *MENLH* untuk melakukan pengawasan terhadap penataan yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup. Dalam perizinan pendirian usaha atau kegiatan usaha, Menteri yang berkaitan dengan kegiatan usaha yang didirikan juga berwenang melakukan pengawasan atas semua ketentuan yang berkaitan dengan izin yang diberikan. Oleh karena itu, penjelasan Pasal 22 ayat (2) tersebut menyebutkan bahwa dalam hal yang berkaitan dengan penetapan pejabat yang berwenang dan instansi lain untuk melakukan pengawasan, Menteri melakukan kordinasi dengan pimpinan instansi yang bersangkutan.

Untuk melakukan tugas pengawasan diberikan kewenangan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 24 ayat (1) bahwa:

(1) Untuk melaksanakan tugasnya, pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, berwenang melakukan pemantauan, meminta keterangan, membuat salinan dari dokumen dan atau membuat catatan yang diperlukan, memasuki tempat tertentu, mengambil contoh, memeriksa peralatan, memeriksa instansi dan atau

tansportasi, serta meminta keterangan dari pihak yang bertanggung jawab atas usaha dan atau kegiatan.

(2) Penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang dimintai keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). wajib memenuhi permintaan petugas pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berlaku.

(3) Setiap pengawas wajib memperlihatkan surat tugas dan atau tanda pengenal serta wajib memperhatikan situasi dan kondisi tempat pengawasan tersebut.

Menurut Philipus Mandiri Hadjon,<sup>21</sup> wewenang petugas pengawas, sebagaimana diatur dalam Pasal 24 tersebut dapat dibedakan menjadi pertama wewenang yang tidak membutuhkan respon dari penanggung jawab kegiatan dan kedua wewenang yang membutuhkan respon dari penanggung jawab kegiatan untuk dapat terlaksananya wewenang pengawas. Dalam hal ini, wewenang dilakukan pemantauan tidak membutuhkan respon dari penanggung jawab kegiatan, sedang wewenang lainnya hanya dapat terlaksana kalau ada respon dari penanggung jawab usaha dan atau kegiatan dan wewenang ini sifatnya *imperatif* karena itu wajib ditaati.

Ketentuan sanksi administrasi dalam UU No. 23 Tahun 1997 meliputi :

---

<sup>21</sup> Philipus Mandiri Hadjon, UU No.23 Tahun 1997 dan Penegakan Hukumnya, Ditinjau dan Aspek Hukum Administrasi", *Makalah seminar Fakultas Hukum UNDIP*, tanggal 21 Pebruari 1998, hal 8.

1. Paksaan dari Pemerintah (Pasal 25 ayat (1)).
2. Pembayaran sejumlah uang tertentu (Pasal 25 ayat (5)).
3. Pencabutan izin usaha dan atau kegiatan (Pasal 27 ayat (1)).

Ketentuan sanksi paksaan dari pemerintah sebagaimana diatur dalam, Pasal 25 ayat (1) tersebut dapat berupa:

1. Tindakan untuk mencegah terjadinya pelanggaran.
2. Tindakan untuk mengakhiri pelanggaran.
3. Tindakan menanggulangi akibat yang timbul.
4. Tindakan penyelamatan.
5. Tindakan pemulihan.

Pejabat pemerintah yang berwenang untuk menerapkan sanksi tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (2), adalah Gubernur KDH Tk I, di mana wewenang tersebut dapat diserahkan kepada Bupati/Wali kota KDH Tk. II. Wewenang Gubernur dalam hal ini merupakan tugas pembantuan (*medebewind*). Dengan demikian, pemerintah pusat masih berwenang untuk menerapkan paksaan Pemerintah dalam hal Kepala Daerah tidak mampu atau dinilai lambat dalam mengambil tindakan.

Ketentuan sanksi administrasi yang diatur dalam Pasal 25 ayat (5) UU No.23 Tahun 1997 mengenai sanksi paksaan dari Pemerintah terhadap tindakan penyelamatan penanggulangan dan atau pemulihan dapat diganti dengan pembayaran sejumlah uang tertentu (*dwangsom*). Hal ini, menurut Siti Sundari Rangkuti, dapat membuka peluang terjadinya praktek

kolusi dalam pemberian sanksi terhadap pihak yang terbukti melakukan perbuatan pelanggaran lingkungan.<sup>22</sup>

Ketentuan sanksi administrasi tersebut dinilai masih kurang, karena itu perlu dituangkan beberapa ketentuan sanksi administrasi yang lain, seperti :

1. Paksaan pemerintah atau tindakan paksa.
2. Uang paksa
3. Penutupan tempat usaha
4. Penghentian kegiatan mesin perusahaan
5. Pencabutan izin usaha.

Hasil penelitian Siti Sundari Rangkuti,<sup>23</sup> mengungkapkan penerapan jenis sanksi administrasi dalam pengendalian pencemaran lingkungan di Indonesia meliputi ketentuan sebagai berikut:

1. Penutupan tempat usaha (Pasal 14 HO).
2. Penghentian kegiatan mesin perusahaan (Pasal 14 HO).
3. Peringatan secara tertulis (Pasal 33 ayat (1) PP No. 20 Tahun 1990 dan Pasal 37 ayat (1) PP No. 19 Tahun 1994).
4. Peringatan secara tertulis dan pembakuan izin usaha industri (Pasal 30 SK Menteri Perindustrian No. 150/M/SK/7/1995).
5. Penutupan perusahaan dan penghentian mesin (pasal 14 HO dan Pasal 37 ayat (2) PP No. 19 Tahun 1994).

---

<sup>22</sup> Siti Sundari Rangkuti, "Perbandingan UUPH dan Wet Milieu Beheer, , Universitas Airlangga dan Universitas Utrecht, 1999, hal 9.

<sup>23</sup> Ibid, hal 10 dan 11.



6. Pencabutan izin (Pasal 12 ayat (1) *HO*, Pasal 8 ayat (1) SK Menteri Perindustrian No. 148/M/SK/41 1985, Pasal 10 PP No. 13 tahun 1995, Pasal 29 SK Menteri Perindustrian No. 150/M/SK/7/ 1995, Pasal 33 ayat (2) PP No. 20 Tahun 1990.
7. Tindakan administratif oleh Bupati/Walikota (Pasal 37 PP No. 20 Tahun 1990).
8. Paksaan pemerintah (tindakan paksa) (Pasal 36 ayat (2) PP No. 20 Tahun 1999).
9. Paksaan pemerintah (Pasal 25 ayat (2), (3) dan (4) UU No. 23 Tahun 1997).
10. Pencabutan izin usaha dan atau kegiatan (Pasal 27 UU No: 23 Tahun 1997).

Pengaturan perizinan lingkungan hidup tersebut sifatnya masih individual, masing-masing berdiri sendiri-sendiri dengan wewenang memberi izin di tangan instansi yang berbeda. Di samping itu, belum ada ketentuan koordinasi dan keterpaduan prosedur perizinan antar instansi yang terkait.

Mengingat pentingnya perizinan dalam masalah lingkungan hidup, menurut Siti Sundari Rangkuti,<sup>24</sup> maka perlu segera dilakukan *revisi* UU No. 23 Tahun 1976, terutama yang berkaitan dengan pengaturan sistem perizinan lingkungan terpadu dan koordinatif. Dalam undang-undang itu perlu diatur juga bangunan/instalasi yang memerlukan izin

---

<sup>24</sup> 'Siti Sundari Rangkuti, *ibid*, hal 20.

sebagai instrumen pencegahan terhadap hal-hal yang tidak diinginkan. Elemen utama hendaklah mengatur ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Sistem perizinan lingkungan untuk bangunan usaha/instalasi yang mencakup semua jenis pencemaran lingkungan.
2. Wewenang untuk menetapkan baku mutu *ambien* dan proses produksi terhadap semua jenis pencemaran lingkungan
3. Prosedur perizinan; termasuk peran serta masyarakat dan akses terhadap informasi.
4. Ketentuan tentang perlindungan hukum administrasi (banding).
5. Ketentuan tentang pengawasan, pemantauan, dan penegakan hukum lingkungan administrasi, perdata, dan kepidanaan.

Jenis-jenis perizinan yang memerlukan keterpaduan dan koordinasi pengaturan, antara lain:

1. *Ordonansi Gangguan (HO)*.
2. UU Perindustrian.
3. PP Pengendalian Pencemaran Air.
4. PP Pengelolaan limbah Beracun dan Berbahaya (B3)
5. PP Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).

Sebagai bahan pemikiran, menurut Siti Sundari Rangkuti<sup>25</sup> perlu segera diciptakan sistem perizinan terpadu untuk tempat kegiatan usaha yang dapat menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup. Koordinasi perizinan diperlukan terhadap dua atau lebih permohonan izin

---

<sup>25</sup> Siti Sundari Rangkuti, *Op. Cit.*, hal 103

yang ada hubungan satu dengan yang lain dan menyangkut tempat usaha mandiri. Koordinator perizinan yang tepat dalam hal ini adalah pada Pemda Tingkat I.

## 2. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).

Instrumen Hukum Administrasi mutakhir pengaman masa depan lingkungan hidup adalah melalui analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL). Dengan AMDAL diharapkan semua kegiatan yang berdampak besar dan penting terhadap lingkungan akan dapat diantisipasi, karena akan dapat diketahui secara lebih terperinci dampak negatif dan positifnya yang akan timbul dari suatu kegiatan usaha sehingga sejak dini dapat dipastikan langkah untuk menanggulangnya.

Pasal 18 UU No. 23 Tahun 1997 menyebutkan:

- (1) Setiap usaha dan atau kegiatan yang menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup untuk memperoleh izin melakukan usaha dan atau kegiatan.
- (2) Izin melakukan usaha dan atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Izin, sebagaimana pada ayat (1), di dalamnya, dicantumkan persyaratan dan kewajiban untuk melakukan upaya pengendalian dampak lingkungan hidup tanpa disertai dengan persyaratan dan kewajiban tersebut, izin pendirian suatu proyek tidak dapat diberikan. Namun dalam

praktik, ketentuan tersebut sering kali diabaikan begitu saja. Banyak proyek pembangunan yang semestinya harus disertai AMDAL, tetapi tanpa disertai dokumen AMDAL, bahkan sering juga ditemukan bentuk AMDAL fiktif.

AMDAL sering dikeluhkan banyak pihak hanya sebagai alat legitimasi pembangunan suatu proyek. Keharusan adanya AMDAL untuk kegiatan tertentu, membuka peluang adanya AMDAL fiktif. Walaupun keberadaan suatu proyek disertai AMDAL seringkali persyaratan, seperti harus mendapat persetujuan masyarakat sekitar, sesuai dengan tata ruang dan rekomendasi dari pejabat yang berwenang yang berkaitan dengan usaha tersebut sering kali tidak diperhatikan. Kalau hal semacam itu terjadi maka adanya ketentuan AMDAL tidak akan dapat menjadi instrumen penanganan masa depan lingkungan.

Proyek-proyek seperti perumahan di sekitar wilayah Bandung Utara dan daerah Puncak Bogor merupakan contoh yang sulit dimengerti masyarakat sekalipun proyek tersebut dilengkapi dengan dokumen AMDAL. Karena ketentuan yang mensyaratkan perlunya minta pendapat atau persetujuan masyarakat tidak diperhatikan sehingga masyarakat tidak memperoleh informasi yang lengkap dan benar. Selama ini banyak proyek yang dibangun tidak terlebih dahulu minta pendapat dan persetujuan masyarakat. Di samping itu, pemrakarsa Proyek banyak yang tidak memberikan informasi yang benar dan jujur.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> Sudharto P. Hadi, "AMDAL dan Audit Lingkungan dalam UU No. 23 Tahun 1997", *Makalah Seminar Fakultas Hukum UNDIP*, Semarang Tanggal 21 Februari 1990, hal 5.

## **2. Hukum Perdata**

Aspek hukum perdata diatur dalam Pasal 20 ayat (1) UU No. 4 Tahun 1982 dan dalam UU No.23 Tahun 1997 diatur dalam Pasal 34 dan Pasal 35. Apabila terjadi kerusakan atau pencemaran lingkungan hidup, maka yang berpihak sebagai penggugat adalah masyarakat sedang pihak yang tergugat adalah pengusaha.

Untuk menyelesaikan sengketa menurut penjelasan Pasal 20 ayat (1) UU No.4 Tahun 1982 akan dibentuk Tim yang terdiri dari pihak masyarakat (penderita) atau kuasanya, pihak pengusaha/pencemar atau kuasanya dan jika diperlukan akan diangkat tenaga ahli untuk menjadi anggota Tim, serta unsur dari pihak pemerintah yang ditunjuk untuk itu.

Tugas Tim tersebut adalah melakukan penelitian meliputi bidang ekologi, media, sosial, budaya, dan bidang lainnya yang terkait dengan itu yang dianggap perlu Berdasarkan kerja Tim diharapkan akan diperoleh kesepakatan antara kedua belah pihak yang bersengketa, untuk kemudian ditentukan jenis kerugian dan besarnya kerugian. Apabila tidak dapat tercapai kesepakatan dalam batas waktu tertentu, maka penyelesaiannya akan dilakukan melalui lembaga Pengadilan.

Dalam kenyataannya sampai dengan UU No. 4 Tahun 1982 diganti dengan UU No.23 Tahun 1997, peraturan perundang-undangan atau peraturan pelaksana yang mengatur tata cara pengaduan, tata cara penelitian dan tata cara penuntutan ganti kerugian belum pernah

dikeluarkan. Hal ini menjadikan kendala dalam penegakan hukum lingkungan dari aspek hukum perdata. Banyak kasus gugatan ganti rugi yang diajukan masyarakat menjadi tidak tertampung.<sup>27</sup>

Dalam masalah ganti rugi, untuk menentukan siapa yang telah melakukan perbuatan melawan hukum, menurut ketentuan hukum perdata, yakni Pasal 1243 dan Pasal 1365 KUH Perdata diatur asas *Liability based on fault*. Pasal 1243 berisi "penggantian biaya, kerugian, dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan apabila si terutang setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatan, tetap melalaikannya, atau jika suatu yang harus diberikan atau dibuatnya hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampauinya. Pasal 1365 berisi tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.

Dalam Pasal tersebut unsur kesalahan bersifat menentukan pertanggungjawaban, yang berarti bila tidak terbukti adanya kesalahan tidak ada kewajiban untuk memberi ganti rugi. Kaitannya dengan pembuktian menurut Pasal 1865 disebutkan bahwa "barangsiapa mengajukan peristiwa atas nama ia mendasarkan sesuatu hak, diwajibkan

---

<sup>27</sup> Paulus Efendie Lotulung, "Penegakan Hukum Lingkungan dalam UU No. 23 Tahun 1997, Tinjauan dari Aspek Hukum perdata", *Makalah Seminar Fakultas Hukum UNDIP*, Semarang, 23 Februari 1998, hal 4.

membuktikan peristiwa-peristiwa ini, sebaliknya barangsiapa mengajukan peristiwa-peristiwa guna membantah hak orang lain, diwajibkan untuk membuktikan peristiwa-peristiwa itu”.

Asas tersebut dinilai akan memberatkan pihak yang melakukan gugatan, karena untuk melakukan tuntutan ganti rugi pihak penggugat harus bisa membuktikan adanya unsur kesalahan pada pihak tergugat. Karena itu menurut Rudger Lummert dengan berkembangnya industrialisasi yang menghasilkan risiko yang bertambah besar serta makin rumitnya hubungan sebab akibat, maka teori hukum telah meninggalkan konsep ‘kesalahan” dan berpaling ke konsep “risiko”.<sup>28</sup>

Persoalan yang dialami penggugat, di samping posisinya lemah, jika dibandingkan dengan kedudukan pengusaha yang mempunyai pengetahuan, dana yang memadai juga karena kesulitan untuk melakukan kewajiban membuktikan :<sup>29</sup>

1. Hubungan sebab akibat faktual bahwa pencemaran atau rusaknya lingkungan adalah akibat limbah pabrik yang menjadi tanggung jawab tergugat yang harus dibuktikan oleh saksi ahli secara ilmiah sehingga hakim memahami dan memperoleh keyakinan. *Sebab scientific evidence* yang dikemukakan oleh saksi ahli pihak penggugat dapat ditangkis oleh *counter scientific evidence* saksi ahli yang diajukan pihak

---

<sup>28</sup> Koesnadi Hardjasoemantri, *Op. Cit*, hal 334.

<sup>29</sup> Hamrat Hamid, *Op. Cit.*, hal.6.

tergugat.

2. Hubungan sebab akibat antara kesengajaan atau kelalajan tergugat dengan akibat tercemar atau rusaknya Lingkungan.
3. Akibat tercemar atau rusaknya lingkungan menimbulkan ket rugian yang nyata dan dapat dihitung besarnya kerugian, tidak terlalu sulit bagi pihak tergugat untuk membantah atau mengaburkannya.

Hubungannya dengan perkembangan industri yang menimbulkan resiko semakin tinggi terhadap perubahan lingkungan, maka ketentuan asas tersebut tidak akan efektif apabila tetap diterapkan. Karena itu, menurut ketentuan UU No. 23 Tahun 1997 diterapkan asas yang dikenal dengan tanggung jawab mutlak (*strict liability*), yaitu beban pembuktian diserahkan pada pihak tergugat untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah.

Penerapan asas tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa beban pembuktian seyogyanya diserahkan kepada pihak yang mempunyai kemampuan terbesar untuk memberikan bukti-bukti dalam menyelesaikan suatu perkara. Karena apabila terjadi kerusakan atas pencemaran lingkungan yang diakibatkan karena kegiatan industri, maka pihak yang mempunyai kemampuan terbesar untuk melakukan pembuktian adalah pihak pengusaha .

Menurut *James E. Krier*, asas tanggung jawab mutlak dapat merupakan bantuan yang sangat besar dalam peradilan mengenai kasus-kasus lingkungan. Karena banyak kegiatan yang menurut pengalaman



menimbulkan kerugian terhadap lingkungan merupakan tindakan yang berbahaya, untuk mana dapat diberlakukan ketentuan tanggung jawab tanpa kesalahan. Dengan adanya pembalikan beban pembuktian, maka masalah beban pembuktian tidak akan menjadi halangan bagi masyarakat atau pun pencinta lingkungan untuk berperkara di pengadilan sebagai penggugat karena hal itu sudah menjadi tanggung jawab tergugat untuk membuktikan bahwa kegiatan-kegiatannya yang mengandung risiko tidak mempunyai akibat yang berbahaya terhadap lingkungan hidup di sekitarnya.”<sup>30</sup>

Asas tanggung jawab mutlak ini, dalam UU No. 4 Tahun 1982, diatur dalam Pasal 21 yang menyatakan bahwa dalam beberapa kegiatan yang menyangkut jenis sumber daya tertentu, tanggung jawab timbul secara mutlak pada perusak dan atau pencemar pada saat terjadi kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup. Dalam praktek dari beberapa kasus yang pernah terjadi berkaitan dengan kerusakan atau pencemaran lingkungan, asas tanggung jawab mutlak masih mengalami kesulitan untuk diterapkan.

Pasal 35 Undang-undang No.23 Tahun 1997 menyatakan bahwa penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, menggunakan bahan berbahaya beracun dan atau menghasilkan limbah bahan berbahaya beracun, bertanggung jawab secara mutlak atas kerugian. yang di-

---

<sup>30</sup> Koesnadi Hardjosoemantri, *Op. Cit.* hal 336.

timbulkan, dengan kewajiban membayar ganti rugi secara langsung dan seketika pada saat terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup”.

Penanggung jawab usaha dan atau kegiatan dapat dibebaskan dan kewajiban membayar ganti kerugian, jika yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa pencemaran atas kerusakan lingkungan hidup disebabkan karena salah satu sebab sebagai berikut:

1. Adanya bencana alam atau peperangan ;
2. Adanya keadaan terpaksa di luar kemampuan manusia;
3. Adanya tindakan pihak ketiga yang nienyebabkan terjadinya pencemaran dan atan kerusakan lingkungan hidup.

Untuk menentukan suatu perbuatan perlunya diterapkan *strict liability*, menurut L.B Curzon<sup>31</sup> diperlukan hal-hal sebagai berikut:

1. Perlunya ditaati suatu peraturan yang mengatur kesejahteraan masyarakat.
2. Pembuktian kesalahannya sangat sulit.
3. Tingginya kadar bahaya sosial akan membenarkan penginterpretasian *strict liability*.

Tanggung jawab tanpa kesalahan (*liability without fault*), sebenarnya tidak hanya berupa *strict liability* tapi ada yang disebut *vicarius liability*. *Vicarius liability* dari segi istilah tidak dikenai dalam undang-undang lingkungan Indonesia, tapi secara substansial terdapat dalam beberapa

---

<sup>31</sup> L.B. Curzon dalam Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Arikha Media Cipta, Jakarta, 1995, hal 120.

Pasal yang mengatur tanggung jawab perusahaan terhadap perbuatan perusakan atau pencemaran lingkungan hidup.

*Vicarius liability* diartikan sebagai tanggung jawab terhadap perbuatan orang lain, dalam arti suatu perusahaan dapat bertanggung jawab untuk membayar ganti kerugian yang disebabkan karena perbuatan karyawan perusahaan tersebut yang dilakukan atas kehendak sendiri. Jika tanggung jawab dibebankan pada karyawan, ia tidak mampu untuk membayar ganti kerugian. Oleh karena itu, pembayaran ganti rugi dibebankan pada perusahaan. Dalam hal ini, *vicarius liability* hanya dibebankan pada tuntutan ganti rugi bukan dalam berupa pidana penjara.

Sebenarnya ketentuan *vicarius liability* tersebut telah diambil dalam Pasal 1357 KHU Perdata yang menyebutkan bahwa "seseorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan oleh karena perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang bahkan karena perbuatan orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya". Ketentuan tersebut dapat dianalogikan bahwa seorang karyawan, tindakannya dapat menjadi tanggung jawab perusahaan apabila yang dilakukan berkaitan dengan ruang lingkup pekerjaan dalam perusahaan.

Untuk menerapkan *vicarius liability* perlu diperhatikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Bentuk pelanggaran tidak terlalu berat.

2. Hanya diperbolehkan untuk pelanggaran yang diancam dengan pidana denda atau sanksi perdata dan bukan berupa pidana penjara.
3. Dapat diperkirakan adanya kesalahan tetapi sulit dibuktikan.

### 3. Hukum Pidana

Program kerja *The Commission on Crime Prevention and Criminal Justice* tahun 1992-1996 menempatkan kaitan antara masalah lingkungan hidup dengan sistem peradilan pidana sebagai prioritas. Pada kongres PUB tentang pencegahan dan pembinaan para pelaku di Kairo 29 April-8 Mei 1995, masalah lingkungan hidup menjadi salah satu agenda utama.

Hal itu didasarkan pada satu alasan bahwa persoalan lingkungan, terutama yang berkaitan dengan hak untuk memperoleh lingkungan hidup yang sehat (*the right to healthy enviroment*), merupakan salah satu hak asasi manusia (HAM) yang diatur dalam deklarasi hak-hak asasi manusia (*Universal Declaration of Human Right*) tahun 1948, dan kemudian ditegaskan dalam deklarasi Stockholm (*United Nation Conference on The Environment*) tahun 1972 serta ditegaskan pula dalam *The United Nation Conference on Environment and Development* di Rio de Janeiro tahun 1992.

Dalam skala nasional, secara yuridis persoalan kejahatan lingkungan dikategorikan sebagai tindak pidana administratif (*administrative penal law*) atau tindak pidana yang mengganggu kesejahteraan masyarakat (*public welfare offence*). Tindak pidana tersebut telah diatur

dalam Undang-undang Lingkungan Hidup sebagaimana telah diatur dalam UU No. 4 Tahun 1982 yang kemudian diubah dengan UU No.23 Tahun 1997.

Asas-asas tindak pidana lingkungan hidup<sup>32</sup> meliputi :

1. Asas legalitas (*Principle Legality*).

Dalam asas tersebut terkandung kapasitas hukum dan kejelasan serta ketajaman dalam merumuskan peraturan hukum pidana, khususnya sepanjang berkaitan dengan *definition of crime againts the environment* dan sanksi yang perlu dijatuhkan agar si pelaku menaati normanya. Hal ini terkait dengan akurasi proses kriminalisasi dengan segala persyaratannya. Syarat-syarat tersebut antara lain adalah adanya korban/kerugian yang jelas dan sifat *enforceable* dari perumusan tersebut.

2. Asas pembangunan berkelanjutan (*the Principle of Sustainable Development*)

Asas tersebut menegaskan bahwa pembangunan ekonomi jangan sampai mengorbankan hak generasi yang akan datang untuk menikmati lingkungan hidup yang sehat.

3. Asas pencegahan (*the Precautionary Principle*)

Asas tersebut menegaskan apabila terjadi kerusakan yang serius dan

---

<sup>32</sup> Muladi, Prinsip-Prinsip Dasar Hukum Pidana Lingkungan dalam Kaitannya dengan UU No.23 Tahun 1997, *Makalah & Seminar Fakultas Hukum UNDIP*, Semarang, tanggal 21 Pebruari 1998, hal 9-10.

*irreversible*, maka kurang sempurnaan kepastian ilmiah hendaknya jangan dijadikan alasan untuk menunda *cost effective measures* dalam rangka mencegah terjadinya degradasi lingkungan hidup.

#### 4. Asas Pengendalian (*the Principle of Restraint*)

Menyatakan bahwa sanksi pidana hendaknya baru dimanfaatkan apabila sanksi-sanksi perdata dan administrasi suatu sarana-sarana lain, ternyata tidak tepat dan tidak efektif untuk menangani tindak pidana lingkungan tertentu. Dalam hukum pidana dikenal asas *subsidiaritas* atau *ultima ratio principle* atau *asas ultimum remedium*.

Tuntutan hukum pidana, sebagaimana terjadi di Amerika Serikat, ditempatkan mata rantai terakhir dari suatu mata rantai yang panjang dalam penuntutan hukuman dengan tujuan untuk menghapuskan atau mengurangi akibat-akibat yang merugikan lingkungan hidup. Mata rantai penegakan hukum tersebut, meliputi :

1. Penentuan kebijakan, desain dan perencanaan, pernyataan dampak lingkungan ;
2. Penawaran tentang standar atau pedoman minimum prosedur perizinan ;
3. Keputusan administratif terhadap pelanggaran, penentuan tenggang waktu, dan yang terakhir agar peraturan ditaati ;
4. Gugatan perdata untuk mencegah atau menghambat pelanggaran, penelitian denda atau ganti rugi ;
5. Gugatan masyarakat untuk memaksa atau mendesak pemerintah

mengambil tindakan, gugatan ganti rugi ;

6. Tuntutan pidana <sup>33</sup>.

Tujuan hukum pidana yang hendak dicapai terhadap tindak pidana lingkungan hidup adalah pertama, untuk mendidik masyarakat sehubungan dengan kesalahan moral yang berkaitan dengan perilaku yang dilarang dan kedua, mencegah atau menghalangi pelaku potensial agar tidak melakukan perilaku yang tidak bertanggung jawab terhadap lingkungan hidup.

Hal yang harus dipertimbangkan pertama, mengganti sepenuhnya keuntungan ekonomis yang diperoleh si pelaku sebagai hasil tindak pidananya dan kedua, menggantikan sebagian atau seluruh biaya-biaya penyidikan dan perbaikan kembali pelbagai kerusakan atau kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan pelaku.

Atas dasar kecenderungan internasional, menurut Muladi<sup>34</sup> di samping pidana kemerdekaan (*imprisonment*), perlu diperhatikan jenis-jenis sanksi finansial, seperti denda, sanksi bisnis (penutupan perusahaan) dan *sanksi reparatif* seperti kompensasi terhadap korban dan perbaikan yang harus dilakukan atas kerusakan. Hal ini didasarkan atas pengalaman bahwa tindak pidana lingkungan biasanya dilakukan atas dasar alasan-alasan ekonomis dan dalam kerangka aktivitas bisnis.

Penyelesaian masalah perusakan atau pencemaran lingkungan

---

<sup>33</sup> Siahaan dalam Harun M. Husein, *Lingkungan Hidup, Masalah, Pengelolaan, dan Penegakan hukumnya*, Bumi Aksara, Jakarta, 1992, hal 171

<sup>34</sup> Muladi, *Op. Cit.*, hal 16.

hidup melalui hukum pidana dapat dilakukan melalui beberapa tahap :

#### 1. Tahap Penyelidikan

Tahap penyelidikan meliputi kegiatan mengumpulkan bahan keterangan atau fakta dan data. Apabila ada laporan atau pengaduan dan masyarakat telah terjadi pencemaran atau kerusakan lingkungan, maka hasil penyelidikan akan diteruskan kepada pejabat yang berwenang melakukan penyidikan.

#### 2. Penyidikan

Hasil penyelidikan apabila terdapat sangkaan telah terjadi perbuatan pidana, maka akan diteruskan kepada penyidik untuk dipertimbangkan bukti-bukti permulaan dan alasan hukum untuk dimulainya penyidikan. Penyidik akan meneliti :

- a. Apakah hasil penyelidikan perlu ditambah atau dianggap sudah cukup sebagai bukti permulaan ;
- b. Apakah tersangkanya sudah dapat dipastikan ;
- c. Apakah konstruksi hukumnya sudah jelas

Menurut Pasal 40 UU No. 23 Tahun 1997 pejabat penyidik berwenang untuk ;

- a. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang lingkungan hidup;
- b. Melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana di bidang lingkungan hidup ;
- c. Meminta keterangan atau bahan bukti dari orang-orang atau badan



hukum sehubungan dengan peristiwa tindak pidana di bidang lingkungan hidup ;

- d. Melakukan pemeriksaan atas pembuktian, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang lingkungan hidup;
- e. Melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, catatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang lingkungan hidup;
- f. Meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang lingkungan hidup.

Langkah berikutnya akan dibuat rencana penyidikan, laporan kejahatan, surat perintah penyidikan dan kemudian akan diserahkan kepada kejaksaan selaku instansi penuntut umum. Berkas hasil penyidikan untuk dapat disampaikan kepada pengadilan harus memenuhi syarat formal dan material. Syarat formal berkaitan dengan harus dipenuhinya syarat prosedural menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), sedang syarat material berkaitan dengan kelengkapan data hasil penyidikan yang akan dijadikan bahan argumentasi untuk membuktikan di pengadilan.

Syarat formal berkaitan dengan syarat prosedural sebagaimana diatur dalam KUHP. Dalam kaitan ini, hal ini yang perlu diperhatikan adalah:

- (1) Semua kegiatan penyidikan harus disertai dengan surat perintah/izin/persetujuan dan pejabat yang berwenang.
- (2) Apa yang dilakukan dalam proses penyidikan harus memperhatikan tindakan dalam batas-batas yang sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Semua kegiatan dalam rangka penyidikan harus dituangkan dalam berita acara.
- (4) Semua keterangan, barang bukti, barang sitaan harus diperoleh dengan cara yang sah.

### 3. Pengadilan dan Pemidanaan

Untuk dapat membuktikan kesalahan di sidang pengadilan dalam perkara kerusakan atau pencemaran lingkungan hidup. Di samping dibutuhkan adanya kelengkapan data, alat bukti, kecermatan, dan ketrampilan jaksa, juga sangat menentukan adalah peranan saksi ahli yang telah disiapkan penyidik sebagai mitra jaksa. Untuk itu harus ada kerja sama yang kompak di antara keduanya. Hal ini harus benar-benar dijaga kondisinya sehingga di persidangan majelis hakim akan benar-benar yakin bahwa apa yang didakwakan jaksa penuntut umum terbukti secara sah.

Dalam tindak pidana lingkungan, hukum pembuktian yang digunakan adalah sama dengan hukum pembuktian tindak pidana lainnya, karena tidak terdapat ketentuan khusus mengenai hukum pembuktian tindak pidana lingkungan. Karena itu, hukum pembuktian yang

menggunakan ketentuan-ketentuan pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 183 – 189 KUHP.<sup>35</sup>

Pembuktian tindak pidana lingkungan mempergunakan kiat pembuktian bercorak khas, yaitu sesuai dengan teknik pendekatan masalah lingkungan yang bersifat komprehensif dan integral. Karena itu, pembuktian tindak pidana lingkungan membutuhkan kemampuan untuk menerjemahkan fakta-fakta menurut ilmu pengetahuan (*Science evidence*) menjadi fakta-fakta hukum (*Legal evidence*).

Menurut ilmu pengetahuan (*Science evidence*), bersumber pada keterangan ahli dari berbagai disiplin ilmu terkait dan analisis laboratorium. Apabila *Science evidence* tidak ditransformasikan ke dalam *Legal evidence*, maka fakta-fakta tersebut akan sulit dipahami, dimengerti, dan diyakini, terutama oleh mereka yang awam terhadap masalah lingkungan. Karena itu, pembuktian tindak pidana lingkungan didominasi oleh keterangan ahli dan hasil analisis laboratorium yang kemudian harus didukung pula oleh alat-alat bukti lainnya.

Sistem pembuktian menurut KUHP menganut sistem pembuktian negatif *wettelijk*. Sistem pembuktian tersebut berdasarkan pada tersedianya minimal dua alat bukti yang sah dan keyakinan hakim, menjadi faktor sentral dalam menentukan apakah perbuatan dan kesalahan yang bersangkutan/didakwa terbukti atau tidak. Sistem pembuktian negatif *wettelijk* tersebut dapat dilihat dalam Pasal 183

---

<sup>35</sup> Harun M.Husein, *Op. Cit.*, hal 181.

KUHAP yang menyebutkan "hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya".

Secara normatif menurut ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP,<sup>36</sup> alat bukti yang dianggap sah terdiri dari :

1. Keterangan saksi

Saksi adalah orang yang memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara yang ia dengar, lihat dan alami sendiri. Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar, lihat dan alami sendiri.

Cara penggunaan dan penilaian saksi diatur dalam Pasal 185 KUHAP, berisi :

1. Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah yang saksi menyatakan di sidang pengadilan ;
2. Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya ;

---

<sup>36</sup> *Ibid.*, hal 182-198.

3. Ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah yang lainnya;
4. Keterangan beberapa saksi yang berdiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu tidak ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu;
5. Baik pendapat maupun rekan yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, bukan merupakan keterangan saksi ;
6. Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan hal sebagai berikut :
  - a. Persesuaian antara keterangan saksi antara yang satu dengan yang lainnya;
  - b. Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti yang lain;
  - c. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberikan keterangan tertentu;
  - d. Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.
7. Keterangan saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lainnya, tidak merupakan alat bukti, namun apabila

keterangan itu sesuai dengan keterangan saksi yang disumpah, dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti yang sah yang lain.

Semua syarat bagi keterangan saksi tersebut sekalipun telah terpenuhi, tidak secara otomatis dapat mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat hakim. Dalam hal ini untuk menyatakan terbuktinya sesuatu, masih diperlukan unsur lain di luar alat bukti yang sah tersebut, yakni keyaninan hakim. Di sinilah letak perbedaan pokok antara sistem pembuktian negatif *wettelijk* dengan positif *wettelijk*. Dalam sistem pembuktian positif *wettelijk* apabila kuantitas dan kualitas alat bukti yang ditetapkan undang-undang terpenuhi, maka hakim harus menyatakan sesuatu itu terbukti, meskipun ia tidak yakin akan hal itu.

## 2. Keterangan ahli

Keterangan ahli menurut Pasal 1 butir (28) KUHAP adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang suatu hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Pasal 186 KUHAP menyebutkan keterangan ahli adalah apa yang oleh seseorang ahli dinyatakan di sidang pengadilan. Jadi, untuk sahnya keterangan ahli sebagai alat bukti, keterangan tersebut harus dinyatakan dalam sidang pengadilan. Namun demikian, seorang ahli dapat pula memberikan di luar pemeriksaan sidang, seperti pemeriksaan tahap penyidikan (*visum et revertum*). Keterangan tersebut dinamakan keterangan tertulis yang dalam

pemeriksaan cukup hanya dibacakan saja. Ahli yang bersangkutan tidak mesti harus hadir di persidangan, kecuali apabila dipandang perlu.

Dalam memilih saksi ahli harus dilihat kriteria, yakni: *Pertama*, mempunyai pengalaman dan kecakapan akademik, *kedua*, ahli di bidangnya, *ketiga*, bersikap obyektif, *keempat*, mempunyai kemampuan untuk menyampaikan pikiran dengan menggunakan peristiwa yang sederhana, dan *kelima*, berpengalaman dalam persidangan di pengadilan.

Seorang saksi ahli yang ditunjuk harus terlibat aktif baik sebelum persidangan maupun pada waktu persidangan. Fungsi seorang saksi ahli sebelum persidangan antara lain, *Pertama*, memberi tahu atau mengajari penyidik dan jaksa mengenai hal ikhwal, sejarah industri yang bersangkutan, sifat fisika, dan kimia bahan pencemar, prosedur pengambilan sampel, prosedur analisis yang digunakan sumber-sumber pencemar pada lokasi yang bersangkutan, dan keefektifan teknologi, *kedua*, melakukan pengkajian terhadap bukti yang telah dikumpulkan oleh penyidik dan merekomendasi hal-hal yang dapat lebih memperkuat atau menetapkan ajakan apakah tambahan kesaksian ahli diperlukan atau tidak, dan *ketiga*, memberikan bantuan kepada jaksa dalam menyiapkan kesaksian langsung guna menjamin bahwa pendapat semua saksi ahli didasarkan pada fakta yang akan diuji di muka pengadilan sebelum saksi ahli memberikan kesaksiannya.

Pada proses peradilan, seorang saksi ahli dapat berfungsi ganda, baik sebagai penasihat maupun sebagai saksi ahli. Sebagai seorang

penasehat, seorang saksi ahli harus setiap saat siap membantu jaksa melalui pemberian nasehat dalam masalah teknis, terutama pada waktu saksi ahli diajukan oleh pembela sedang diperiksa oleh tim pembela atau pada waktu jaksa sedang melakukan pemeriksaan silang. Sebagai seorang penasehat, seorang saksi ahli dapat membantu jaksa dalam pengujian terhadap barang bukti pada setiap hari akhir kerja dan mendiskusikan cara-cara bagaimana yang dapat dilakukan untuk memperkuat aspek-aspek yang lemah serta memberikan penekanan kepada aspek-aspek yang kuat.

### 3. Surat

Surat-surat agar dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah, maka harus memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan Pasal 187 KUHAP, yakni dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, yakni :

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat, atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu.
- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukan bagi pembuktian sesuatu hal atas suatu keadaan.



- c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai suatu hal atau suatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya.
- d. Surat lain yang dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

#### 4. Petunjuk

Petunjuk dapat dijadikan sebagai alat bukti. Pasal 188 KUHAP disebutkan bahwa sumber-sumber petunjuk dan sistem penilaiannya adalah :

- a. Petunjuk berupa perbuatan, kejadian dan keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lainnya, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi tindak pidana dan siapa pelakunya;
- b. Petunjuk tersebut hanya bisa diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa;
- c. Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif dan bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya.

#### 5. Keterangan terdakwa

Menurut Pasal 189 KUHAP, keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.

Di persidangan, terdakwa atau penasehat hukumnya dapat mengajukan alat bukti atau alasan untuk melemahkan atau mematahkan argumentasi yang dikemukakan Jaksa Penuntut Umum. Apabila dipersidangan majelis hakim sampai pada kesimpulan bahwa berdasarkan bukti-bukti yang ada dan pemeriksaan terdakwa telah terbukti sah dan meyakinkan telah melakukan sebagian atau seluruhnya perbuatan pidana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum, maka majelis hakim setelah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan akan menjatuhkan sanksi pidana pada terdakwa.

Beberapa hal lain yang sering dijadikan pertimbangan, antara lain :

1. Sikap terdakwa
2. Mengaku terus terang atau berbelit-belit dalam memberikan keterangan.
3. Belum pernah atau sudah pernah dihukum.
4. Usia terdakwa, seperti usia masih muda.
5. Akibat perbuatannya dapat meresahkan dan merugikan masyarakat banyak.

Dalam kasus sengketa lingkungan, menurut Hamrat Hamid<sup>37</sup> perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Motif atau alasan terdakwa.
2. Kesungguhan terdakwa dalam melakukan pencegahan tercemar atau rusaknya lingkungan hidup.

---

<sup>37</sup> Hamrat Hamid, *Op. Cit.*, hal 17.

3. Besar kecilnya bencana atau bahaya terhadap jiwa atau kesehatan manusia.
4. Besar-kecilnya perhatian, kepedulian dan bantuan perusahaan tersebut pada masyarakat sekitar, terutama masyarakat ekonomi lemah.
5. Ada tidaknya peringatan atau teguran dari aparat atau instansi pemerintah yang berwenang.

Ketentuan pidana dalam UU No. 4 Tahun 1982 diatur dalam Pasal 22 ayat (1) dan (2) sedang dalam UU No. 23 Tahun 1997 diatur dalam Pasal 41-44. Ketentuan pidana yang diatur dalam UU No. 23 Tahun 1997 meliputi :

1. Perbuatan dilakukan secara sengaja mengakibatkan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan diancam dengan hukuman pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00. Jika tindak pidana mengakibatkan orang mati atau luka berat, pelaku dapat diancam pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp. 750.000.000,00. (Pasal 41).
2. Perbuatan karena kealpaan mengakibatkan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup, diancam pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00; jika tindak pidana tersebut mengakibatkan orang mati atau luka berat, maka

pelaku dapat diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp.150.000.000,00 (Pasal 42).

3. Perbuatan dengan sengaja melepas atau membuang zat, energi, dan atau komponen lain yang berbahaya atau beracun masuk di atas atau ke dalam tanah, udara, air permukaan, melakukan import, ekspor, memperdagangkan, mengangkut, menyimpan bahan tersebut, menjalankan instalansi yang berbahaya. Padahal mengetahui atau sangat beralasan untuk menduga bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup atau membahayakan kesehatan umum atau nyawa orang lain, diancam pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00; ancaman hukuman tersebut dapat juga dikenakan terhadap perbuatan dengan sengaja memberikan informasi palsu atau menghilangkan atau menyembunyikan atau merusak informasi yang diperlukan dalam kaitannya pertumbuhan pelanggaran di atas. Padahal yang bersangkutan mengetahui atau beralasan untuk menduga bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan pencemaran dan atau pencemaran lingkungan hidup atau membahayakan kesehatan umum atau nyawa orang lain. Jika tindak pidana tersebut diatas mengakibatkan orang mati atau luka berat, pelakunya akan diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun dan denda paling banyak Rp.450.000.000,00 (Pasal 43).

4. Perbuatan karena kealpaan melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 di atas diancam dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak Rp.100.000.000,00. Jika perbuatan tersebut mengakibatkan orang mati atau luka berat, maka pelaku pidana dapat diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun denda paling banyak Rp.150.000.000,00. (Pasal 44).
5. Jika tindak pidana tersebut dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain diancam dengan pidana denda diperberat dengan sepertiga (Pasal 45). Tuntutan pidana juga dapat dikenakan terhadap mereka yang memberikan perintah atau bertindak sebagai pimpinan tanpa mengingat apakah orang-orang tersebut, baik berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain, melakukan tindak pidana secara sendiri atau bersama-sama (Pasal 46).
6. Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam KUHAP dan undang-undang lain, terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 dapat pula dikenakan tindakan tata tertib (Pasal 47) berupa :
  - a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana.
  - b. Penutupan seluruhnya atau sebagian perusahaan.
  - c. Perbaikan akibat tindak pidana.
  - d. Mewajibkan mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak.

- e. Meniadakan apa yang dilalaikan tanpa hak.
- f. Menempatkan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 tahun.

Dari isi ketentuan Pasal-pasal tersebut menggambarkan begitu berat sanksi pidana terhadap perbuatan perusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 48, disebutkan bahwa segala bentuk perbuatan tersebut di atas baik dilakukan dengan sengaja atau karena kealpaan dikategorikan sebagai perbuatan kejahatan.

Sekalipun undang-undang lingkungan, baik itu undang-undang yang lama maupun undang-undang yang baru telah mencantumkan ketentuan pidana yang begitu berat. Namun, ketentuan tersebut belum menjamin para perusak atau pencemar lingkungan ketakutan atau pelakunya dapat dijerat dengan hukuman yang setimpal. Karena terbukti dalam berbagai persidangan sengketa lingkungan hidup di pengadilan seperti, kasus persidangan lingkungan yang dilakukan PT. Sido Makmur di PN Sidoarjo dan PT Indorayon utama di PN Jakarta Pusat tahun 1989 ataupun persidangan kasus pembakaran hutan PN Riau tahun 1998, para pihak yang terdakwa melakukan perbuatan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup dapat lolos begitu saja.

Dari persidangan kasus tersebut dapat dilihat bahwa jaksa penuntut umum dan majelis hakim yang mengadili dibuat bingung oleh kemampuan penasehat hukum terdakwa dalam mengajukan bukti limbah

sebagai sampel pembuktian yang tidak melewati ambang batas. Hal ini terjadi disebabkan Jaksa Penuntut Umum dan Hakim sama-sama belum memahami liku-liku perkara yang berkaitan tindak pencemaran atau perusakan lingkungan hidup jaksa penuntut umum tidak mampu membantah fakta yang diajukan pihak terdakwa dan majelis hakim tidak berupaya untuk menguji keadaan yang meragukan secara lebih mendalam.

Tidak berfungsinya ketentuan sanksi hukuman Undang-undang Lingkungan Hidup dalam menangani sengketa lingkungan yang diakibatkan pencemaran atau perusakan lingkungan telah menimbulkan silang pendapat oleh berbagai pihak. Menurut Hamzah, ketentuan pidana terhadap sanksi lingkungan harus diubah dari ketentuan yang sifatnya *ultimatum remidium* yang menganggap bahwa pelanggaran hukum lingkungan belum merupakan persoalan yang serius menjadi *premium remidium*<sup>38</sup> yang menjadikan sanksi pidana sebagai instrumen yang diutamakan dalam menangani tindak perbuatan pencemaran atau perusakan lingkungan. Pilihan pada hukuman pidana, jika kerusakan tidak dapat diperbaiki atau dipulihkan, misalnya penebangan pohon, pembunuhan terhadap burung, atau binatang yang dilindungi atau termasuk *irreparability*. Perbaikan atau pemulihan termasuk tidak dapat dilakukan secara fisik.

---

<sup>38</sup> Hamzah., *Op. Cit.*, 1995, hal 82.

Demikian juga menurut Loeby Loeqman yang berpendapat sama nampaknya tidak terakomodasi dalam UU No 23 Tahun 1997, dimana undang-undang tersebut masih menjadikan ketentuan sanksi pidana sebagai *ultimatum remidium*. Hal ini ditegaskan lebih lanjut oleh Muladi yang mengatakan bahwa suatu saat sekarang ketentuan pidana dijadikan sebagai instrumen *premium remidium* masih belum perlu, karena sanksi lain seperti administrasi dan perdata masih bias didayagunakan. Hal tersebut sesuai dengan asas peradilan (*principle of restraint*), yang merupakan salah satu syarat kriminalisasi, hendaknya sanksi pidana baru dimanfaatkan apabila sanksi administrasi dan perdata ternyata tidak tepat dan tidak efektif untuk menangani tindak pidana lingkungan.<sup>39</sup>

Lebih lanjut dikatakan bahwa tindak pidana lingkungan dikategorikan sebagai *administrative penal law* atau *public welfare offenses*, yang memberikan kesan ringannya perbuatan tersebut. Dalam hal ini, fungsi hukum pidana bersifat menunjang sanksi-sanksi administrasi. Dengan demikian keberadaan tindak pidana lingkungan sepenuhnya tergantung pada hukum lain.

Kondisi semacam itu wajar, namun mengingat betapa penting lingkungan hidup yang sehat dan baik dan kedudukannya sebagai tindak pidana ekonomi serta kompleksitas kepentingan yang dilindungi tersebut di atas, baik yang bersifat *antroposentris* maupun *ekosentris*, maka ketentuan khusus perlu dilengkapi tindak pidana lingkungan yang bersifat

---

<sup>39</sup> Muladi, *Op. Cit.*, 1998, hal 10.



umum dan mandiri terlepas dari hukum yang lain, yang dinamakan *generic crime* atau *core crime*.

Dalam perumusan tindak pidana lingkungan, hendaknya selalu diingat bahwa kerugian dan kerusakan lingkungan hidup tidak hanya bersifat nyata (*actual harm*), tetapi juga bersifat ancaman kerusakan potensial, baik terhadap lingkungan hidup maupun kesehatan umum. Hal ini disebabkan karena kerusakan tersebut sering kali tidak seketika timbul dan tidak dengan mudah pula untuk dikuantifikasi. Sehubungan dengan itu untuk *generic crime* yang bersifat berat, sebaiknya memang dirumuskan sebagai tindak pidana materiil, dalam hal ini akibatnya merupakan hakiki yang harus dibuktikan. Namun, untuk tindak pidana yang bersifat khusus (*specific crimes*) yang melekat pada hukum administratif dan relatif lebih ringan, maka perumusan bersifat formal, tanpa menunggu pembuktian akibat yang terjadi dapat dilakukan. Sikap batin yang menjadi elemen tindak pidana tersebut dapat mencakup perbuatan sengaja (*dolus knowingly*), sengaja dengan kemungkinan (*dolus eventualis, recklessness*) dan kealpaan (*culpa, negligence*).

Dalam merumuskan tindak pidana lingkungan, hendaknya selalu dipertimbangkan adanya dua macam elemen, yakni elemen material (*materiel element*) dan elemen mental (*mental element*). Elemen material mencakup pertama adanya perbuatan atau tindak perbuatan sesuatu (*omission*) yang menyebabkan terjadinya tindak pidana, kedua, perbuatan

atau tidak berbuat yang melanggar atau bertentangan dengan standar lingkungan yang ada.

Elemen mental mencakup pengertian bahwa berbuat atau tidak berbuat tersebut dilakukan dengan sengaja, *recklessness (dolus eventualis atau culpa gravis)* atau kealpaan (*negligence*). Pembagian ini biasa dikenal dalam sistem hukum *Anglo Saxon*, sedang hukum Indonesia banyak dipengaruhi sistem hukum *kontinental*, membedakan kategori-kategori kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*Culpa*).

Dilihat dari kecenderungan perkembangan internasional, maka perumusan di atas perlu disempurnakan, karena masih kelihatan bahwa lingkungan hidup sebagai kepentingan hukum masih belum memperoleh perlindungan secara *eksplisit*. Kesehatan umum dan nyawa manusia jauh lebih sempit apabila dibandingkan dengan pengertian lingkungan hidup yang lebih luas.

Dengan melihat kecenderungan-kecenderungan internasional dan peraturan-peraturan yang bersifat domestik dan karena sifat tindak pidana lingkungan masuk dalam kategori *internasional crime*, maka jauh-jauh hari hendaknya sudah mulai dipikirkan kemungkinan terjadinya *environmental trans- border crime* dan *ekstra-territorial crimes*. Dalam hal ini persoalan-persoalan *ekstradisi* dan kerjasama internasional dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan menjadi sangat relevan.<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup> Muladi, *Ibid.*, hal 20-22.

Karena terhadap tindak pidana lingkungan, perlu dipikirkan pertanggungjawaban perusahaan (*Korporasi*), yang perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Korporasi baik mencakup badan hukum (*legal entity*) maupun non badan hukum, seperti organisasi dan sebagainya;
- b. Korporasi dapat bersifat privat (*private juridical entity*) dapat pula bersifat publik (*public entity*);
- c. Apabila diidentifikasi bahwa tindak pidana lingkungan dilakukan dalam bentuk organisasional, maka seorang alamiah (*manager, agents, employes*) dan korporasi dapat dipidana baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama (*by punishment provition*);
- d. Terdapat kesalahan manajemen dalam korporasi dan terjadi apa yang dinamakan *breach of a statutory or regulatory provision*;
- e. Pertanggungjawaban badan hukum dilakukan terlepas dari apakah orang-orang yang bertanggung jawab di dalam badan hukum tersebut berhasil diidentifikasi, dituntut dan di pidana;
- f. Segala sanksi pidana dan tindakan pada dasarnya dapat dikenakan pada korporasi, kecuali pidana mati dan pidana penjara. Hal yang dinamakan *corporate death pinalty* dan

*corporate imprisonment* yang mengandung pengertian larangan suatu *korporasi* untuk berusaha di bidang-bidang usaha tertentu dan pembatasan-pembatasan lain terhadap langkah-langkah *korporasi* dalam berusaha;

- g. Penerapan sanksi pidana terhadap *korporasi* tidak menghapus kesalahan perorangan;
- h. Pemidanaan terhadap *korporasi* hendaknya memperhatikan kedudukan *korporasi* untuk mengendalikan perusahaan, melalui kebijakan pengurus atau para pengurus (*corporate executive officers*) yang memiliki kekuasaan untuk memutuskan (*power of officers*) yang memiliki kekuasaan untuk memutuskan (*power of decision*) dan keputusan tersebut telah diterima oleh *korporasi* tersebut.

Melihat beragamnya sanksi terhadap pencemaran atau perusakan lingkungan hidup, maka menurut De Bunt,<sup>41</sup> perlu dikemukakan rambu-rambu dalam memilih penerapan sanksi hukum. Kriteria yang dipakai adalah :

1. Kriteria *normatif*, berdasarkan atas pandangan bahwa hukum pidana hanya diterapkan terhadap pelanggaran yang mempunyai nilai etis negatif yang sangat tinggi (*high ethical negative value*). Pelanggaran dipandang sebagai sangat tercela secara sosial (*socially most reprehensible*). Beberapa

---

<sup>41</sup> De Bunt dalam Hamzah, *Op.Cit.*, hal 83-84.

rambu yang tergolong sangat tercela secara sosial, seperti *residivisme* (pengulangan pelanggaran), bobot delik cukup berat, kerusakan lingkungan cukup serius dan sebagainya.

2. Kriteria *instrumental* bersifat pragmatis, seperti penjeratan tersangka menjadi tujuan, maka hukum pidana yang sebaiknya diterapkan. Jika yang menjadi tujuan adalah pemulihan keadaan atau perbaikan kerusakan, maka instrumen administrasi yang enggan bertindak atau bahkan terlibat dalam pelanggaran, maka instrumen hukum pidana yang lebih baik untuk diterapkan. Jika polisi atau jaksa yang enggan bertindak, maka instrumen hukum administrasi yang diterapkan.
3. Kriteria *oportunistik* termasuk jika penerapan administratif tidak dapat berjalan, misalnya, tidak dapat dilakukan paksaan administrasi atau uang paksa (*dwangsom*). Oleh karena pelaku telah pailit atau bangkrut, maka akan lebih baik diterapkan instrumen hukum pidana. Jika penegakan hukum lingkungan tidak menjadi prioritas Jaksa, maka baik untuk menerapkan instrumen hukum pidana.

Melihat tidak efektifnya ketentuan tanggung jawab mutlak yang dianut undang-undang lingkungan hidup, menurut beberapa pengamat hukum, persoalannya tidak semata-mata karena faktor aturan hukumnya, tetapi juga karena faktor manusia terutama yang berkaitan dengan

kemampuan aparat penegak hukum dalam memahami hakekat atas tanggung jawab mutlak dan kemampuan penafsiran aturan undang-undang lingkungan hidup.

Oleh karena itu, berkaitan dengan asas tanggung jawab mutlak, perlu dibarengi dengan pengadaan peraturan pelaksana sebagai petunjuk operasional yang bersifat praktis. Di samping itu, harus diimbangi kemampuan aparat penegak hukum yang profesional dan jujur serta tersedianya peralatan pembuktian, seperti laboratorium yang memadai dengan dilengkapi tenaga yang memadai dan mampu menjalankan tugasnya dengan baik, terutama pada waktu mengadakan pengujian atau tes sampel sebagai alat bukti yang diperlukan dalam persidangan.

## **B. Kendala Penegakan Hukum Lingkungan**

Berbagai kasus penyelesaian sengketa lingkungan dari pertama kali diundangkannya Undang-Undang Lingkungan Hidup hingga kini belum menunjukkan hasil yang menggembirakan. Beberapa faktor yang menjadi kendala penegakan hukum lingkungan di Indonesia menurut Koesnadi Hardjasoemantri adalah :<sup>42</sup>

1. Pemasyarakatan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkungan hidup kurang memadai selama ini masyarakat kurang mengetahui hak dan kewajibannya.

---

<sup>42</sup> Koesnadi Hardjasoemantri, "Penegakan Hukum dan Penyelesaian Sengketa dalam UU No.23 Tahun 1997", *Makalah Penataran Hukum Lingkungan*, Fakultas Hukum Unair, 6-13 Februari 1997, hal 1.

2. Aparat penegak hukum, yaitu meliputi, pertama, pejabat yang berwenang memberi izin, kedua, polisi, ketiga, jaksa, keempat, hakim, dan kelima, pengacara/konsultan hukum kurang tanggap terhadap perkembangan hukum lingkungan.
3. Beberapa ketentuan Undang-Undang Lingkungan Hidup, terutama yang berkaitan dengan penegakan hukum kurang ada penjabaran secara jelas.

Secara umum, penegakan hukum lingkungan menurut Harun M, Husein akan terkait dengan beberapa kendala, yakni : <sup>43</sup>

#### 1. Sarana Hukum

Peraturan hukum hasil manusia tidak mungkin akan dapat mencapai kesempurnaan, terlebih lagi yang kesempurnaan bersifat hakiki. Hal ini disebabkan karena kemampuan manusia dalam menciptakan produk hukum dibatasi oleh kemampuan yang bersifat manusiawi. Namun demikian, berdasarkan pengalaman sekali pun banyak peraturan hukum yang mengandung kelemahan atau kekurangan, tetapi dalam kenyataannya peraturan hukum tersebut dapat berhasil mendekati rasa keadilan.

Dalam hal ini perlu ditegaskan bahwa hukum itu hanya sebagai sarana belaka. Karena itu, kalau hukumnya baik maka tersedia sarana yang baik. Agar kebaikan dapat terlaksana secara nyata, maka sarana yang ada perlu diterapkan dan digunakan sebaik-baiknya. Dalam hal ini

---

<sup>43</sup> Harun M. Hussein, *Op Cit.*, hal 210-220.

terlaksananya kebaikan secara nyata tergantung dari kehendak dan perbuatan nyata manusia yang dapat ditunjang oleh hukum.

Menurut M. Danusastro (1985) hukum yang baik belum menjamin bahwa kebaikan akan sungguh-sungguh dapat terlaksana, tanpa manusia mau dan mampu melaksanakannya secara seksama. Oleh karena itu, di samping perlu disusun hukum yang baik, maka perlu pelaksanaannya secara nyata.

## 2. Aparat Penegak Hukum

Dalam hal ini akan terkait pada aspek kuantitas dan kualitas aparat penegak hukum. Kuantitas berkaitan dengan jumlah atau lengkap tidaknya aparat penegak hukum yang ada. Sedang kualitas berkaitan dengan kemampuan dan kemahiran (*profesionalisme*) aparat penegak hukum dalam menangani kasus-kasus lingkungan hidup. Kekurangan baik dari segi kuantitas maupun kualitas aparat penegak hukum akan sangat mempengaruhi efektivitas penegakan hukum lingkungan.

Aparat penegak hukum baik dalam arti *preventif* maupun *representatif* dalam menangani kasus pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup, di samping jumlahnya amat terbatas, juga kemampuannya masih terbatas. Saat sekarang ini aparat pemerintah yang bertugas di berbagai instansi, seperti di berbagai departemen, Pemda dan Bapedal, kebanyakan baru dapat melaksanakan tugas-tugas yang bersifat *preventif*, seperti pemantauan, pembinaan, dan peringatan. Apabila terjadi



pelanggaran terhadap lingkungan hidup, mereka tidak melakukan tindakan hukum.

Kenyataan menunjukkan bahwa aparat penegak hukum, seperti penyidik, penuntut umum, dan hakim yang memahami peraturan atau ketentuan lingkungan hidup jumlahnya maupun kemampuan terbatas. Di samping itu juga harus disadari bahwa persoalan aturan lingkungan hidup aspeknya sangat luas dan bersifat kompleks yang akan berkaitan dengan berbagai disiplin ilmu (*multidisipliner*). Karena itu perlu mendidik tenaga-tenaga profesional aparat penegak hukum sehingga diharapkan mereka akan mampu menangani kasus-kasus lingkungan atas dasar wawasan yang *komprehensif dan integral*.

### 3. Fasilitas dan Sarana Lingkungan

Fasilitas dan sarana lingkungan adalah alat untuk mencapai tujuan penegakan hukum lingkungan. Ketiadaan dan keterbatasan fasilitas dan sarana penunjang lainnya akan sangat mempengaruhi keberhasilan penegakan hukum lingkungan.

Fasilitas dan sarana dibutuhkan karena dalam menangani kasus-kasus lingkungan akan melibatkan berbagai perangkat teknologi canggih (peralatan laboratorium) yang untuk kepentingan operasionalnya memerlukan tenaga ahli dan biaya sangat mahal. Belum tersedianya beberapa laboratorium yang sangat memadai menyebabkan dalam pembuktian sampel yang diajukan kepada para pihak pada masing-masing laboratorium menunjukkan hasil yang berbeda-beda sehingga

kalau dipakai sebagai alat bukti di pengadilan sering kali membingungkan aparat penegak hukum, sehingga menimbulkan keragu-raguan hakim dalam menjatuhkan sanksi hukuman.

#### 4. Kesadaran Masyarakat Terhadap Lingkungan

Indikator kesadaran hukum masyarakat terletak pada kepatuhan kepada ketentuan hukum. Kepatuhan dan ketaatan pada ketentuan hukum lingkungan menunjukkan efektivitas berlakunya hukum lingkungan di tengah masyarakat. Menurut Otto Soemarwoto (1989) manusia berintegrasi secara terus-menerus dengan lingkungan hidupnya di mana dalam interaksinya itu, ia mengamati lingkungan dan mendapatkan pula pengalaman. Dari pengamatan dan pengalamannya, ia mempunyai gambaran tertentu tentang lingkungan hidupnya yang disebut sebagai citra lingkungan.

Bila citra seseorang bersifat negatif, dalam arti ia tidak memahami dan menghayati betapa pentingnya kelestarian lingkungan hidup bagi kelangsungan hidup dan kehidupan, maka ia cenderung bersifat masa bodoh terhadap lingkungan. Orang yang demikian bahkan tidak segan-segan melakukan perbuatan yang berdampak negatif terhadap lingkungannya, seperti memabat hutan, membuang limbah sesuka hatinya, menangkap ikan dengan bom atau racun, menggali batu atau pasir semau-maunya dan sebagainya.

Terbatasnya kesadaran hukum masyarakat terhadap lingkungan disebabkan pula karena keawaman masyarakat terhadap berbagai aspek

lingkungan. Dalam hal ini, citra dan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan dapat dibina dan ditingkatkan melalui usaha-usaha seperti penyuluhan, bimbingan keteladanan, dan keterlibatan masyarakat dalam menanggulangi masalah lingkungan. Untuk itu peningkatan-peningkatan kegiatan penegakan hukum yang berdimensi *edukatif dan persuasif* serta *preventif* perlu ditingkatkan dan digalakkan.

#### 5. Faktor Sosial, Politik dan Kultural

Faktor sosial, politik dan kultural akan amat menentukan berhasilnya pengelolaan lingkungan hidup dan penegakan hukum lingkungan. Berkaitan dengan faktor sosial, politik dan kultural, maka menurut Munadjat Danusastro (1980) penyebab masalah lingkungan dapat dikategorikan dalam 4 K atau *the four P*, yaitu *pertama*, kemiskinan (*poverty*), *kedua*, kependudukan (*population*), *ketiga*, kekotoran atau kerusakan (*pollution*) dan *keempat*, kebijakan (*policy*).

Berkaitan dengan itu, menurut Siahaan (1987) maka faktor yang amat berpengaruh adalah faktor kemiskinan dan ledakan penduduk. Kedua faktor tersebut menduduki ranking yang paling sentral yang selanjutnya menimbulkan komplikasi yang tidak sehat pada lingkungan hidup.

Faktor sosial budaya yang dapat memberikan pengaruh terhadap lingkungan hidup adalah faktor agama dan tradisi. Setiap agama mengajarkan kepada umatnya untuk memelihara dan mengelola alam dan seisinya secara bijaksana. Alam dan isinya titipan sang Pencipta kepada

manusia, karena itu harus dijaga dan dipelihara dengan sebaik-baiknya dan tidak boleh dirusak. Dengan demikian, orang yang menghayati agama akan selalu menjaga kelestarian dan keseimbangan dalam hubungannya dengan sesama manusia, hubungannya dengan alam dan lingkungannya dan hubungannya dengan Tuhan pencipta alam semesta.

Sementara itu menurut Hamrat Hamid, kendala dan masalah penegakan hukum lingkungan dapat dijumpai dalam berbagai tahapan, yakni :

#### 1. Tahap Penyelidikan dan Penyidikan

- a. Kesadaran dan wawasan lingkungan masyarakat maupun pejabat yang belum mempunyai kemampuan setarap yang dapat memahami hakekat, urgensi lingkungan yang bersih, sehat dengan daya dukung yang menjamin terlaksananya pembangunan yang berkelanjutan. Hal tersebut menyebabkan aparat penegak hukum kurang peka terhadap pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup.
- b. Kemampuan teknis aparat yang belum memadai dapat menimbulkan keragu-raguan dan kelambatan dalam bertindak.
- c. Kesulitan mendapatkan data yang akurat dan fakta yang relevan dengan pembuktian.
- d. Pandangan bahwa daya saing industri tidak boleh dilemahkan oleh bertambahnya biaya produksi karena harus membuat alat pengolah limbah.

- e. Sikap “*rikuh*” dan “*ewuh pekewuh*” yang masih melekat dalam budaya masyarakat Indonesia sehingga apabila hak-hak dilanggar, termasuk lingkungannya mereka diam saja, tidak mempermasalahkan atau mengugat ke pengadilan.
- f. Banyaknya peluang bagi pihak pengusaha untuk melakukan upaya penangkalan, atau mempersulit penelitian dan pemeriksaan.
- g. Prasarana dan sarana yang masih terbatas, termasuk juga teknis dan biaya serta kemampuan personil.
- h. Sering terjadi *intervensi* pihak ketiga yang dilakukan dengan menggunakan pengaruh dan kekuasaan.
- i. Kerahasiaan yang kurang terjamin.

## 2. Tahap Penuntutan

Beberapa hal yang menjadi kendala dalam tahap penuntutan antara lain :

- a. Perbedaan persepsi antara hakim dengan jaksa mengenai hukuman dan konstruksi hukumnya.
  - b. Kurangnya alat bukti yang kuat dan relevan.
  - c. Terbatasnya kemampuan teknologi laboratorium.
  - d. Langkanya sanksi ahli yang mempunyai kemampuan dan berpengalaman.
  - e. Kurangnya kemampuan hakim dan jaksa menguasai hukum lingkungan.
- Disamping itu, juga kurang menguasai pemahaman kasus dan kurang menguasai teknik dan taktik pembuktian di persidangan.

- f. Kurangnya koordinasi dan kerja sama antara penyidik, jaksa, dan saksi ahli sehingga kerja sama yang dilakukan tidak efisien dan efektif.

### **C. Hak, Kewajiban, dan Peran serta masyarakat<sup>44</sup>**

Bab III UUPH menetapkan mengenai hak, kewajiban dan wewenang yaitu hak dan kewajiban yang ada pada setiap orang serta kewajiban yang ada pada Pemerintah, demikian pula wewenang pengaturan yang ada pada Pemerintah serta hak masyarakat untuk berperan serta.

#### **a) Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat**

Pasal 5 ayat (1) UUPH berbunyi :

“Setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat”.

Pasal 5 ayat (1) UUPH dinyatakan “hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.” Sedangkan dalam Pasal 5 ayat (1) UUPH dipertegas menjadi “hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.”

Heinhard Steiger. menyatakan, bahwa apa yang dinamakan hak-hak subyektif (*subjective right*) adalah bentuk yang paling luas dari perlindungan seseorang.

Hak tersebut memberikan kepada yang mempunyainya suatu tuntutan yang sah guna meminta kepentingan akan suatu lingkungan

---

<sup>44</sup> Koesnadi Hardjosoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, edisi ketujuh Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2001, hal. 93-106

hidup yang baik dan sehat itu dihormati, suatu tuntutan yang dapat didukung oleh prosedur hukum, dengan perlindungan hukum oleh pengadilan dan perangkat-perangkat lainnya.

**b) Hak atas Informasi lingkungan hidup**

Dalam UUPH telah ditambah dengan satu syarat yang sangat penting, yaitu Pasal 5 ayat (2) UUPH yang berbunyi :

“Setiap orang mempunyai hak atas informasi lingkungan hidup yang berkaitan dengan peran dalam pengelolaan lingkungan hidup.”

Adapun penjelasan ayat (2) ini berbunyi sebagai berikut :

“Hak atas informasi lingkungan hidup merupakan suatu konsekuensi logis dari hak berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup yang berlandaskan pada asas keterbukaan. Hak atas informasi lingkungan hidup akan meningkatkan nilai dan efektivitas peran serta dalam pengelolaan lingkungan hidup, di samping akan membuka peluang bagi masyarakat untuk mengaktualisasikan haknya atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Informasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat ini dapat berupa data, keterangan, atau informasi lain yang berkenaan dengan pengelolaan lingkungan hidup yang menurut sifat dan tujuannya memang terbuka untuk diketahui masyarakat, seperti dokumen analisis mengenai dampak lingkungan hidup, baik pemantauan penataan maupun pemantauan perubahan kualitas lingkungan hidup, dan rencana tata ruang.”

Ketentuan dalam Pasal 5 (2) UUPH ini berkaitan dengan Pasal 6 ayat (2) UUPH yang berbunyi :

“Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban memberikan informasi yang benar dan akurat mengenai pengelolaan lingkungan hidup.”

Dalam hubungan dengan masalah informasi perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

**c) Hak dan kewajiban berperan serta**

Pasal 5 ayat (3) UUPH menyatakan :

“Setiap orang mempunyai hak untuk berperan dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Penjelasan ayat ini berbunyi :

“Peran sebagaimana dimaksud dalam pasal ini meliputi peran dalam proses pengambilan keputusan, baik dengan cara mengajukan keberatan maupun dengan pendapat atau dengan cara lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Peran tersebut dilakukan antara lain dalam proses penilaian analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau perumusan kebijakan lingkungan hidup. Pelaksanaannya didasarkan pada prinsip keterbukaan. Dengan keterbukaan dimungkinkan masyarakat ikut memikirkan dan memberikan pandangan serta pertimbangan dalam pengambilan keputusan di bidang pengelolaan lingkungan hidup.”

Ketentuan-ketentuan tersebut di atas menunjukkan kepada mutlak perlunya peran serta setiap orang sebagai anggota masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup, apabila diinginkan program-program di bidang pelestarian fungsi lingkungan berhasil dengan baik.

Apabila tindakan-tindakan perlindungan lingkungan hidup diambil untuk kepentingan masyarakat dan apabila masyarakat diharapkan untuk menerima dan patuh kepada tindakan-tindakan tersebut, maka



masyarakat harus diberi kesempatan untuk mengembangkan dan mengutarakan pendapatnya.

Lothar Gundling mengemukakan beberapa dasar bagi peran serta masyarakat ini sebagai berikut :

#### 1. Memberi informasi kepada pemerintah

Peran serta masyarakat terutama akan menambah pengetahuan khusus mengenai sesuatu masalah, baik yang diperoleh dari pengetahuan khusus masyarakat itu sendiri maupun dari para ahli yang dimintai pendapat oleh masyarakat.

Lebih lanjut peran serta masyarakat tersebut adalah penting dan tak dapat diabaikan dalam rangka memberi informasi kepada Pemerintah mengenai masalah-masalah dan konsekuensi yang timbul dari tindakan yang direncanakan Pemerintah. Dengan demikian Pemerintah dapat mengetahui adanya berbagai kepentingan yang dapat terkena tindakan tersebut dan perlu diperhatikan.

#### 2. Meningkatkan kesediaan masyarakat untuk menerima keputusan

Seorang warga masyarakat yang telah memperoleh kesempatan untuk berperan serta dalam proses pengambilan keputusan dan tidak dihadapkan pada suatu *fait accompli* akan cenderung untuk memperlihatkan kesediaan yang lebih besar guna menerima dan menyesuaikan diri dengan keputusan tersebut.

Pada pihak lain, dan ini adalah lebih penting, peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan akan dapat

banyak menguraikan kemungkinan timbulnya pertentangan, asal peran serta tersebut dilaksanakan pada saat yang tepat dan berhasil guna. Akan tetapi perlu dipahami, bahwa keputusan tidak pernah akan memuaskan semua kepentingan, semua golongan atau semua warga masyarakat, namun kesediaan masyarakat untuk menerima keputusan Pemerintah akan dapat ditingkatkan.

### 3. Membantu perlindungan hukum

Apabila sebuah keputusan akhir diambil dengan memperhatikan keberatan-keberatan yang diajukan oleh masyarakat selama proses pengambilan keputusan berlangsung, maka dalam banyak hal tidak akan ada keperluan untuk mengajukan perkara ke pengadilan.

Apabila sebuah perkara diajukan ke pengadilan, maka lazimnya perkara tersebut memusatkan diri pada suatu kegiatan tertentu. Dengan demikian tidak dibuka kesempatan untuk menyarankan dan mempertimbangkan alternatif-alternatif lainnya.

Sebaiknya, di dalam proses pengambilan keputusan, alternatif-alternatif dapat dan memang dibicarakan, setidaknya sampai suatu tingkatan tertentu.

Selain daripada itu ada beberapa bentuk tindakan administratif, seperti misalnya pemberian izin untuk kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan bahan pencemar (*pollutant*), di mana undang-undang dapat menanggukuhkan sanksi perdata dengan ketentuan dikaitkan pada tenggang waktu tertentu. Apabila sebuah keputusan dapat

mempunyai konsekuensi begitu jauh, maka sangatlah diharapkan, bahwa setiap orang yang akan terkena akibat keputusan itu perlu diberitahukan dan mempunyai kesempatan untuk mengajukan keberatan-keberatannya sebelum keputusan itu diambil.

#### 4. Mendemokratisasikan pengambilan keputusan

Dalam hubungan dengan peran serta masyarakat ini, ada pendapat yang menyatakan, bahwa dalam pemerintahan dengan sistem perwakilan, maka hak untuk melaksanakan kekuasaan ada pada wakil-wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat. Dengan demikian, tidak ada keharusan adanya bentuk-bentuk dari peran serta masyarakat karena wakil-wakil rakyat itu bertindak untuk kepentingan rakyat. Dikemukakan pula argumentasi, bahwa dalam sistem perwakilan, peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan administratif akan menimbulkan masalah keabsahan demokratis, karena warga masyarakat sebagai pribadi-pribadi, kelompok-kelompok atau organisasi-organisasi yang turut serta dalam proses pengambilan keputusan tidaklah dipilih atau diangkat secara demokratis.<sup>45</sup>

### D. Perkembangan Pelembagaan *Alternatif Dispute Resolution* (ADR)

#### Di Indonesia

##### 1. Pengertian

ADR adalah kependekan dari *Alternatif Dispute Resolution* yang merupakan suatu istilah asing yang perlu dicarikan padanannya dalam

---

<sup>45</sup> Ibid. hal. 106

bahasa Indonesia. Berbagai istilah dalam bahasa Indonesia telah diperkenalkan dalam berbagai forum oleh berbagai pihak seperti Pilihan Penyelesaian Sengketa (PPS), Mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa (MAPS) dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (PPSLP), dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa secara Kooperatif (MPSK). Sebelum kita mencari padanan istilah yang tepat dalam bahasa Indonesia, maka terlebih dahulu diperlukan penaymaan persepsi tentang konsep dan pemahaman ADR.

Alternatif Dispute Resolution (ADR) seringkali diartikan sebagai *alternative to litigation* namun seringkali juga diartikan sebagai *alternative to adjudication*. Pemilihan terhadap salah satu dari dua pengertian tersebut menimbulkan implikasi yang berbeda. Apabila pengertian pertama yang menjadi acuan (*alternative litigation*), maka seluruh mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan (*di luar litigasi*) termasuk *arbitrase* merupakan bagian dari ADR. Apabila ADR diartikan sebagai *alternative to adjudication*, maka mekanisme yang bersifat *non – adjudication* (mekanisme *di luar litigasi* dan *arbitrase*) merupakan bagian dari ADR. Pengertian ADR sebagai *alternative to adjudication* dapat meliputi mekanisme penyelesaian sengketa yang bersifat konsensual atau kooperatif seperti halnya mekanisme cangkok (*hybrid*) yang merupakan kombinasi dari berbagai elemen dalam *adjudicative* dan konsensual dalam bentuk baru, seperti halnya *med-arb*.

Namun apabila kita menyimak sejarah perkembangan ADR itu

sendiri di negara tempat pertama kali secara konseptual dikembangkan yaitu Amerika Serikat, pengembangan ADR dilatarbelakangi oleh kebutuhan sebagai berikut:<sup>45</sup>

1. Untuk mengurangi penumpukan perkara di pengadilan. (*court congestion*). Banyaknya kasus yang diajukan ke pengadilan menyebabkan proses pengadilan seringkali berkepanjangan serta memakan waktu. Proses seperti ini memakan biaya yang tinggi dan sering kali memberikan hasil yang kurang memuaskan.
2. Untuk meningkatkan keterlibatan dan otonomi masyarakat dalam proses penyelesaian sengketa.
3. Untuk memperluas akses kepada keadilan

(*access to justice*).

4. Untuk memberi kesempatan bagi tercapainya penyelesaian sengketa yang menghasilkan keputusan yang dapat diterima oleh dan memuaskan semua pihak (*high level of acceptance*).

Apabila melihat latar belakang pengembangan ADR Amerika Serikat seperti dijelaskan di atas, maka ADR yang dimaksud adalah ADR sebagai *alternative to adjudication*. Sebab pada dasarnya keluaran (*outcome*) *adjudication* baik pengadilan maupun *arbitrase* cenderung menghasilkan solusi *win-lose* dan bukan *win-win*, sehingga solusi yang

---

<sup>45</sup> Goldberg, Stephen B. et al., *Dispute Resolution* (Little : Brown and Company, 1985)

dapat diterima kedua belah pihak yang bersengketa (*mutually acceptable solution*) sangat kecil kemungkinannya tercapai.

Singapura cenderung menganut pengertian bahwa ADR merupakan *alternative* dari proses *adjudikatif* (mekanisme penyelesaian sengketa yang bersifat konsensual). Sedangkan dalam perkembangannya saat ini berbagai pihak di Amerika Serikat bahwa telah meninggalkan istilah ADR menjadi *Dispute Resolution* (DR) atau *Cooperative Conflict Management*. Salah satu alasannya dikarenakan istilah ADR memberi kesan bahwa pengembangan mekanisme penyelesaian sengketa secara konsensual hanya dapat dilakukan di luar pengadilan (*out court*), sedangkan kebutuhan saat ini pengembangan mekanisme penyelesaian sengketa secara konsensual juga diperlukan di dalam pengadilan (*court annexed* atau *court connected*). Alasan penggantian istilah dari ADR ke DR juga dilandasi oleh pertimbangan psikologis, pertimbangan untuk mendapatkan dukungan dari pihak pengadilan (*bukan sebaliknya againts pengadilan*). Istilah ADR memberikan kesan bahwa ADR merupakan jawaban atas kegagalan pengadilan dalam memberikan akses keadilan bagi masyarakat, sehingga permasalahan istilah ini mengundang rasa tidak aman (*insecurity*) dan kecemburuan dari insan pengadilan, sehingga istilah penggunaan istilah ADR dianggap tidak taktis bagi upaya pemasyarakatan dan pencarian dukungan dari berbagai kalangan.

Apabila kita mengikuti pengertian ADR sebagai *alternative to adjudication*, maka padanan istilah MAPS, PPS atau mekanisme

penyelesaian sengketa secara kooperatif (MPSK) merupakan 3 (tiga) istilah yang tepat untuk dipertimbangkan sebagai padanan istilah Indonesia. Apabila ADR diartikan sebagai *alternative to litigation*, mekanisme *arbitrase* dapat digolongkan/dimasukkan ke dalam kelompok ADR, sehingga MAPS dan PPS merupakan dua padanan istilah yang dapat dipertimbangkan, tidak termasuk MPSK.

## 2. Urgensi Pengembangan ADR Di Indonesia

Paling tidak terdapat 4 (empat) faktor utama yang memberikan dasar diperlukannya pengembangan ADR di Indonesia yaitu :

1. Sebagai upaya meningkatkan daya saing dalam mengundang Kepastian hukum termasuk ketersediaan sistem penyelesaian sengketa yang *efisien* dan *reliable* merupakan faktor penting bagi ekonomi agar mau menanamkan modelnya di Indonesia. ADR yang didasarkan pada prinsip kemandirian dan profesionalisme dapat menepis keraguan calon investor tentang keberadaan forum penyelesaian sengketa yang *reliable* (mampu menjamin rasa keadilan).

2. Tuntutan masyarakat terhadap mekanisme yang efisien dan lebih mampu memenuhi rasa keadilan.

3. Upaya untuk membangun meningkatnya daya kritis masyarakat yang dibarengi dengan tuntutan berperan serta aktif dalam proses pembangunan (termasuk pengambilan keputusan terhadap proses pembangunan) (termasuk pengambilan keputusan terhadap urusan-

urusan publik). Meningkatkan daya kritis masyarakat sejalan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan yang memberi akses pada masyarakat untuk berperan serta dalam penetapan kebijaksanaan seperti halnya dalam penetapan kebijakan tata ruang (UU No. 24 Tahun 1992 tentang Penetapan Ruang), peran serta dalam proses analisis mengenai dampak lingkungan (PP No 51 Tahun 1993 tentang AMDAL), dan hak hukum untuk berperan serta dalam proses pengambilan keputusan dalam UU tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU No 23 Tahun 1997). Hak masyarakat untuk berperan serta menimbulkan penyelesaian konflik untuk menyadari perbedaan pendapat (*conflict opinion*).

4. Menumbuhkan iklim persaingan yang sehat (*peer pressure*) bagi lembaga peradilan. Kehadiran lembaga-lembaga ADR dan kuasi mendorong proses seleksi oleh masyarakat terhadap lembaga-lembaga tersebut yang menggambarkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap mekanisme penyelesaian sengketa yang ada (*market selection*). Kehadiran pembeding (*peer*) dalam bentuk ADR ini diharapkan mendorong lembaga-lembaga penyelesaian sengketa tersebut untuk "berkompetisi" meningkatkan citra dan kepercayaan masyarakat kepadanya.



### 3. Perkembangan Pelembagaan ADR

Pengertian pelembagaan ADR di sini tidak terbatas ada pengertian adanya satu badan atau organisasi, namun lebih luas mencakup adanya perangkat-perangkat kelembagaan yang memungkinkan proses perundingan/*arbitrase* di Indonesia berkembang dan berkesinambungan. Unsur pelembagaan ini mencakup antara lain pengembangan peraturan perundang-undangan, pengembangan lembaga penyedia jasa (*service provider*) prosedur, pendayagunaan ADR, sumber daya manusia (penyedia jasa maupun *convenor* penyelenggara perundingan), sumber dana atau pembiayaan dan upaya-upaya pemasyarakatan (*sosialisasi*).

Dari berbagai upaya pelembagaan ADR seperti dijelaskan di atas maka pengembangan peraturan perundang-undangan (sebagai landasan penerapan ADR) telah mulai diupayakan di Indonesia. peraturan perundang-undangan di bidang perburuhan/ ketenagakerjaan dan lingkungan hidup merupakan 2 (dua) peraturan perundang-undangan yang memberikan perhatian yang besar bagi penerapan ADR (termasuk *arbitrase*). Di bidang ketenagakerjaan UU No. 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan memberikan porsi yang sangat besar bagi penerapan ADR melalui *arbitrase* (Pasal 56-65) dan pengawasan (*mediasi*) oleh pegawai perantara bagi pihak-pihak yang berselisih (Pasal 66-70).

Di bidang lingkungan hidup, Pasal 30-33 UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup memberikan landasan hukum

bagi penerapan mekanisme ADR dalam penyelesaian sengketa lingkungan. Pasal 30-33 pada dasarnya mengatur hal-hal sebagai berikut.

1. ADR merupakan pilihan (*optional*) dan bukan merupakan kewajiban (*mandatory*).

2. ADR tidak dapat diterapkan dalam kasus tindak pidana lingkungan.
3. Larangan untuk menempuh jalur penyelesaian pengadilan apabila ADR sedang diupayakan (jalur pengadilan dapat ditempuh apabila upaya ADR dinyatakan tidak berhasil).

4. Obyek penyelesaian sengketa yang diupayakan melalui ADR dapat mencakup ganti rugi dan atau tindakan *mitigasi* (mencegah agar tidak terulang kembali dampak negatif).

5. ADR dapat ditempuh melalui perundingan (*negosiasi*), perantaraan (*mediasi*) maupun perwasitan (*arbitrase*).
6. Prasyarat minimal *mediator* (penengah) yaitu sifat kemandirian dan ketidakberpihakan.

7. Pembentukan lembaga penyedia jasa, pelayanan penyelesaian sengketa yang dibentuk oleh pemerintah (untuk kepentingan publik) maupun swasta berlandaskan kepada prinsip ketidakberpihakan dan profesionalisme.

Sebagai tindak lanjut dari Pasal 33 UU No. 23 Tahun 1997, Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), mengusulkan kepada

pemerintah naskah RPP tentang Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup yang memuat substansi sebagai berikut<sup>47</sup>:

1. Dasar hukum pembentukan lembaga penyedia jasa pelayanan penyelesaian sengketa lingkungan di tingkat nasional dan provinsi (dibentuk pemerintah), dan lembaga penyedia jasa yang dibentuk oleh masyarakat (swasta).

2. Persyaratan mediator yang bersifat netral dan profesional.
3. Pengadaan kode etik profesi yang dibuat oleh Asosiasi Profesi.

4. Pembentukan Komisi yang diangkat Menteri yang tugasnya mengangkat dan mengawasi penyedia jasa di lembaga yang dibentuk pemerintah.

5. Otonomi para pihak yang bersengketa untuk menentukan penengah maupun wasit, dan kewenangan untuk memberhentikannya apabila penyedia jasa telah menunjukkan berperilaku kepada salah satu pihak (*partisanship*).

6. Aturan perundingan minimal yang harus ada, dan
7. Kekuatan penegakan (*enforceability*) dari kesepakatan.

Perkembangan penting lainnya di bidang pembelajaran ADR yaitu ditanjangani Nota Kesepakatan Kerjasama (MOU) di bidang pembelajaran ADR antara Menteri Kehakiman RI dengan *The Asian Foundation* pada tanggal 20 Agustus 1998. Nota Kesepakatan ini

---

<sup>47</sup> RPP ini telah disahkan oleh Pemerintah pada tanggal 17 Juli 2000 menjadi PP No. 54 Tahun 2000 tentang Lembaga Penyediaan Jasa Pelayanan Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan

merupakan komitmen kerjasama untuk mendukung program-program pembelajaran ADR yang dilaksanakan oleh Tim Pengarahan Nasional Pelembagaan ADR yang diketuai oleh Menteri Kehakiman RI. Program Pelembagaan ADR yang berlangsung sejak Agustus 1998 sampai dengan Maret 1999 meliputi penyusunan peraturan perundang-undangan serta mekanisme dan prosedur pendayagunaan ADR, pelatihan-pelatihan keterampilan, pemasyarakatan, penelitian dan pembentukan pusat-pusat pelayanan dan kajian ADR. Diharapkan melalui program-program yang dikembangkan oleh Tim Pengarah. Pada tahun 2000 Asosiasi Profesi sudah terbentuk, dan kelak dapat berfungsi (menggantikan Tim Pengarah) sebagai *focal point* bagi upaya-upaya pelembagaan ADR di Indonesia.

Di sektor penyediaan sumber daya manusia (mempersiapkan pelatihan, perundingan dan penengah yang trampil), ICFL bekerja sama dengan *CDR Associates –Boulder Colorado* pada bulan April 1998 yang lalu menyelenggarakan pelatihan untuk pelatihan / instruksi (*training for trainer*) dan dilanjutkan dengan pelatihan keterampilan penengahan (*mediasi*) oleh Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, dan Universitas Diponegoro di tahun 1998 dan awal 1999.

Gagasan *court annexed* juga telah banyak didiskusikan saat ini oleh kalangan Mahkamah Agung RI dan Departemen Kehakiman perlu ditindaklanjuti melalui pelaksanaan program *pelembagaan court annexed* ADR dengan tahap-tahapan : studi/ kajian tentang efektivitas Pasal 130 HIR (mengenai kewajiban hakim untuk mendamaikan pihak yang

bersengketa di awal proses gugatan), permasalahan, perencanaan model *court annexed* yang sesuai untuk Indonesia, dan membentuk proyek-proyek percontohan (*pilot project*) untuk kemudian dievaluasi efektifitasnya proyek percontohan dimaksud.

Pada akhirnya, seluruh kegiatan pelaksanaan ADR baik yang melalui koordinasi Tim Pengarah Nasional maupun kegiatan-kegiatan di luar Tim Pengarah diharapkan dapat mempertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut :

1. ADR yang dikembangkan harus memiliki kemampuan menjadi pilihan penyelesaian sengketa yang menarik bagi masyarakat. Ketersarikan perlu ditumbuhkan melalui pengembangan prosedurnya yang bersifat fleksibel, cepat dan murah, serta dapat terbebas dari korupsi dan kolusi.

2. ADR yang dikembangkan harus memiliki kemampuan sebagai wadah peran serta/ pelibatan masyarakat dalam proses penyelesaian sengketa dan wadah pendemokrasian pengambilan keputusan masyarakat melalui : (a) penentuan forum ADR yang tepat; (b) penentuan pihak ketiga yang bertindak sebagai penengah atau wasit; (c) penentuan aturan permainan; (d) penentuan hasil-hasil kesepakatan yang mampu mencerminkan *shared interest* di antara pihak-pihak yang bersengketa. Keseluruhan tahapan tersebut harus merupakan kewenangan para pihak untuk menentukannya.

3. ADR yang dikembangkan harus memiliki kemampuan untuk

mengakomodir sebagai kepentingan (*interest*) pihak-pihak yang bersengketa secara adil dan merata sehingga dapat melahirkan kesepakatan / hasil yang bersifat "menang-menang".

4. ADR yang dikembangkan diupayakan semaksimal mungkin merupakan refleksi dari akar budaya masyarakat Indonesia.

## E. Globalisasi dan Krisis Lingkungan

Globalisasi sudah menjadi kata kunci saat ini dalam pembahasan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Sekilas proses globalisasi tampak sebagai sesuatu yang akan membawa persatuan dunia karena adanya pertukaran informasi dan komunikasi antar bangsa yang lebih terbuka. Tetapi, dari kata globalisasi sendiri lebih berakar pada perdagangan daripada proses persatuan bumi. Misalnya beberapa kamus ternyata tidak memuat kata "globalisasi". Sebagai contoh, kamus Oxford hanya memuat kata globalisasi sebagai *covering or affecting the whole world*<sup>46</sup> dan tidak memuat arti kata globalisasi. Walaupun demikian, globalisasi dapat kita artikan sebagai proses yang meliputi atau mempengaruhi seluruh dunia.

Kata globalisasi justru ditemukan dalam *Dictionary of Macroeconomy* yang menyatakan *globalisation* sebagai *term describing the formation of global financial markets for stock and shares (deposits) and the global trade of money, currencies and loans*<sup>47</sup>. Jadi, jelas bahwa

---

<sup>46</sup> Oxford Advanced Learner's dictionary, Oxford University Press, tenth impression, 1994.  
<sup>47</sup> Gabler Volkswirtschaftslexikon, 3<sup>rd</sup> edition, Gabler Verlag, Wiesbaden 1990.

sebenarnya proses globalisasi lebih berkaitan dengan perdagangan dan bukan proses untuk mencapai kesatuan antar bangsa di dunia, seperti yang sering didengungkan. Dalam kenyataannya globalisasi tidak berjalan secara adil dan setara karena berakar pada pemikiran dan kemauan negara maju di belahan bumi utara. Karena itu, globalisasi dapat dikaitkan dengan baratisasi dimana paradigma barat dianggap sebagai global dan universal, sementara paradigma nonbarat dianggap sebagai lokal dan primitif. Secara gamblang globalisasi timbul dari niat negara-negara utara untuk membuka pasar negara-negara Selatan (Dunia ketiga) dan mendapat jatah penguasaan atas sumber daya alam yang kebanyakan berada di Selatan. Hal ini terutama dilakukan melalui perundingan dagang Putaran Uruguay di bawah persetujuan umum tentang tarif dan Perdagangan (GATT) yang melahirkan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

Selain perdagangan, isu globalisasi lain yang dilansir Utara meliputi pula persoalan lingkungan, hak asasi manusia dan demokratisasi. Lingkungan hidup sendiri sudah bersifat global dan universal, karena itu globalisasi masalah lingkungan memang seharusnya didorong. Namun, selama globalisasi identik dengan Baratisasi dan pasar bebas, pembahasan lingkungan hidup secara global tidak akan adil dan proposional, bahkan makin cenderung menambah persoalan.

## E. 1. Globalisasi Paradigma Monokultur

Persoalan utama dalam globalisasi adalah penyeragaman atau monokulturisme, yang terjadi akibat pertukaran yang tidak adil. Pertukaran yang tidak adil menyebabkan kebudayaan dan cara berpikir Barat menjadi lebih dominan. Hal ini bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari dimana modernisasi dan kemajuan dikaitkan dengan gaya hidup dan sistem pengetahuan Barat. Akibatnya sistem pengetahuan non-Barat tergeser dan hal ini punya pengaruh besar pada cara kita memahami dan mengelola alam atau lingkungan hidup.

Sejak sistem pengetahuan Barat dianggap dominan dan satu-satunya pengetahuan yang mampu menjelaskan berbagai aspek alam, timbulah paradigma monokulturisme yang menggeser beragam sistem pengetahuan lokal dan tradisional. Pengetahuan Barat yang dominan dianggap sebagai universal dan ilmiah. Sementara itu, pengetahuan lokal dianggap sebagai primitif, tidak ilmiah dan tidak dapat diterapkan secara global. Padahal awalnya, sistem pengetahuan dominan juga bersifat lokal serta tertanam dalam sebuah kultur dan kelas tertentu. Universalisasi pengetahuan monokultur ini adalah titik awal perusahaan di bumi, karena dalam sistem pengetahuan lokal atau tradisional inilah tertanam nilai-nilai pelestarian dan pemanfaatan sumber daya alam secara arif.<sup>48</sup>

Erosi sistem pengetahuan tradisional. akibat globalisasi monokulturisme mengarah pada erosi kebudayaan tradisional yang pada

---

<sup>48</sup> V. Shiva, *Monocultures of the mind*, Third World Network, Malaysia, 1993.



gilirannya mengarah pada erosi kekayaan hayati. Salah satu indikatornya adalah hilangnya bahasa. Para ahli bahasa meramalkan bahwa setengah dari 6000 bahasa di dunia akan hilang dalam waktu 75 sampai 100 tahun mendatang. Padahal bahasa memuat pengetahuan biologis dan ekologis tentang pemanfaatan dan pengelolaan tumbuhan, perilaku hewan dan hubungan-hubungan ekologis. Monokulturisme bahasa pada akhirnya menimbulkan erosi pengetahuan tentang pelestarian alam sehingga mengancam alam itu sendiri.<sup>49</sup>

Contoh lain yang bisa disimak adalah sektor kehutanan. Pengelolaan hutan secara ilmiah yang diperkenalkan pada zaman kolonial melihat hutan semata-mata sebagai sumber kayu. Ilmu pengetahuan Barat dalam bidang kehutanan sebenarnya menuju pada kerusakan ekosistem karena dasarnya adalah keseragaman seperti yang dituntut dalam *pengelolaan pabrik*. Tujuan silvikultur adalah memelihara tegakan spesies tunggal yang rata dan hanya untuk satu tujuan, sementara sifat ekosistem tropik adalah keberagaman. Ketika paradigma keseragaman ini diterapkan dalam pengelolaan, itulah awal kerusakan hutan tropik. Keseragaman, yang dituntut oleh sistem perdagangan global, bertentangan dengan proses-proses alam, merusak daya pulih ekosistem hutan dan bersifat tidak berkelanjutan secara ekologis.<sup>50</sup>

---

<sup>49</sup> Menuju Kepunahan Kereagaman Dunia dan Umat Manusia KONPHALINDO, Jakarta, 1993.  
<sup>50</sup> *Ibid*

Melalui kolonialisme, sistem pengelolaan yang monokultur ini

dijadikan universal dan global sehingga menggeser peran sistem pengelolaan tradisional yang polikultur di mana hutan dilihat sebagai suatu kesatuan yang memberikan pangan, papan, obat-obatan dan perlindungan lingkungan. Setelah kemerdekaan para cendekiawan dan pemerintah negara-negara selatan masih menganggap sistem pengetahuan Barat sebagai yang paling unggul sehingga monokulturisme dalam pengelolaan hutan tetap dijalankan. Maka, terjadilah krisis hutan tropik secara global.

Monokulturisme ini juga merebak ke sektor konservasi alam yang

betumpu pada pengetahuan Barat. Dalam paradigma Barat, manusia terpisah dari alam. Karena itu pelestarian alam berarti menyingkirkan kawasan-kawasan hutan tertentu untuk melindungi dari "rambahan" manusia. Maka, lahirilah konsep cagar alam, taman nasional dan suaka margasatwa dimana suatu kawasan alam dipisahkan dari masyarakat sekitarnya. Pada tahun 1970-an dan 1980-an, konsep pelestarian alam seperti ini amat populer dan gencar dilaksanakan dengan bantuan pihak asing. Gerakan lingkungan diidentifikasi dengan penetapan kawasan-kawasan lindung yang tidak mencakup masyarakat. Akibatnya, seringkali terjadi konflik antara petugas kawasan lindung dengan masyarakat setempat yang sudah bertahun-tahun hidup dari sumber daya alam tanpa merusaknya. Bahkan tidak jarang terjadi masyarakat yang tadinya menggunakan sumber daya alam dengan arif, berbalik merusaknya

berita-berita mengenai permasalahan di Taman Nasional Kerinci Seblat, Ujung Kulon dan beberapa tempat lainnya.

Sistem pelestarian seperti berasal dari Utara dan kemudian kelompok-kelompok lingkungan di Utara mengklaim bahwa mereka datang ke Selatan untuk " mendidik " masyarakat tentang konservasi alam. Padahal sejak Zaman dahulu masyarakat tradisional di Selatan sudah mengetahui manfaat pelestarian alam dan sumber daya. Masyarakat Kesepuhan di Jawa Barat misalnya, mempunyai pola pemanfaatan hutan yang arif dan mitip konsep taman nasional modern.<sup>51</sup> Demikian pula pola agroforestry tradisional di berbagai tempat di Indonesia juga berhasil melestarikan plasma nutfah buah-buahan dan tanaman lainnya dengan konsep keberagaman.<sup>52</sup>

Globalisasi monokulturisme melahirkan paradigma yang sama sekali bertolak belakang dengan kenyataan. Masyarakat tradisional yang sebenarnya adalah pelestari alam dilettakkan sebagai perusak alam karena paradigma ilmu mereka tidak dapat diterima oleh sistem

<sup>51</sup> Masyarakat Kesepuhan di lereng gunung Halimun Jawa Barat, membagi hutan menjadi tiga zone. Pertama, Leuweung kolot ; hutan perawan yang tidak boleh dijamah manusia, kedua leuweung titipan ; hutan titipan yang hanya boleh dimanfaatkan jika sudah ada persetujuan dari sesepuh girang atau sesepuh adat tertua. Ketiga, leuweung biasa ; hutan yang boleh diubahmenjadi ladang. Kepercayaaan ini mungkin membantu melestarikan hutan hujan tropik dataran tinggi terakhir di Jawa (Adimihardja. K, *ecological influences on Traditional Agriculture and Social Organization in West Java*, tanpa tahun).

<sup>52</sup> Agroforestry: sistem budidaya yang memadukan ladang pertanian dan pemanfaatan spesies hutan, dengan pola yang mengikuti struktur dan kekayaan jenis di hutan tropik. Sistem agroforestry tradisional di Jawa, Sumatera dan Kalimantan telahberhasil melestarikan keanekaragaman hayati. Misalnya 40 varietas pisang dihasilkan dari hutan ladang (*agroforest*) tradisional ; tiga puluh spesies tanaman buah dilettarkan dalam ladang hutan pesisir dan Maninjau (Sumatera) dimana jumlahjenis tanaman dalam satu ladang bisa mencapai 300 di Jawa Kebun desa bisa terdiri sampai 250 jenis tanaman termasuk 50 spesies tanaman buah-buahan danmerupakan sumber bagi kultivar buah-buahan dengan prospek cerah (michon G. dan de Foresta H. *Complex Agroforestry System and Conservation of Biological diversity*, 1990).

pengetahuan Barat. Sebaliknya, kelompok penganjur monokulturisme yang bertentangan dengan kaidah alam dinyatakan sebagai pelestari lingkungan. Hal ini sudah banyak dikritik, tetapi hingga kini masih berlangsung dan menjadi salah satu penyebab krisis lingkungan global.

## **E.2. Apartheid Lingkungan**

Lingkungan hidup adalah universal dan karenanya perlu dikelola bersama. Pada satu sisi proses globalisasi seharusnya mampu mencegah kerusakan lingkungan selama ini. Seyogyanya keprihatinan bersama membuat negara manapun tidak bisa melakukan tindak kerusakan tanpa diprotes masyarakat dunia. Namun pada sisi lain, karena globalisasi tidak berlangsung setara dan seimbang keprihatinan ekologis justru dipakai oleh Utara untuk mengendalikan Selatan. Utara selalu menganggap sumber kerusakan lingkungan ada di Selatan, dan Utara mempunyai jawabannya. Beberapa contoh kasus di bawah ini membuktikan hipotesis tersebut.

Pada tanggal 8 Februari 1992, media the Economist menerbitkan memo internal yang dibuat oleh Ahli Utama Bank Dunia, Lawrence Summers, yang sempat mengemparkan dunia itu. Secara singkat, memo tersebut berbunyi "hanya diantara kita, tidaklah sebaiknya Bank Dunia mendorong lebih banyak migrasi industri kotor ke negara-negara kurang berkembang dengan tiga alasan :

1. Ukuran biaya kerusakan kesehatan akibat pencemaran tergantung pendapatan yang hilang akibat meningkatnya

morbiditas dan mortalitas, dan juga terkait tingkat upah. Saya pikir logika ekonomi di balik dumping limbah beracun ke negara dengan tingkat upah paling rendah tidak terbantahkan.

2. Bahwa negara-negara Afrika belum cukup mendapat pencemaran (*under-polluted*) : tingkat pencemaran udaranya mungkin amat rendah " secara tidak efisien " dibandingkan Mexico City dan Los Angeles.

3. Tuntutan akan lingkungan bersih untuk alasan keindahan dan kesehatan kemungkinan berasal dari masyarakat yang kaya. Masyarakat yang mengalami kematian 200 perseribu tidak perlu mendapatkan barang mewah berupa udara bersih.<sup>53</sup>

Pada dasarnya memo tersebut menyatakan memindahkan industri pencemar dan beracun ke dunia ketiga merupakan langkah ekonomi yang logis. Maka, Bank Dunia diminta mengambil langkah tersebut melalui pengaruhnya dalam pemberian pinjaman pembangunan ke Dunia Ketiga. Secara sederhana, alasannya adalah : pertama, nyawa orang di Dunia Ketiga bernilai lebih rendah upah yang rendah dibandingkan negara maju; kedua, pemecamatan di negara-negara Dunia Ketiga masi di bawah standar; ketiga, lingkungan yang bersih adalah barang mewah yang hanya dicari oleh negara-negara kaya dimana harapan hidup lebih tinggi, jadi memindahkan industri pencemaran akan menurunkan biaya di seluruh dunia.

---

<sup>53</sup> John B. Foster, Let them eat pollution " *The Logics of free Market Third World Resurgence*, No. 34 Juni 1993.

Bank Dunia, dalam pembelaaannya, kemudian mengatakan bahwa

Summers hanya bermaksud " memicu debat " diantara rekannya. Namun kelompok lingkungan dan sosial tidak mempercayai hal ini. Pemikiran Summers jelas mendapat dukungan di kalangan ekonom dan industri barat. Hal ini terbukti ketika Presiden Clinton menunjuk Summers yang tidak lagi bekerja di Bank Dunia untuk menjadi Wakil Menteri Bidang Masalah Internasional pada Departemen Keuangan AS. Walaupun banyak lembaga non-pemerintah ( NGO ) AS memrites penunjukan ini, Summers tetap diberikan jabatan tersebut.<sup>54</sup>

Memang negara-negara Utara mempunyai standar ganda dalam hal lingkungan (juga hak asasi manusia). Pada suatu sisi mereka meminta Selatan melestarikan alam demi kebaikan seluruh dunia, tapi pada segi lain mereka melakukan " dumping " teknologi pencemar dengan dalih alih teknologi dan pembangunan. Shiva menyebut fenomena ini sebagai " apartheid lingkungan ". Dan khusus Summers bukanlah satu-satunya.

Standar ganda seperti di atas amat nyata terlihat pada saat Konferensi Tingkat Tinggi Bumi (atau UNCED) di Rio De Janeiro tahun 1992. Pada KTT tersebut, negara-negara Utara tidak bersedia berdiskusi mengenai gaya hidup yang boros dan merusak lingkungan di Utara dan pada lapisan tertentu di Selatan. Mereka juga menolak pemberian jangka waktu yang mengikat secara hukum untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sehingga Konvensi Perubahan Iklim menjadi kesepakatan hukum

---

<sup>54</sup> *NGO statement protesting against the appointment of Lawrence Summers to US Treasury Key post. Third world economics, No. 63 April 1993.*

yang lemah. Emisi gas rumah kaca terbesar dilakukan oleh Utara, namun dampak perubahan iklim akan dirasakan paling berat oleh negara-negara kepulauan kecil yang kebanyakan berada di Selatan. Satu-satunya konvensi yang tidak terlalu merugikan Selatan adalah Konvensi tentang keanekaragaman hayati yang justru tidak ditandatangani oleh Amerika Serikat. Walaupun Presiden Clinton kemudian menandatangani konvensi tersebut, tapi senat AS belum mau meratifikasinya dengan alasan konvensi itu merugikan industri bioteknologi AS.<sup>55</sup>

KTT tersebut pada awalnya diberi nama UN Conference Environment oleh Utara, namun diprotes oleh Selatan dengan alasan lingkungan berkaitan dengan pembangunan. Maka kemudian namanya diganti menjadi *UN Conference on Environment and Development* (UNCED). Pada KTT ini negara-negara Selatan menyatakan bahwa pembangunan berkelanjutan hanya bisa dilakukan jika Tatahan hubungan Utara-Selatan dan biaya penyesuaian ditanggung secara adil. Memang di Selatan banyak terjadi pengrusakan lingkungan, tapi di Utara pun terjadi; bahkan kerusakan di Selatan sebagian juga disebabkan oleh hubungan perdagangan dan alih teknologi yang tidak adil antara Utara dan Selatan.

<sup>55</sup> Seperti diketahui bioteknologi adalah teknologi dalam bidang biologi yang melibatkan manipulasi organisme hidup untuk kebutuhan manusia. Bahan baku bioteknologi adalah keaneragaman hayati yang banyak berada di slatan, sementara Utara menguasai teknologi selama ini, karena keaneragaman hayati dianggap sebagai milik bersama, maka industri bioteknologi memperoleh bahan baku tersebut. Sementara mereka enggan berbagi teknologi dengan biaya rekayasa biologi. Konvensi PBB mengenai Keaneragaman Hayati dan alih teknologi dengan biaya ringan dari Utara ke Selatan. Selain itu konvensi ini juga mensyaratkan alih teknologi yang aman, padahal teknologi yang berbahaya selama ini selalu diimpahkan ke selatan. Karena alasan inilah mungkin AS masih belum mau meratifikasi perjanjian tersebut.

Maka, pada akhirnya Utara sepakat untuk menyediakan dana bagi perlindungan lingkungan dan alih teknologi bersih.

Namun lebih dari dua tahun setelah KTT Bumi, janji tersebut banyak yang tidak terlaksana. bahkan, bantuan Utara untuk Selatan semakin turun dan posisi dagang Selatan melemah. Standar ganda mulai terlihat kembali pada perundingan konvensi perubahan iklim dan keanekaragaman hayati. Sebagai contoh, panel antar pemerintah untuk perubahan iklim (dewan penasehat untuk konvensi Perubahan iklim) kini didominasi oleh para ekonom dari negara Eropa Barat. Hasil rapat mereka pada bulan Juli 1994 menyimpulkan bahwa "lebih murah untuk menyesuaikan diri terhadap perubahan iklim daripada menghentikan penyebabnya". Bahkan lebih jauh mereka mengatakan bahwa hak untuk memancarkan CO<sub>2</sub> (salah satu gas rumah kaca) sebaiknya diberikan pada negara-negara sesuai dengan produk domestik bruto nya. Kembali hal ini berarti bahwa negara kaya akan punya hak lebih besar untuk melepaskan CO<sub>2</sub> tanpa sanksi. Negara-negara selatan menginginkan hak tersebut diberikan berdasarkan jumlah populasi. Lebih parah lagi, dalam memperhitungkan kerusakan dalam kaitan dengan jiwa yang akan hilang akibat perubahan iklim, nilai untuk Utara dan Selatan berbeda. Nilai seorang warga Eropa atau Amerika adalah sepuluh kali nilai seorang China. Hal ini dihitung oleh Sam Frankhauser, dari *Centre For Social Economic Research of the Global Environment* di Inggris,



satu studinya. Ia memberi nilai \$ 1.500.000 untuk jiwa di Eropa dan AS serta \$ 150.000 untuk jiwa orang di negara miskin seperti Cina.<sup>56</sup>

Arogansi atau apartheid di lingkungan ini terlihat pula dalam isu

*ecolabeling* terhadap produk kayu tropik. Gagasan ekolabel timbul dari

konsumen Utara yang sudah sadar akan permasalahan lingkungan dan

ingin membeli barang yang proses pembuatannya tidak mencemari dan

merusak lingkungan. Beberapa produk Utara sudah menggunakan

ekolabel, tetapi isu ini gencar dilansir terhadap produk kayu tropik.

Memang pembakalan kayu tropik sering menimbulkan kerusakan hutan.

Namun, hutan alam temperate (beriklim sedang) di negara-negara maju

sudah rusak lebih dahulu di Eropa walaupun masih tersisa di Amerika

Serikat dan Kanada. Juga adalah benar bahwa beberapa produk

konsumen di Eropa sudah mulai menggunakan ekolabel seperti tuna yang

dolphin friendly atau sabun cuci yang biodegradable. Namun ini biasanya

untuk konsumsi dalam negeri, sementara kasus kayu tropik lebih

menyangkut perdagangan internasional.<sup>57</sup>

Ada dua aspek penting dalam ekolabel ini yang berkaitan dengan

globalisasi, yaitu perdagangan yang tidak setara, dan kerancuan konsep

pemanfaatan sumber daya yang berkelanjutan. Mengenai yang pertama,

secara logis semua produk kayu hutan alam seharusnya diberi label yang

<sup>56</sup> A. Meyer, *world climate body colonized by OECD economist, Third World Economics* No. 97 September 1994.  
<sup>57</sup> Vandan Shiva, Gerakan Lingkungan Dunia Ketiga Perlu Mewaspada! GATT, Kumpulan Makalah Seminar Prospek perekonomian dan Lingkungan dunia ketiga dalam kerangka Tata ekonomi Dunia Baru, KONPHALINDO, 1994.

menunjukkan bahwa kayu tersebut berasal dari proses produksi yang ramah lingkungan. Dalam perdebatan internasional hal ini tidak terlalu diterima karena utara menganggap bahwa hutan tropik (di Selatan) yang saat ini mengalami kerusakan yang paling hebat. Hutan tropik memang merupakan salah satu ekosistem terpenting di bumi dan sedang menghadapi ancaman eksploitasi berlebih dan pembangunan yang tidak berkelanjutan. Namun, eksploitasi hutan alam beriklim sedang juga tidak luput dari ancaman eksploitasi berlebih

Karenanya adalah adil jika semua jenis kayu alam diberi label. Setelah perdebatan sengit, hal ini disepakati walaupun pelaksanaannya tetap belum jelas.

Dalam kenyataannya, pasar untuk barang berlabel " ramah lingkungan " amat kecil. Konsumen Utara yang menuntut adanya label ini belum siap atau belum mau membayar lebih untuk barang tersebut. Hal ini juga berlaku dalam sektor lain, seperti sektor industri misalnya. Konsumen menghendaki barang manufaktur yang dibuat tanpa mencemari lingkungan dan dengan proses yang hemat sumber daya alam. Tapi kehendak ini hanya diarahkan pada barang dari selatan. Bagaimana dengan barang dari Utara yang mengalir ke Selatan, Misalnya, kita tidak pernah tahu kandungan residu pestisida pada buah-buahan impor karena tidak diberi label. Bukan berarti bahwa komoditi pertanian dari Selatan bebas residu pestisida, namun Utara sudah lebih siap dengan peralatan untuk mendeteksi hal itu sementara Selatan tidak punya sumber daya

untuk itu. Sehingga, jika Utara menghendaki Selatan bertanggung jawab

atas ekspor kayu alam dan barang manufakturnya maka seharusnya

Utara juga bertanggung jawab atas ekspor komoditi pertanian dan bahan

lainnya sehingga ada perdagangan yang adil.

Untuk masalah kedua, arus konsumerisme " hijau " diambil oleh

beberapa kalangan aktivis lingkungan dengan gembara karena melahirkan

harapan bahwa industri akan dipaksa untuk menerapkan proses produksi

yang ramah lingkungan. Sampai kadar tertentu hal ini benar, tapi

konsumerisme hijau tetap konsumerisme. Pemberian label ramah

lingkungan pada barang konsumen tanpa pendidikan lingkungan bisa

menyesatkan. Konsumen bisa berangapan bahwa karena barang itu

berlabel, maka konsumsinya sebanyak-banyaknya akan membantu

pelestarian lingkungan. Padahal krisis lingkungan dan sumber daya alam

kita hadapi saat ini berakar pada cara produksi yang destruktif dan

konsumsi berlebihan yang menyebabkan eksploitasi sumber daya alam

berlebihan. Sehingga, konsumen diberi pengetahuan tentang etika

lingkungan yang mensyaratkan penerapan " mengurangi, memakai ulang

dan mendaur ulang benda-benda " . (reduce, reuse, recycle) jelas

ekolabel saja secara persial tidak akan menjawab persoalan lingkungan.

### **E.3. Perdagangan Bebas dan Etika Lingkungan**

Seperti yang telah disebut terdahulu, globalisasi sebenarnya

merupakan alat perdagangan yang direkayasa oleh Utara untuk

menguasai pasar selatan. Karena terbungkus oleh istilah " perdagangan "

para aktivis lingkungan pada awalnya kurang tanggap terhadap perundingan Putaran Uruguay di bawah kesepakatan Umum tentang Tarif dan Perdagangan atau GATT yang berjalan bertahun-tahun. Perundingan tersebut akhirnya melahirkan Organisasi Perdagangan Dunia. (WTO) yang akan mengatur pasar bebas atau liberalisasi perdagangan di dunia. Sekilas GATT memang nampak sebagai perundingan sektor dagang yang tidak ada kaitannya dengan lingkungan. Menurut Vandana Shiva, GATT (atau sekarang WTO) justru merupakan isu lingkungan paling penting saat ini karena menyangkut berbagai aspek kehidupan yang berkaitan dengan hewan, tumbuhan dan jasad renik.

Kalau GATT pada awalnya hanya mengatur perdagangan dunia dalam bidang komoditi manufaktur, maka WTO mengatur semua aspek perdagangan termasuk komoditi pertanian, jasa, teknologi, investasi dan perbankan. Karena itu, WTO maupun blok-blok perdagangan lain (APEC, AFTA dan NAFTA) sebenarnya akan mempengaruhi seluruh aspek kehidupan kita dan mungkin kelangsungan hidup kita. Analisis berikut ini memperlihatkan bagaimana sebenarnya paham pasar bebas mengandung beberapa mitos, terutama dalam aspek sosial ekonomi dan lingkungan.

Para penganjur perdagangan bebas mengatakan bahwa negara-negara berkembang akan dapat meningkatkan taraf sosial ekonomi masyarakatnya melalui pasar bebas. Namun menurut Dr. Surna T.

Djajaningrat,<sup>58</sup> walaupun sesudah Perang Dunia II perdagangan

internasional meningkat sepuluh kali lipat, namun kemiskinan di negara-negara Dunia Ketiga tetap memprihatinkan. Demikian pula penganjuran pasar bebas mengatakan bahwa liberalisasi perdagangan adalah jalan terbaik untuk mencapai perlindungan lingkungan karena kekayaan yang dihasilkan akan membuat pemerintah mampu membiayai kegiatan pelestarian. Namun, Martin Khor Kok Peg mengatakan bahwa kalau memang demikian halnya maka perdagangan dunia secara besar-besaran selama dua dasawarsa terakhir ini seharusnya menciptakan lingkungan yang baik.<sup>59</sup> Tapi bukankah krisis lingkungan global justru terjadi dalam dua sampai empat dasawarsa terakhir ini, mungkin saja perdagangan bebas memang meningkatkan taraf ekonomi, namun pola produksi dan konsumsi yang mendasari perdagangan saat ini justru bersifat eksploitatif dan merusak lingkungan sehingga pada akhirnya perdagangan bebas berarti meningkatkan kerusakan ekologi.

Perdagangan bebas berarti pelabuhan-pelabuhan bebas dimana barang yang keluar masuk negara tidak diperiksa secara ketat. Hal ini tidak mustahil akan menyuburkan perdagangan limbah dan bahan beracun. Pratap Chatterjee misalnya, mengutip laporan Green Peace yang menyatakan bahwa pelabuhan Seattle di AS telah meloskan sejumlah limbah beracun dan 8 miliar ton sampah plastik ke sejumlah negara Asia.

---

<sup>58</sup> ST. Djadadiningrat, *Implikasi Perekonomian dan Lingkungan Negara Dunia Ketiga Dalam Kerangka Tata ekonomi Dunia baru*, KOPHALINDO, 1994.  
<sup>59</sup> M. Khor Kok Peng, *Mungkinkah Perdagangan dan Lingkungan Berjalan Seiring*. Berita Bumi edisi Maret 1994.

Contoh lain adalah perjanjian perdagangan bebas antara AS dan Kanada yang mempunyai dampak buruk pada sumber daya perikanan di negara bagian British Columbia (Kanada). Negara bagian ini mempunyai hukum yang mewajibkan para penangkap ikan melaporkan hasil tangkapan mereka guna mencegah eksploitasi berlebihan. Namun para penangkap ikan AS mengeluh karena peraturan ini hanya menjadi beban bagi perdagangan mereka. Keluhan ini menimbulkan ketegangan diantara kedua negara dan pada akhirnya justru British Columbia harus mencabut peraturannya sendiri karena dianggap melanggar prinsip perdagangan bebas.<sup>60</sup> Di Indonesia ada contoh serupa. Pada tahun 1980 – 1985, pemerintah melaksanakan pelarangan ekspor kayu gelondongan secara bertahap guna melindungi industri pengolahan kayu dalam negeri dan mengurangi laju eksploitasi hutan. Tekanan GATT dan Bank Dunia rupanya menjadi salah satu penyebab dicabutnya larangan ini pada bulan Juni 1992 yang lalu. DPR mengkritik kebijakan tersebut karena dianggap sebagai kebijakan yang akan menimbulkan masalah lingkungan.

Contoh di atas menunjukkan bahwa peraturan lingkungan tidak sesuai dengan dogma perdagangan bebas. Bahkan menurut Herman Dally dan Robert Goodland, ahli lingkungan Bank Dunia, harmonisasi standar lingkungan dan kesehatan dalam GATT cenderung menurunkan standar lingkungan sampai titik terendah. Mereka menganalisis delapan kontroversi spesifik saat ini dimana kriteria lingkungan akan berlawanan

<sup>60</sup> P. Chatterjee, APEC, *Kebangkitan atau Kehancuran Pasifik*, Berita Bumi Edisi IV, Februari 1994.

dengan perdagangan bebas. Diantaranya mengenai ekspor kayu tropik dan ikan tuna. Pada setiap kasus, memenuhi peraturan GATT yang menimbulkan masalah lingkungan dan sosial yang lebih buruk.<sup>61</sup>

Pada dasarnya, perdagangan bebas menguntungkan perusahaan-perusahaan multi nasional raksasa yang dikenal sebagai trans-nasional corporation (TNC). Perdagangan antar negara, impor ekspor barang serta jasa, sangat jarang dilaksanakan oleh perusahaan biasa atau perorangan, tapi dilakukan oleh TNC yang mengendalikan 70% perdagangan dunia, dimana 350 TNC terbesar menguasai 40 % perdagangan senilai \$ 3.485 miliar. Praktis seluruh saham TNC dikuasai oleh negara-negara industri. Pada perdagangan bebas, yang amat dianjurkan oleh negara-negara maju, TNC lah yang diuntungkan. GATT, misalnya mengurangi kekuasaan pemerintah untuk mengatur TNC tapi justru mendorong diadakan peraturan yang menciptakan keleluasaan bagi mereka, misalnya dengan menuntut perlakuan yang sama seperti terhadap perusahaan dalam negeri.<sup>62</sup> Artinya jika perusahaan besar ingin masuk ke suatu negara untuk mengeksploitasi sumber daya alamnya, maka negara tuan rumah tidak boleh membebaskan macam-macam peraturan terhadapnya, seperti yang terjadi pada kasus British Columbia di atas. Hal ini tentu saja berpotensi menimbulkan berbagai persoalan lingkungan, karena banyak TNC sekarang merelokasi industrinya dari negara-negara maju dengan

---

<sup>61</sup> Dikutip dari Solon Barracough, *The Perils of free Trade, Third world economics*, No 95 Agustus 1994.

<sup>62</sup> S.T. Djajadiningrat, Ibid

alasan upah buruh yang murah dan peraturan lingkungan yang tidak ketat

ke negara-negara Dunia Ketiga.

Persoalan etika lingkungan yang paling mendasar yang ditimbulkan oleh kesepakatan GATT / WTO saat ini adalah hak milik intelektual (HMI) yang tercantum dalam ketentuan TRIP (hak milik intelektual yang terkait perdagangan). TRIPs pada dasarnya mensyaratkan pemberian dan pengakuan terhadap hak paten atas berbagai inovasi dan kreasi, tidak terbatas hanya pada penciptaan teknologi dan produk nonhayati. Artinya TRIPs bisa mensahkan kepemilikan hakpaten atas makhluk hidup hasil rekayasa, walaupun tidak mengharuskannya. Memang pasal 27.3 9b) pada naskah TRIPs menyatakan bahwa "pihak-pihak boleh menolak pemberian paten bagi tanaman dan hewan selain mikroorganisme, dan proses-proses yang bersifat biologis akan tetapi pihak-pihak harus mengupayakan adanya perlindungan varietas perindungan varietas tanaman, mungkin dengan paten atau sistem sui generis "Shiva"<sup>63</sup> memperingatkan bahwa walaupun perjanjian TRIPs nampaknya tidak mencakup organisme hidup dalam pemberian paten, tapi tidak dengan tegas menyatakan bahwa bagian – bagian dari hewan dan tanaman atau hewan dan tanaman yang telah diubah juga tidak dapat dipatenkan. Akibatnya, dalam kenyataannya, kantor Paten AS telah mulai memberi hak paten untuk makhluk hidup hasil rekayasa genetika dan memaksa negara – negara lain mengikutinya.

---

<sup>63</sup> V. Shiva, *Op cit.*



Kesepakatan TRIPs mengatakan bahwa hak intelektual hanya diakui bila pengetahuan atau inovasi itu menghasilkan laba. Pasal 27.1 mengemukakan persyaratan bahwa agar diakui sebagai HMI, suatu inovasi harus dapat diterapkan di bidang industri – industri besar atau TNC lah yangpunya dana untuk membiayai penelitian danpenerapan rekeyasa genetika sehingga mereka yang dapat memperoleh hak paten atas makhluk hidup. Dengan kata lain TRIPs meredusir keragaman hayati menjadi milik segelintir orang atau perusahaan saja. Kita dipaksa untuk menerima kerangka etika yang menyatakan bahwa semua spesies hanyalah untuk kebutuhan oleh keuntungan yang dapat diraih oleh perusahaan yang mengeksploitasinya. Nilai intrinsik setiap makhluk hidup, yang menjadi landasan etika lingkungan yang kita anut selama ini, tidak lagi diakui akibat jangka panjangnya dapat diduga : spesies yang dianggap tidak menguntungkan atau tidak menghasilkan sesuatu yang dapat dieksploitasi tidak perlu dilestarikan sebaliknya, spesies yang menguntungkan atau tidak menghasilkan sesuatu yang dapat dieksploitasikan tidak perlu dilestarikan. Sebaliknya, spesies yang menguntungkan akan dieksploitasi habis-habisan. Seperti kata Shiva, TRIPs bukanlah isu dagang, tapi persoalan ekologi, etika, dan ekonomi yang perlu kita pahami bersama.

Kepemilikan pribadi atas makhluk hidup jelas bertentangan dengan budaya-budaya masyarakat asli kita dan bertentangan dengan etika lingkungan untuk menghargai semua makhluk hidup berdasarkan nilai

Hubungan utara-selatan yang tidak adil dalam aspek lingkungan hidup, namun ketimpangan juga terjadi dalam hubungan antar lapisan masyarakat di negara-negara selatan. Misalnya korban pengrusakan lingkungan di selatan kebanyakan adalah lapisan miskin yang sumber dayanya memang terbatas. Karenanya penanganan masalah lingkungan di dalam suatu negara dan pada tingkat global seyogyanya berjalan pada lingkungan.

terutama dalam bidang perdagangan justru mempunyai dampak buruk tidak proporsional. Karenanya, globalisasi yang tidak terdandung ini, Namun beban pengrusakan lingkungan saat ini dipikul oleh selatan secara bumi jika memang berlangsung setara dan adil diantara bangsa-bangsa. Globalisasi bisa menjawab persoalan krisis lingkungan hidup di kaya di utara dan bangsa-bangsa yang belum kaya di Selatan.

sehingga terjadi kepincangan dalam hubungan antara bangsa – bangsa kenyataanya globalisasi didominasi oleh Barat atau negar-negara di utara, konsep yang ada dalam berbagai kebudayaan dan bangsa. Dalam seyogianya harus mencerminkan “perkawinan” berbagai pemikiran dan Saat ini bisa dikatakan ada distorsi pemahaman arti globalisasi memperhitungkan kecenderungan global ini.

yang masih mempunyai kerangka etika dalam kebudayaanya, sudah saatnya gerakan lingkungan terutama negara-negara dunia ketiga dengan perangkat TRIPS – GATT akan menggeser kerangka etika ini, dan intrinsiknya dan haknya untuk hidup. Tapi liberalisasi perdagangan

seiring. Jika pemerintah di dalam negara mereka sendiri. Mereka akan

takut menghadapi tekanan dari Utara.

Demikian pula, dampak negatif globalisasi di selatan tidak bisa dihadapi oleh masing-masing negara secara terpisah. Diperlukan solidaritas di antara negara-negara dunia ketiga untuk menghadapi tekanan dari utara.

### BAB III

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### A. Hasil Penelitian

##### 1. Format Pelaksanaan ADR antara PT KLI dengan Warga Desa Mangunharjo Kecamatan Tugu Kota Semarang

##### 1.1 Pendahuluan

Data yang disajikan sebagai hasil penelitian sebagian besar terdiri dari langkah-langkah yang dilakukan oleh Lembaga Bantuan Hukum Semarang dimana lembaga tersebut menerbitkan *paper*<sup>64</sup> mengenai sejarah perjuangan ADR terhadap kasus PT KLI, serta wawancara dengan Bawor (Kepala Divisi Lingkungan Hidup LBH Semarang).

##### 1.2 Profil Kelurahan Mangunharjo Kecamatan Tugu Kota Semarang.

##### 1.2.1 Kelurahan Mangunharjo Secara Administratif.

Kelurahan Mangunharjo mempunyai luas 482,370 Ha dan berbatasan dengan kelurahan Mangkang Kulon di sebelah barat, sebelah timur berbatasan dengan kelurahan Mangkang Wetan, di sebelah utara di batasi oleh laut Jawa, dan di sebelah selatan dibatasi oleh jalan raya Semarang Kendal. Kelurahan Mangunharjo terdiri dari 5 Dukuh yaitu Dukuh Ngebrug, Dukuh Tanggul Sari, Dukuh Pangung, Dukuh Karang Gayam dan Dukuh Stasiun. Di samping itu kelurahan Mangunharjo terbagi dalam 5 (lima) Rukun Warga (RW) dan 25 (dua puluh lima) Rukun

---

<sup>64</sup> Paper tersebut berjudul "Pantau Sayang Pantau Malang, Perusak Pantau Mangunharjo, Tugu, Semarang, LBH Semarang, 2002.

Tetangga (RT). Jumlah penduduk sampai 2 Juni 1999 berjumlah 4919

orang.

## 1.2.2. Sejarah Desa

Pada awalnya Kelurahan Mangunharjo mempunyai 3 Dukuh yaitu

Dukuh Ngebrug, Dukuh Pangung dan Dukuh Pondok Pangung tapi setelah adanya pemekaran Kotamadia Semarang pada tahun 1992, maka Dukuh Ngebruk di bagi menjadi dua bagian yaitu ikut Kelurahan

Mangunharjo dan ikut Kelurahan Mangkang Wetan. Kelurahan

Mangunharjo dan Mangkang Wetan merupakan bagian dari Kecamatan

Tugu. Sebelum tahun 1976, Kecamatan Tugu termasuk dalam Kabupaten

Kendal. Kecamatan Tugu menjadi bagian bagian dari Kotamadia

Semarang berdasarkan PP 16/1976 tentang perluasan Kotamadia Daerah

Tingkat II Semarang. Kelurahan-kelurahan di Kecamatan Tugu yang

masuk ke dalam Wilayah Kotamadia Semarang adalah kelurahan

Podorejo, Bringin, Ngaliyan, Jrah, Karanganyar, Randu Garut,

Mangkang Wetan, Mangkang Kulon, Mangunharjo, Kehutanan dan

Tugurejo.

Pada bulan Syawal dan Zulhijjah masyarakat biasanya melakukan

Upacara Syawalan dan Besar, acara Syawalan seminggu setelah hari

Raya Idul Fitri, sedang upacara Besar dilaksanakan pada tanggal 10

Besar ( Zulhijjah). Waktu pagi-pagi sekali masyarakat dukuh Ngebruk

(Mangunharjo–Mangkang Wetan) dan sekitarnya beramai-ramai datang ke

Pantai Mangunharjo untuk mandi air laut. Di lokasi tersebut terdapat

penjual makanan dan bahkan para nelayan menyediakan perahu mereka untuk sekedar berjalan-jalan di laut (*lomban*), dengan ongkos Rp.2000,00 sekali naik.

Bagi mereka ritual ini dipercaya sebagai sarana membuang sial, ada kepercayaan dari masyarakat apabila mereka menderita sakit atau kesialan tertentu maka itu akan dibuang dalam ritual ini yaitu dengan membuang kain/pakaian yang dipakai ketika mandi ke laut. Saat ini tradisi tersebut kehilangan ruang ritual, karena pantai yang menjadi tempat bagi mereka untuk melakukan tradisi saat ini sudah mulai lenyap seiring dengan hancurnya pesisir Mangunharjo – Mangkang Wetan.

Sebelum tambak-tambak itu hilang karena abrasi, sambungan Sungai Santren disebut Sungai Paluh. Sungai ini pada waktu itu, adalah tempat mencari nafkah bagi rakyat, terutama bagi mereka yang tidak mempunyai tambak/ sawah. Juga bagi nelayan, bisa dilibatkan mereka tidak perlu ke laut untuk mendapatkan rejeki. Setiap pagi ada budaya "*Nyamplak*" yaitu sekelompok orang (10-15 orang) dengan membawa *loho* (sejenis alat penangkap ikan). *Loho* tersebut dimasukkan ke dalam sungai dan "*ngirit*" yaitu mendorongnya dengan tangan dan kaki, maju, setelah udang dan ikan terkumpul di dalam *loho*, maka udang dan ikan tersebut diambil dan hasilnya dibagi bersama secara rata diantara orang-orang yang *Nglampok* tersebut. Budaya ini telah menghilang seiring dengan rusaknya daerah pertambakan karena abrasi.

Pantai Mangunharjo dahulu indah alami, sebelum dibangunnya

PT. KLI, terutama pemblokiran sungai dan *reklamasinya*, semakin lama semakin ke utara. Di antara batas tanggul dan pasir pantai kurang lebih 200 m, dipenuhi dengan lebatnya *hutan mangrove* dari jenis Api-api dan Bakau serta di beberapa sisinya tumbuh pohon Pandan Doyong, (karena rimbunnya pohon ini sampai doyong). Dahulu di sepanjang pantai tersebut banyak ditemukan *belik* (sumber air) dan anehnya menurut masyarakat berasa air tawar, sehingga sering digunakan untuk mandi maupun minum sehabis sehabian bermain di tepi pantai atau *miyang* (melaut).

Masyarakat Mangunharjo bisa disebut sebagai masyarakat yang religius meskipun tidak fanatik. Di mana di kelurahan ini terdapat satu pesantren putra yang dikelola oleh KH Ali Mudhofar (salah satu korban abrasi, blok irigasi Mororejo). Bagi santri-santri di pesantren ini, bisa bekerja sesuai dengan kemampuannya di desa, baik sawah maupun tambak (*keduk teplok*), sehingga tidak tergantung dari orang tuanya. Sementara pemuda-pemuda dari Mangunharjo sendiri banyak yang belajar ke beberapa pondok pesantren di Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat. Selain itu banyak pula yang sekolah di sekolah umum hingga mencapai gelar sarjana. Di kelurahan ini terdapat satu Masjid dan 21 Surau/Mushola, satu sekolah dasar dan Madrasah Ibtidaiyah.

Untuk memperoleh layanan kesehatan, masyarakat Mangunharjo tidak terluu mendapatkan kesulitan karena di Mangunharjo terdapat sebuah Puskesmas Pembantu. Juga di Mangunharjo ada seorang Dokter,

yang meskipun tidak praktek di situ namun bisa diminta pertolongannya apabila sewaktu-waktu ada masalah kesehatan. Untuk pelayanan kesehatan terdapat 2 orang Dukun Perawat dan 2 orang Bayi.

### **1.2.3. Sistem Perekonomian**

Secara umum dalam hal perekonomian peran perempuan lebih dominan. Hal ini dilihat dari dipegang dan diaturnya keuangan oleh perempuan. Jadi setelah ikan/udang didapat oleh suami, lalu diserahkan pada istri untuk dijual dan hasil penjualan ikan/udang tersebut sepenuhnya diatur oleh istri. Sedangkan apabila suami hendak makan di luar rumah, ia akan minta uang kepada istri. Ada beberapa produksi yang menjadi kebanggaan warga seperti Trasi dan Bandeng Presto alami.

Perikehidupan ekonomi penduduk Mangunharjo sebagian besar tergantung pada keberadaan alam yaitu petani sawah, petani tambak, dan nelayan (termasuk buruh nelayan), atau kombinasi dua dari tiga pekerjaan tersebut di atas, selain itu ada beberapa warga yang juga mengerjakan pekerjaan lain, baik sebagai sambaran setelah melakukan pekerjaan utama atau malah sebagai pekerjaan utama antara lain sebagai pegawai negeri, kusir dokar (kurang lebih 15-20 Dokar), dan tukang ojek. Selain pekerjaan-pekerjaan tersebut dapat dilihat usaha-usaha lain yang dilakukan oleh penduduk antara lain warung-warung makanan, toko kelontong dan ada pula yang memelihara ternak.

### **1.2.4. Petani Tambak dan Kehidupannya**



Kehidupan petani tambak dimulai setelah sholat subuh (kurang lebih pukul 05.00), dengan membawa *kepits* (tempat menampung ikan) dan *saser*, mereka pergi ke tambak masing-masing untuk mengambil udang/hasil tambak lain. Petani tambak masuk ke dalam tambak untuk menciduk isi duak, alat yang digunakan untuk menciduk tersebut dinamakan *saser*.

Sementara itu kaum perempuannya mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Sepulang dari tambak hasil tangkapan petani diserahkan kepada perempuan dalam keluarga untuk di pilih sesuai jenisnya yaitu *Udang Tenger*, *Udang Putih* (besar dan kecil), *Rebon* (udang kecil), *udang biasa* (ukuran jari telunjuk), *Kepiting* maupun *Rajungan* untuk dibawa ke pasar tradisional (di Mangunharjo ada pasar udang/ikan dan pasar bahan makanan). Kaum perempuan sebagian besar sebagian besar sebagai ibu rumah tangga, ada juga yang bekerja di pabrik-pabrik yang berada diluar kelurahan Mangunharjo dan Mangkang Wetan untuk menambah penghasilan dan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari yang memang kurang, malah pekerjaan tersebut mereka lakukan saat mereka masih sendiri/belum menikah.

Sebelum PT. Kayu Lapis Indonesia (KLI) berdiri, setiap hektar tambak menghasilkan 5 kwintal udang windu dan 4 kwintal ikan bandeng sehingga beberapa orang petani dapat menyekolahkan anak dan saudara saudaranya tamat perguruan tinggi, sisanya masih cukup untuk menunaikan ibadah Haji.

### 1.2.5. Nelayan

Nelayan di Mangunharjo terdiri dari dua jenis yaitu sekalgus pemilik kapal dan buruh nelayan, mereka melaut pagi hari ( bagi yang mempunyai tambak, setelah selesai mengurus tambaknya). Nelayan di kelurahan Mangunharjo terletak di dua tempat, salah satunya ialah, nelayan di Sungai Beringin sejumlah 14 orang yang menurut keterangan terakhir ketika acara *Nyadran* ( 1 Muharam 1421) berjumlah 30 orang. Selain nelayan di Sungai Beringin di Kelurahan ini ada khusus kampung nelayan yaitu Tangulisari. Kampung nelayan ini (RW tersendiri), adalah merupakan masyarakat pindahan dari Desa Tawang Ngaglik Lor (Banjir Kanal) yang terpaksa dipindahkan karena terkena proyek PRPP. Perahu yang digunakan nelayan sungai Beringin jenis "sopek" dengan kekuatan mesin kecil. Perahu-perahu ini hasil buatan kabupaten Demak. Untuk di sungai digunakan jaring "jlarang" (jaring ini terpasang di sungai) naiknya jumlah nelayan seiring dengan rusaknya pantai, hutan dan tambak. Dahulu mereka menjadi nelayan sungai atau bahkan buruh tambak maupun sawah. Saat ini sudah tidak lagi harapan di darat.

Dari data Monografi Kelurahan tercatat ada 52 perahu bermotor. Pembagian antara buruh nelayan dengan pemilik kapal adalah bagi hasil sesuai dengan kesepakatan tapi sebagian besar adalah dengan sistem perlimaan yaitu penghasilan setelah dikurangi ongkos ongkos, di bagi lima dengan pembagian 2/5 untuk pemilik dan 3/5 untuk buruh nelayan, dengan hasil dijual oleh pemilik kapal.

### 1.3.Pasca berdirinya PT. KLI

Pasca berdirinya PT. KLI, desa yang terkenal *gemah ripah loh jinawi* tersebut lambat laun berubah menjadi desa yang anggota masyarakatnya kehilangan mata pencaharian. Hilangnya mata pencaharian tersebut akibat hilangnya tambak-tambak yang selama ini menjadi sandaran hidupnya. Sebagian telah hilang menjadi laut dan sebagian rusak, apalagi jika *rob* datang, tambak-tambak yang masih ada tersebut bak laut yang luas.

Akibat hilang dan rusaknya tambak sudah dapat diduga, yaitu hilangnya sumber pendapatan masyarakat. Saat ini mereka yang dahulunya begitu makmur sekarang untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari harus bekerja serabutan demi sesuap nasi untuk anak istrinya. Ada yang menjadi tukang ojek, makejar barang-barang elektronik, mengajar di madrasah terdekat, bekerja di luar daerah sebagai buruh dan lain-lain. Dari tambak yang ada sekarang yang rusak ada  $\pm$  286,9 hektar, bahkan banyak sawah yang saat ini berubah jadi tambak.

Sekalipun mereka telah kehilangan mata pencaharian, namun ketika panggilan "negara" mereka tergerak hatinya untuk ikut membela nama Jawa Tengah. Pengorbanan mereka pun tidak sia-sia karena masih dapat menjadi juara I tingkat nasional 1997. Bahkan ketika itu mereka sempat bertemu dengan Soeharto (yang waktu itu masih menjabat sebagai Presiden RI). Predikat ini pula yang sampai sekarang selalu dibangga-banggakan oleh para pejabat di Jawa Tengah sekalipun

sebagian dari tambak-tambak petani telah hilang atau rusak akibat PT.

KLI (lihat lampiran).

#### **1.4. Profil Pt. Kayu Lapis Indonesia (PT. KLI)**

##### **1. 4.1. Sejarah Singkat**

Pada awalnya PT. KLI akan didirikan di Desa Mangunharjo, tetapi

ditolak oleh Mantan Kepala Desa waktu itu, karena mata pencaharian petani hanya dari tambak. Bahkan pada tahun 1996 saat kelompok tani Rejomulyo menang lomba intensifikasi pertambakan tingkat nasional,

Walikotamadia Semarang pernah mengatakan agar tanah/tambak

dipertahankan agar jangan sampai dijual. Karena pantai sekitar

rencananya akan digunakan untuk pariwisata. Bahkan ketika Walikota

mengemukakan rencananya melebarkan jalan desa menuju pantai, warga

menyatakan keikhlasannya. Setelah ditolak didirikan di Mangunharjo

kemudian pabrik didirikan di Dukuh Ngebum Desa Morejo Kecamatan

Kaliwungu Kabupaten Kendal. Beberapa informasi yang didapat, proses

pendirian pabrik ini juga mengandung masalah yaitu adanya rekayasa

ganti kerugian tambak.

##### **1.4.2. Profil KLI**

Ketika belum berkembang, PT. KLI hanya menempati areal yang

sangat kecil (hanya kelihatan 2 buah cerobong) kayu-kayu gelondongan

sebagai bahan baku PT. KLI ditarik dengan kapal tongkang memasuki sungai Wakak. Setelah itu kayu-kayu tersebut ditumpuk di sungai Wakak.

PT. Kayu Lapis Indonesia, berdasar Tambahan Lembaran Negara RI, tanggal 22/5 – 1990 No.41, didirikan dengan Akta no 115, tanggal 23 Agustus 1977 dari Notaris Maria Theresia Budi Santosa. Para pendiri perusahaan ini adalah Gunawan Sutowo, Andi Sutowo, Agus Sutowo. Modal yang digunakan adalah PMDN. Pabrik ini beroperasi mulai berdiri 1979 dan merupakan bagian dari Group Kayu Lapis Indonesia (PT. Indo Veneer, Karanganyar Plywood, PT. RPI Kaliwungu, PT. Henson Iriana, Sorong, Krusing Sakti, PT. Sarpitim, PT. Sampit). PT. KLI terletak di Desa Morejo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal, sementara itu Head Office PT. Ini berada di Jl. Adisucipto P.O. Box. 29 Surakarta (Ph.0271 – 71507, Telex 25276 IDSOLO, fax 0271-715876), Brance Office, berada di Jl. Sibayak No. 11-13 Semarang (Ph. 024-311441, Telex 22415 KLI SM, Fax 024-413475). Direktur pabrik ini adalah Agus Sutowo. PT. Ini tergabung dalam Apkindo, APII dan ISA.

Pabrik ini terdiri dari 7 bagian ( Dengan Line, SE Line, AB Line, Saw Mill dll), dengan tenaga kerja sekitar 7220 orang (berdasarkan KKB tahun 1998), Buruh PT.KLI terbagi dalam tiga group (A,B,C) yang merupakan pembagian jam kerja. Masing-masing bagian memiliki tanda pengenal sendiri-sendiri. Tanda pengenal tersebut terbentuk label kecil dengan warna tertentu, yan dijahit diatas kantong baju sebelah kiri.

Dengan produksi berupa *Play wood*, papan batangan, *wood*

*waste*, *Block board*, *Sawn Timber*, dan diekspor ke Eropa USA, Jepang,

Hongkong, Cina, dan Korea. Pabrik ini memproduksi *Play wood* (dengan

kapasitas produksi per hari sebanyak 1.440.000 m<sup>3</sup>), *Block board* (dengan

kapasitas produksi perhari sebanyak 230.000 m<sup>3</sup>), *Sawn Timber*

(kapasitas produksi per hari sebanyak 166.667 m<sup>3</sup>). (Sumber : Kencana

Pemantauan Lingkungan Pabrik PT. KLI tahun 1993). Di samping

produksi utama diatas, PT. KLI juga menghasilkan produk sampingan

berupa *Formaldehyde*, *Urea formaldehyde* dan *Melamine Formaldehyde*.

Keberadaan pabrik ini tidak sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang

Daerah Kabupaten Kendal 1991. Menurut RUTRD tersebut wilayah ini

adalah bukan merupakan wilayah industri, tapi merupakan kawasan

tambak.

Keberadaan pabrik ini tidak sesuai dengan Rencana Umum Tata

Ruang Daerah Kabupaten Kendal 1991 (Sumber : Studi Evaluasi

Lingkungan PT. KLI Tahun 1993:18). Menurut RUTRD tersebut, wilayah

ini adalah bukan merupakan wilayah industri, tetapi merupakan kawasan

tambak. Dalam hal *supply* kayu, didapat dari berbagai konsesi HPH mulai

dari Sumatera hingga Irian Jaya, yang mencapai 94 konsesi. Menurut

Muslimin Nasution (Mantan Menhutbun RI), kelompok Kayu Lapis

Indonesia menguasai HPH seluas 3,5 juta hektar. Dan ini merupakan

penguasaan HPH terbesar se-Indonesia.

Dalam proses produksinya, PT. KLI mengeluarkan limbah cair, padat, debu, gas dan kebisingan. Limbah gas yang dihasilkan berupa debu terbentuk serbuk gergaji dan jelaga sisa pembakaran serbuk gergaji. Limbah padat yang dihasilkan dalam produksi pabrik adalah berupa potongan-potongan, sisa dari unit produksi *Playwood*, *Saw Mill* dan *Block Board*, serbuk gergajian, batangan/kayu *afkir*, sampah rumah tangga perusahaan. Buangan cair adalah sisa-sisa bahan kimia yang digunakan sebagai pelekat (*glue*) dalam produksi, pencucian reaktor maupun lantai, dan dari ceceran bahan baku pembantu. Bahan-bahan kimia tersebut terdiri dari *urea*, *phenol*, *melamine*, *formalin*, *methanol*, *Amino*, *NaOH*, dan beberapa bahan lain. Selain itu juga terdapat busukan limbah padat yang terlarut dalam air, sisa-sisa buangan dari laboratorium berupa sisa-sisa bahan kimia yang digunakan untuk analisa.

Keberadaan limbah buangan dari PT. KLI adalah debu jatuh terbentuk *grajen* jatuh di area pemukiman, dan jatuh di daerah pertambakan yang menyebabkan akumulasi dan pembusukan sehingga dapat menurunkan kualitas tambak. Buangan limbah padat akibat pembusukan kayu sebagian berubah menjadi zat organik terlarut yang akhirnya masuk ke sungai. Masukkan zat-zat organik meningkatkan kadar *COD*, *BOD*, dan *NHS* selain juga menurunkan *O2* terlarut. Dari limbah cair yang bersumber dari sisa-sisa tersebut di atas ditampung dan diolah dengan cara *aerasi* yang tidak efisien sehingga yang dibuang ke alut

masih mengandung bahan-bahan *formaldehyde, phenol, NH, BOD, COD*

dan padatan *tersuspensi* yang cukup tinggi.

#### **1.4.3. Profil Buruh PT. KLI**

PT. KLI tidak hanya menyimpan masalah dengan petani tambak dan nelayan saja. Terhadap buruhnya, PT. KLI baik sendiri maupun dengan didukung penuh oleh aparat Militer/Polri juga bermasalah dengan buruhnya. Pada 5 Maret 1999 lima orang buruh di tembak ketika memperjuangkan hak-hak normatifnya. Begitu juga pada tahun 2000 sekitar 314 orang buruh di PHK karena menuntut hak normatifnya. Daftar nama yang pernah masuk PT KLI terlampir lampiran 1).

#### **1.4.4. Alur produksi PT. KLI**

Untuk mendapatkan bahan baku produknya, PT. KLI mendatangkan kayu-kayu dari Kalimantan, baik dari perusahaan yang merupakan grup PT. KLI maupun perusahaan lain.

Kayu-kayu gelondongan tersebut disusun di atas Kapal Tongkang dan ditarik dengan *Tug Boat* (12 m x 3,5 m). Selain dengan Tongkang kayu juga dimasukkan dalam kapal besar pengangkutan. Sesampainya di dekat pabrik, karena *boat* tersebut tidak bisa mendekat ke lokasi pabrik, maka *log-log* kayu tersebut di bongkar, pembongkaran *log-log* tersebut merupakan tugas divisi Pembinaan Laut..

Proses pembongkaran sampai dengan memasukkan *log* ke *pond* (muara asli sungai Wakak) adalah sebagai berikut, kayu dibongkar oleh bagian pembongkaran, untuk pembongkaran digunakan kapal dengan



Proses dalam *timber processing* TP Bagian ini dimaksud dengan membuat bahan baku menjadi *provil* . yang terdiri dari *saw mill /dry klin* dan *timber processing* kayu dari *log supply* di bawa ke saw *mill* untuk di potong setelah kayu-kayu tersebut memasuki proses *dry klin* (pengeringan). Selanjutnya dilakukan pembahanan (seleksi), kayu yang tidak lolos seleksi akan diproses sekali lagi. Sementara yang lolos masuk mesin *blanking* untuk pengurangan tebal, terdiri dari dua mesin, dari *blanking* terus dimasukkan ke mesin *reeping*, terdiri dari 2 mesin (mengurangi lebar). Setelah melalui proses ini kayu masuk *jam saw*

log tersebut dijual untuk produk-produk lain .  
 mempunyai bagian *logyard*—*penimbunan log* di darat yang kemudian *log-wood* selain bagian pembongkaran dan *log supply* divisi ini juga proses lebih lanjut ke bagian produksi *saw mill /timber processing* dan *play peredaman* kayu memasuki tahapan *cross-cut* potong untuk kemudian di kayu di angkut dengan *lori* menuju ke tempat *peredaman* kayu dan yang terdiri dari *log pool sipan* kayu terus pver *head* angkat kayu dari sini Setelah di *log pond* tugas ini diteruskan oleh bagian *log supply* dalam *log pond (supply log)*.

batang, untuk kemudian ditarik oleh *mooring boat* dan dimasukkan ke *log-log* panjang, 1 rakit 17 batang, dan kayu pendek  $\pm$  4 m sebanyak 50 panjang pendeknya *log*, kayu-kayu tersebut dirakit berdasar seleksi. Untuk terbagi dalam pengecekan *sinker* dan *Flooter* terus di seleksi berdasar pancing khusus untuk membongkar kayu, dicek jumlah dan jenisnya

(pemotongan) terdiri dari 7 mesin, dari sini kayu terbagi dua, satu dilempar ke pasaran lokal. Sebagian lagi masuk mesin *moulder* (pembuatan profil) terdiri 5 mesin dan setelah kayu-kayu yang sudah berprofil ini masuk ke bagian *finishing* yang terdiri dari dua bagian yaitu di *bor* (dibuat lubang kecil-kecil di kayu) dan di *cross cut*, dari bagian *cross cut* dimasukkan ke pengepakan (*pallet*).

Untuk bagian *Play wood* proses yang dilakukan adalah, dari *log supply* kayu masuk *cross/pemotongan*, setelah itu masuk *Hois/* pengangkutan balok. Kayu-kayu tersebut terus masuk mesin *rotary*, setelah di kupas kayu di *drayer* (pemanasan). Setelah itu dimasukkan ke *cor border* ( seleksi ketebalan ) / bagi *tinner* ( kayu tipis ) untuk kayu yang ketebalannya kurang disambung dengan *compuer*. Kemudian di masukkan dalam *glue speder* (pengeliman). Proses pembuatan *Playwood*, juga melayani *cool press* terus di *cool press*, *Hot Press* ( pemanasan ), pemotongan dan *sender* (diampas). Setelah diampas, pemeriksaan dilakukan sekali lagi, sebelum disetujui oleh *Quality Control*.

Untuk penerimaan barang jadi, khususnya *ekspor*, jenis *Play Wood* diberangkatkan dari pelabuhan KLI, dan petugas bea cukai hadir di pabrik, sementara untuk hasil produksi *timber processing* dikirim melalui pelabuhan Tanjung Mas. Bis karyawan yang jalan kurang lebih 70 buah. Truk pengangkut kayu (*banyak*), kapal pengangkut kayu ( *tongkat* ) 10 buah, kapal peti kemas ( tidak diketahui jumlahnya ). Kapal *Mooring* (tidak

diketahui jumlahnya). Kapal Keruk 1 buah, Kapal pengangkut Balok 10

buah, Kapal Tugboat 10 buah, Motorboat untuk operasi pantai 1 buah.

## **1.5 Analisa Ahli**

### **1.5.1 Pujiono (Ahli Kelautan Fakultas Perikanan dan Kelautan**

**Universitas Diponegoro Semarang).**

Pada tanggal 29 September 1999, Pujiono salah seorang ahli

kelautan dari Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Diponegoro

Semarang bersama dengan beberapa orang dosen dari PPLH UNDIP

didatangkan oleh LBH Semarang untuk melakukan pengamatan

lapangan. Maksud dari pengamatan lapangan ini adalah untuk

mendapatkan pembuktian ahli berkaitan dengan perusahaan pantai

Mangunharjo. Pembuktian ini perlu mengingat selama ini, PT. KLI

selalu mengatakan bahwa abrasi disebabkan oleh faktor alam.

Dari pengamatan lapangan, Pujiono dalam papernya yang berjudul

"*Kajian Kualitatif Kasus Abrasi Pantai Desa Mangunharjo*" pada intinya

menyatakan bahwa kawasan perairan pantai Desa Mangunharjo

mempunyai ciri yang sangat dinamik. Ini terutama dicirikan oleh adanya

beberapa fenomena :

1. Bangunan PT. KLI yang menjorok ke arah laut sepanjang 500 meter

telah berkembang di sebelah timur bangunan menjadi 700-1000 meter.

2. Kondisi *isodepthnya* yang variatif bila ditinjau dari jauh dekatnya

dengan garis pantai. Dengan demikian, maka *zona breaker gelombang*

sangat dekat dengan garis pantai. Bahkan pada pembangunan urugan

- pengerukan.
- memperlakukan kawasan ini, seperti misalnya kemungkinan adanya
2. Terdapat campur tangan manajemen lingkungan pesisir dalam memperhitungkan perilaku *hidroseanografi* kawasan tersebut.
  1. Terdapat kesalahan perencanaan bangunan yang di bangun tanpa konsekuen, yakni :  
 bangunan urugan PT. KLI daripada di sebelah barat. Ini membawa tiga besar. Ini dicirikan oleh lebih besarnya *erosi* di kawasan sebelah timur kenyataannya kawasan sebelah timur mendapat tekanan yang lebih urugan luar baik dalam hal *sedimentasi* maupun *erosi*. Namun dalam yang sama antara kawasan sebelah timur dan sebelah barat bangunan mencapai ujung bangunan. Konsekueksinya, semestinya terdapat pola akan pecah pada bangunan urugan bila *kelayakan fisiografi* belum berkembang ke wilayah yang lebih luas. Dalam hal ini energi gelombang menjorok ke laut menyebabkan terjadinya perubahan pola *hidroseanografi*
- Selanjutnya, Pujiono menyatakan bahwa bangunan PT. KLI yang dan satu di sebelah barat.
3. Adanya pembangunan urugan bagi industri PT. KLI telah memotong transport *sedimen alamiah*, yakni terbagi menjadi dua : satu sebelah timur (dalam hal ini kawasan yang *terkena abrasi* Desa Mangunharjo)
- terkena pada ujung pembangunan (*break water*).
- dipergunakan sebagai lingkungan industri). *Zona breaker* tepat pantai yang dilakukan oleh PT. KLI (yang selanjutnya saat ini

Menurut Radiono struktur bangunan pabrik KLI yang menjorok ke laut membuat lokasi ini menyerupai sebuah teluk yang tidak terlalu luas. Gelombang yang datang dari laut lepas mengalami pembiasan setelah melewati bangunan KLI. Gelombang yang terbias menyebabkan tinggi dan periodenya menurun sehingga kecepatannya berkurang. Kecepatan

*Pantai Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal”.*

“*Tinjauan Secara Kuantitatif Perubahan Volume Sedimen Gislak Sepanjang* lebih khusus lagi pantai sekitar PT. KLI. Penelitian tersebut berjudul skripsinya di pantai daerah Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal dan Pada tahun 1996, Radiono telah melakukan penelitian untuk

#### **dan Kelautan Universitas Diponegoro Semarang)**

#### **1.5.2. Radiono (Mahasiswa Jurusan Ilmu Kelautan Fakultas Perikanan**

dilikuti potensi dampak lanjutan (erosi lanjutan).

timur muara sungai baru (*muara/lak Moro tuo*) dan diperkirakan akan *Abrasi tahap lanjutan* dimulai dengan indikasi *tergogosnya* lahan sebelah kondisi sekarang).

pada *lahan eksisting* saat ini (saat sebelum urugan sampai dengan *Abrasi tahap pertama* dengan konsekuensi hilangnya lahan atau abrasi urugan di laut) hingga saat ini dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu :

Sebagai kesimpulan, Pujiono menyatakan bahwa terjadinya *abrasi* pantai di kawasan Mangunharjo mulai dari awal (sejak dibangunnya

KLI sebagai sudut konsep pendayagunaan lahan pesisir yang salah.

3. Keduanya telah dilakukan dan berlangsung sesuai perencanaan PT.

yang berkurang menyebabkan energi menjadi lemah. Akibatnya arus yang

terbentuk tidak mampu menggerakkan sedimen untuk melewati bangunan KLL. *Suplai Sedimen* dari sebelah barat tidak dapat diteruskan melewati struktur bangunan KLL yang berfungsi sebagai penghalang. Kondisi ini menyebabkan pasir terus menumpuk sehingga terjadi deposisi yang tinggi.

Sebagai hasilnya, pantai pada Dusun Ngebum (sebelah barat PT. KLL) terus maju ke arah laut atau mengalami *akresi*. Menurut catatan Kantor Kepala Desa Mororejo pertambahan lahan di Dusun Ngebum telah mencapai 2,5 hektar. Sedangkan di sebelah timur, struktur bangunan KLL yang menjorok ke laut menjadi penghalang *gerakan sedimen* sepanjang pantai. Gerakan pasir tidak mampu melewati penghalang. Arus sepanjang pantai terus bergerak sehingga sampai di sebelah timur pabrik KLL. Pada lokasi ini, *pasokan sedimen* dari sebelah barat sangat minim karena terhalang oleh struktur pabrik KLL. Keadaan ini memaksa arus sepanjang pantai *mengikis lahan gisik* yang ada di sepanjang sebelah timur lokasi pabrik KLL. Pengikisan yang kuat berlangsung sepanjang tahun sehingga terjadi erosi yang sangat besar akibat terhalang oleh struktur bangunan PT. KLL sedimen terdeposit. Sehingga garis pantai sebelah timur PT. KLL terus mengalami perubahan mundur.

### 1.5.3 DR. Ir. Sutrisno Anggoro, Msc. (Pusat Penelitian Lingkungan Hidup Universitas Diponegoro Semarang).

Pada Desember 2000 para peneliti dari PPLH UNDIP melakukan study lapangan yang dipimpin oleh Sutrisno Anggoro menganalisa bahwa

Pembelokan sungai Wakak yang diikuti pengerukan/ penggalan daratan disebelah utara dan depan muara sungai Wakak, secara langsung menyebabkan perubahan *tiga aspek topografi*, yaitu : hilangnya peredam gelombang alami, pertambahan kedalaman pantai dan pertambahan sudut kemiringan garis pantai./ adanya perubahan ini memicu gelombang pantai menjadi lebih besar dan mengarah dinding-dinding pantai Mangunharjo yang rapuh. Kerapuhan dinding pantai ini karena sudut kemiringannya yang lebih besar akibat pengerukan dan

(sebelah barat PT. KLI).

Mangunharjo (sebelah timur PT. KLI) dan yang *terakresi* di Desa Ngebum (penambahan daratan) di sisi lain. Dalam kasus ini yang terabrasi di desa terdapat arus pantai. Hal ini berakibat *abrasi* di satu sisi dan *akresi* ke darat. Selain itu bangunan ini juga menghambat *gerakan sedimen* yang mempengaruhi pola arus pantai (*long shore current*) sehingga mengarah Bangunan PT. KLI yang menjorok ke laut secara langsung mempengaruhi).

aspek pendukung kerusakan yang saling bekerja secara sinergis (saling bisa stabil. Terjadinya proses *abrasi* disebabkan interaksi antar aspek-sehingga kondisi pantai yang sebagian besar terdiri atas pertambahan kalau mungkin adanya sedikit *abrasi* diimbangi pula adanya *akresi*, menjorok ke laut dan pembelokan sungai Wakak kondisinya stabil, artinya pantai Mangunharjo sebelum adanya pembangunan pabrik KLI yang

struktur tanahnya yang secara alamiah mudah terabrasi karena dominan

*lempung.*

#### **1.6 Upaya Perundingan Yang Telah Dilakukan Masyarakat**

##### **1.6.1. Upaya mulai tahun 1987 – April 1999**

Korban (berdasarkan lokasi tambak) dapat dikategorikan menjadi

3 kelompok, yaitu :

1. Masyarakat Morejo yang lokasi tambaknya di Desa Morejo dan pemanjakannya di Kabupaten Kendal.

2. Masyarakat Mangunharjo dan Mangkang Wetan yang lokasi tambaknya di Desa Morejo dan pemanjakannya di Kabupaten

Kendal.

3. Masyarakat Mangunharjo dan Mangkang Wetan yang lokasi tambaknya di Mangunharjo dan pemanjakannya di Kotamadia

Semarang.

Bupati Kendal dengan surat No. 611.3/1054/89 tanggal 6

Desember 1989 mengingatkan PT. KLI bahwa pembelokan sungai tersebut telah merugikan rakyat yaitu fungsinya secara penuh saluran pembangunan banjir secara maksimal (hanya 2/3 berfungsi). Sehingga penanggulangan banjir Semarang Barat yang telah dibiayai cukup besar itu tidak mencapai sasaran. Akibat lain adalah tergenangnya tambak yang dimiliki oleh petani kecil sekitar, terutama pada musim hujan.



Pada tahun 1990 berdasarkan laporan masyarakat dan surat Bupati tersebut, PT. KLI mendapat teguran dari Gubernur TK I Jawa Tengah Ismail Surat Gubernur No. 050/014193/90 tertanggal 28 Februari 1990 adalah jawaban dari surat Agus Sutanto (Direktur PT. KLI) tanggal 22-1-1990, sekaligus peringatan bagi PT. KLI. Teguran dan peringatan tersebut menurut keterangan petani Mangunharjo, dilakukan hingga 3 (tiga) kali tanpa mendapatkan respon dari PT. KLI. Karena kondisi negara yang *represif*, membuat kasus ini terkabung-kabung dan tidak jelas.

Tuntutan kerusakan yang diajukan petani tambak ini tidak diterima oleh PT. KLI bahkan pihak KLI menyalahkan petani yang malas memperbaiki tanggul padahal biaya perbaikan tanggul tidak sebanding dengan seringnya kerusakan yang diakibatkan oleh kayu-kayu KLI.

Gerakan Reformasi (sekitar Mei 1998) membuat keberanian petani bangkit lagi. Petani korban pembelokan sungai yang bertempat tinggal di Mororejo (Hj. Anisa/Misronah, Ky. Sukatman, Abu Yayid/Rayid HM, Suriah Marjan/Bahr, Suryati dan Mangunrejo (Eko, Adhim, Bili, Zaenudin, Pak Haji, Tedjo, Adiknya Munzilin dll) mengkuasakan kepada Mundjilin dan Tedjo untuk mengurus permasalahan tersebut dengan tuntutan :

1. Luruskan kembali sungai
2. Perbaiki tanggul/tambak
3. Ganti kerugian penghasilan (1990-1998)
4. Apabila PT. KLI tidak sanggup maka harus dicari alternatif lain untuk menyelesaikan masalah ini.

Selain itu masyarakat sudah semenjak 1987 sampai saat ini

selalu berusaha menanam Bakau baik swadaya maupun dengan bantuan pemerintah, namun demikian semuanya rusak diakibatkan *keganasan*

KLI.

#### **1.6.2 Upaya yang dilakukan pasca Mei 1999 (Setelah mengadu ke**

**LBH Semarang).**

Pada awalnya petani tambak korban perusahaan pantai KLI

mengorganisir dirinya dalam KMKA (Kelompok Masyarakat Korban Abrasi). Namun berbeda dengan upaya di atas, untuk pasca Mei 1999,

yang terlibat tidak hanya petani tambak yang tambaknya hilang atau rusak saja, tetapi juga melibatkan nelayan, pemuda, remaja masjid dan tokoh

masyarakat. Ini dikarenakan mereka berangkat dari kesamaan sebab kesengsaraan. Sehingga dalam perkembangannya KMKA ini bersama

komponen lain masyarakat Mangunharjo dan Mangkang Wetan membentuk KMPL (Kelompok Masyarakat Pencinta Lingkungan)

Mangunharjo-Mangkang Wetan untuk bertujuan bersama melawan PT. KLI.

Sebagai akibat dari terjadinya perusahaan pantai yang dialami oleh masyarakat selama lebih 12 tahun tersebut, KMPL menuntut kepada PT. KLI untuk :

1. Membuat sabuk pantai untuk menahan laju gelombang laut agar perusahaan pantai tidak berlanjut ke arah tambak-tambak yang ada di

sebelah dalam, sekaligus pemerliharaannya dan penghijauan dengan

membuat kawasan hutan bakau serta menghentikan penyedotan pasir.

2. Membersihkan lingkungan pantai dan laut dari segala limbah cair dan

padat yang dibuang oleh KLL.

3. Memperbaiki tambak-tambak yang sudah terlanjur rusak, tetapi belum

hilang.

4. Merealisasikan tambak-tambak yang sudah hilang ditekan laut, dan

5. Memberikan ganti kerugian atas hilangnya penghasilan selama tambak

tidak bisa difungsikan.

Terhadap kasus-kasus tersebut, masyarakat melakukan usaha-

usaha sebagai berikut :

1. Memaparkan kasus tersebut pada pertemuan antara Paguyuban

Petani Peduli Lingkungan (P3L) dengan Gubernur Jawa Tengah dalam

rangka peringatan Hari Lingkungan Hidup pada tanggal 3 Juni

1999. Tanggapan yang diberikan Gubernur pada waktu itu adalah agar

kasus ini diselesaikan oleh Walikota Semarang.

2. Mengirimkan surat No. 01.KPKA/V/1999 ke Walikota Semarang untuk

beraudensi. Bersamaan dengan hal tersebut dikirimkan surat No.

02/KPKA/V/1999 tertanggal 28 Juni 1999 kepada Dinas Perikanan

Kotamadia Semarang, Kepala Dinas Pengairan Kotamadia Semarang,

dan Kepala BLH Kodia Semarang. Audensi ini terjadi pada tanggal 1

Juli 1999 dengan ditemui Wakil Walikota Semarang, bersama dengan

instansi terkait pemerintah daerah tingkat II. Hasil pertemuan tersebut Wakil Walikota Semarang turun ke lapangan untuk meninjau lokasi.

3. Pada tanggal 5 Juli 1999, pihak Bapedalda TK II kotamadia Semarang mengajak bertemu dengan LBH Semarang dan masyarakat untuk membahas masalah. Akhirnya pihak Bapedalda menyatakan bahwa untuk masalah ekologis pihak Bapedalda akan membantu penuh, sedangkan penyelesaian kasus ini berkaitan dengan sengketa dua wilayah.

4. Pengiriman surat ke pihak Gubernur (6 Agustus 1999) untuk mempertanyakan masalah penyelesaian kasus. Tanggapan surat tersebut ditindaklanjuti dengan turunnya pembantu Gubernur wilayah Semarang (Soefono) didampingi Camat Tugu, Lurah Manguharjo dan Bapedalda kotamadia Semarang tanggal 17 September 1999 ke lapangan lewat Kelurahan Tanggulisari. Pada saat yang bersamaan PT. KLI sedang melakukan pengerukan sungai Wakak dan pasir kerukan digunakan untuk membuat pembatas *log pond* dengan sungai Wakak.

5. Karena tidak adanya perkembangan di tingkat daerah maka KMPL dengan surat No. 17/KMPL/IX/1999, masyarakat mengadakan masalahnya ke Deputy IV Bapedal Pusat (Ir. Effendi Sumarja) untuk ikut menyelesaikan kasus tersebut.

6. Menanggapi surat tersebut kemudian Bapedal Pusat pada 4 Oktober 1999 memanggil Direktur Pusat dan Cabang PT. KLI, Bapedal TK I

Propinsi Jawa Tengah & Bapedal TK II kotamadia Semarang, PPLH  
UNDIP, Direktur ICEL. Akan tetapi KLI tidak mau menghadiri  
pertemuan tersebut.

7. Karena kasus ini tetap terkatung-katung maka masyarakat pada 26  
Oktober 1999 mencoba kembali mengirim surat ke Bapedal Jawa  
Tengah dan ke Gubernur Jawa Tengah. Tujuan surat tersebut adalah  
mempertanyakan perkembangan kasus perusahaan pantai ini.

8. Akibat tidak adanya perkembangan kasus yang berarti, membuat LBH  
Semarang mengirim surat permintaan audiensi kepada Gubernur untuk  
menanyakan permasalahan ini pada 1 November 1999. Tetapi tidak  
ditinggapi oleh Gubernur.

9. Pada tanggal 4 November 1999, KMPL dan LBH Semarang ke DPRD  
untuk mengadakan masalah ini, bertemu dengan komisi D DPRD  
(yang ditemui Soeparto dan Sumunar) dan berjanji untuk ikut serta  
membantu kasus ini.

10. Tanggal 13 November 1999, Wagub III mengundang LBH Semarang  
dan instansi terkait serta KLI untuk membahas kasus tersebut, seperti  
biasanya KLI tidak hadir. Dalam pertemuan ini diminta oleh Wagub  
untuk diselesaikan secara komprehensif.

11. Tanggal 17 November 1999 KMPL dan LBH Semarang dan bersama-  
sama ke kantor Gubernur untuk menanyakan perkembangan kasus,  
tidak ada seorngpun yang menerima KMPL. Akhirnya masyarakat ke  
DPRD untuk mendapat keterangan dan dijawab bahwa tanggal 18

November 1999 akan diadakan *hearing* dengan PT. KLI dan instansi

terkait.

12. Tanggal 18 November 1999 akan diadakan *hearing* antara DPRD dengan PT, KLI dan instansi terkait, (Bapedal & PU Pengaitan). Dalam forum ini terjadi saling tuduhan antara pengusaha dan instansi terkait, tentang tanggungjawab masing-masing pihak. Perusahaan menentang untuk diselesaikan melalui jalur hukum dan langsung diamini oleh Hisyam Alie (anggota Komisi D).

13. Tanggal 24 November 1999, KMPL dan LBH Semarang menemui Ketua DPRD tingkat I propinsi Jawa Tengah (Mardjio). Tetapi menurut ketua DPRD Jateng, komisi D belum memberikan laporan mengenai kasus ini. Dalam pertemuan ini diserahkan *piring* yang merupakan hadiah dari Presiden, ketika Kelompok Tani Rejo Mulyo menjadi Juara I Nasional Intensifikasi Tambak. Tetapi Mardjio menolak menerima hanya karena yang bertanda tangan adalah Soeharto.

14. Tanggal 27 November 1999, pihak DPRD tingkat I propinsi Jawa Tengah menemui PT. KLI untuk melakukan pengumpulan data, yang akan dilanjutkan ke lokasi rakyat pada Rabu yang akan datang.

15. Pada tanggal 30 November 2000, KMPL & LBH Semarang bertemu dengan Menteri Lingkungan Hidup Sony Kerat untuk minta diselesaikannya kasus ini. Menanggapi keluhan warga Menteri siap membantu perjuangan petani & meminta Gubernur untuk menyelesaikan kasus ini.

16. Pada 1 Desember 1999 DPRD tingkat I propinsi Jawa Tengah dari beberapa komisi mendatangi lokasi perusahaan untuk melihat secara riel kondisi masyarakat dan kerusakan yang dialami oleh tambak serta pantai, dari keterangan dari beberapa anggota dewan mereka pada kunjungan kerja di KLI dimanipulasi dengan ditunjukkan lokasi-lokasi lain sehingga menyebabkan anggota dewan tidak mengetahui lokasi tersebut. Sementara itu Gubernur, Pangdam, dan aparat Pemda lainnya dengan helikopter berkeliling di udara.

17. Desember 2000 Perundingan dimulai, dengan dihadiri seluruh *stake holder*, dan dimediasi oleh Prof. Sudarto dari PPLH UNDIP Semarang (karena dipilih oleh seluruh *stake holder*) dan mendapat Mandat SK Dari Gubernur Propinsi Jawa Tengah.

Issue yang diangkat dalam perundingan tersebut adalah :

1. Masalah Ekologi.
  2. Masalah *Community Development*.
  3. Masalah Kerja Pabrik.
- Dalam negosiasi itu melibatkan :
- a. Pihak Utama (*primary parties*).

(1) PT. KLI

(2) Wakil-wakil masyarakat

(3) Gubernur KDH Tk I Propinsi Jawa Tengah

(4) Bappedalda tingkat I Propinsi Jawa Tengah

(5) Wali Kota Semarang

Melihat kenyataan yang ada semakin rusaknya tambak-tambak yang ada di wilayah kali Santren karena *abras*, maka para petani tambak kali Santren yang tergabung dalam Fokalis mengangkat dua *issue* yang belum terselesaikan yaitu *Perbaikan Ekologi* (pembuatan sabuk pantai) dan perbaikan kinerja pabrik dengan jalan melakukan audiensi ke DPRD Tk. I Jateng pada tanggal 8 April 2002. Di hadapan 100 anggota Fokalis, Ketua Komisi D DPRD Jateng (juga menghadirkan pihak eksekutif)

### Kali Santren (FOKALIS)

#### 1.6.3 Upaya yang dilakukan Forum Komunikasi Lembaga Tambak

(3) ICEL (*Indonesian Center for Environmental Law*)

(2) PPLH Universitas Diponegoro Semarang

(1) Warga masyarakat diluar pihak utama

c. Pengamat (observer)

(5) Pembantu Gubernur wilayah Semarang

(4) Kepala Desa Mangunrejo, Kendal

(3) Camat Kaliwungu

(2) Lurah Mangunharjo

(1) Camat Tugu

b. Pihak Pendukung (*secondary parties*)

(9) Bappedal Pusat

(8) LSM/Lembaga Bantuan Hukum Semarang

(7) Bupati Kendal

(6) Bappedalda tingkat II kotamadia Semarang



1. Bagi warga Mororejo (lokasi dengan lokasi tambak di desa Mororejo, Kaliwungu) telah diselesaikan dengan pemberian ganti kerugian dan perbaikan tambak. Sebenarnya masalah dengan bagian tanah milik petani Desa Mororejo belum

Akhirnya penyelesaian masalah abrasi :

Masalah-masalah yang terjadi dalam pelaksanaan ADR adalah kurang bersatunya masyarakat korban dalam setiap negosiasi, lambatnya keterlibatan pihak ketiga netral serta seringnya pihak KLI tidak hadir dalam perundingan.. Dalam hal ini telah terjadi pertemuan kurang lebih 12 (dua belas) kali antara masyarakat dengan PT. KLI. Namun demikian permasalahan hanya diselesaikan dalam bentuk uang tanpa adanya upaya perbaikan lingkungan. Bahkan dari kesaksian korban yang mendapatkan bantuan sebesar Rp. 110.000,00 disampaikan bahwa mereka diminta datang di sebuah rumah makan di Kecamatan Tugu, terus diminta menandatangani surat perjanjian lalu diberi uang. Tanpa sekalipun diberi kesempatan membacanya.

## **2. Masalah – masalah serta solusi yang timbul dari pelaksanaan ADR**

merasa kaget karena menurut laporan dari Pemerintah Daerah Tingkat I Propinsi Jawa Tengah bahwa permasalahan *abrasi* di Mangunharjo sudah selesai. Di sinilah pokok permasalahannya, selama perbaikan *ekologi* dan perbaikan kinerja pabrik belum ditangani secara tuntas maka permasalahan *abrasi* akan selalu ada, apalagi daerah tambak kali Santren sangat dekat dengan areal pabrik KLI ( $\pm 750$  m sebelah timur PT. KLI).

selesai karena ada tambak milik lembaga kali Santren seluas 2 Ha. yang tidak mendapat haknya (tambak ini adalah tambak yang dibeli oleh warga di sekitar kali Santren dijadikan saluran pembuangan air dan disebut sebagai "lak (muara) wedhus.

2. Sementara pada 3 Januari 1999 tiba-tiba muncul perjanjian antara PT. KLI dengan petani tambak Desa Morejo (12 orang), diperantarai oleh Mundjilin, dan pihak KLI membayar bantuan sebesar Rp. 110 juta sebagai penyelesaian yang ada pada 3 Januari 1999.

3. Sementara 10 orang warga lainnya { Hj. Aniatun/Sutedjo, H. Usman, Suyud/Sumiat, Zaenudin, tanah tambak Penda Kotamadia Semarang, Ferawati, adik Mundjilin (warga Mangunharjo)}, {Choiril, Eko Restu, Khoil, Abu A/H. Toha/Sobirin-Sobah, Zaenuri (warga Mangkang Wetan)} tidak dilikutsertakan.

Di sini yang menjadi masalah adalah bukan permasalahan tali asih namun lebih ke kesinambungan mata pencaharian masyarakat dan kelestarian fungsi lingkungan. Tali asih uang yang selalu diberikan dan menjadi senjata KLI, dan didukung penuh oleh birokrasi tidak pernah menyurutkan perjuangan massa rakyat. Karena kelestarian lingkungan hidup yang menjadi harapan masyarakat..

Ditengah perjalanan negosiasi (yang memakan waktu  $\pm$  2 tahun), PT. KLI tidak pernah datang lagi dan hanya mau memberikan tali asih saja, tanpa mengikutkan para pihak, dan tali asih hanya diselesaikan antara PT. KLI, Gubernur (diwakili Wagub I Pak Ahmad), dan masyarakat korban (16 orang). Pada Desember 2001 (dua hari sebelum hari raya 'Iedul Fitri) PT. KLI membayar bantuan sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan permasalahan dianggap sudah selesai. Di sini kelihatan bahwa PT. KLI melakukan manipulasi masalah, sehingga substansi yang sebenarnya (Ekologi & Kinerja Pabrik) tidak tersentuh sama sekali, sehingga *abras* akan berjalan terus seiring dengan perjalanan waktu.

Pada hari Jum'at tanggal 19 April 2002 masyarakat Fokalis diundang DPRD Tingkat I Propinsi Jawa Tengah untuk diajak rapat Komisi dengan Bappedalda tingkat I Propinsi Jawa Tengah yang dipimpin oleh Ketua Komisi D Pak Gatot (sekarang diganti Warisno) yang menghasilkan keputusan :

1. Pada bulan Agustus 2002 pesisir Mangunharjo akan dibuatkan sabuk pantai sementara pada perubahan anggaran, dan akhir bulan April 2002 akan diajak studi banding ke Tegal.
2. Pada Tahun Anggaran 2003 pesisir Mangunharjo mulai dari sungai Plumbon ke timur sepanjang  $\pm$  5 km akan dibuatkan sabuk pantai permanen.

Pada hari Senin 10 Juni 2002 Fokalis datang ke DPRD Tingkat

Propinsi Jawa Tengah akan menanyakan tindak lanjut penanganan sabuk pantai sementara dan studi banding sabuk pantai di Tegal. Pada jam 11.00 WIB, 4 (empat) orang delegasi Fokalis dan seorang dari LBH Semarang ditemui oleh Warisno (Ketua Komisi D sekarang), Gatot (mantan Ketua Komisi D), Suparno dan Bona Ventura (keduanya anggota Komisi D). Dalam pertemuan itu Ketua Komisi D Bapak Warisno menyatakan :

1. Komisi D tidak pernah berjanji pada masyarakat untuk mengajak studi banding ke Tegal, itu pernyataan pribadi Gatot.

2. Komisi D belum pernah mengagendakan pembuatan sabuk pantai, baik yang sementara maupun permanen, itupun pernyataan pribadi

Gatot.

Dalam pertemuan itu anggota Komisi D Bona Ventura dengan gagahnya berkata pula, "Ini kan urusan Bappedalda (eksekutif) bukan urusan DPRD, seperti saya ini kan seorang dosen yang tidak tahu teknik sabuk pantai, hanya kami mengamankan uang negara pada perubahan anggaran Juli nanti".

Inilah ironisnya masyarakat kecil yang selalu menjadi *bola ping-pong* sehingga sulit mencari kepastian. Walaupun demikian masyarakat petambak kali Santren tetap berjuang sampai pembuatan sabuk pantai permanen berhasil dilakukan.

Pada 26 Juni 2002 Bappedalda beserta PPLH Undip mengundang

Fokalis yang didampingi oleh LBH dan mahasiswa Fakultas Hukum Undip di Balai Kelurahan Mangunharjo Kecamatan Tugu Kota Semarang guna membahas dan meninjau rencana pemasangan *trucuk bambu* di lokasi tambak yang *kena abrasi*. Waktu itu banyak wartawan datang dari berbagai media cetak (Kompas, Suara Merdeka, Wawasan dll) maupun elektronik (RCTI). Hanya sayangnya *kontribusi* PT. KLI dalam penanganan ekologi itu tidak mau dilibatkan. Yang paling menakutkan adalah perkiraan DR. Ir. Sutrisno Anggoro, MS. (Dekan Fakultas Perikanan dan Kelautan UNNDIP) bila abrasi tidak segera ditangani areal tambak Mangunharjo akan menjadi teluk dan kemungkinan besar perkampungan akan tenggelam, dan cara penanggannya harus satu *Study Evaluasi Lingkungan (SEL)* yaitu lurukan sungai Wakak, hilangkan reklamasi pantai dan tidak ada penyedotan pasir.

Dalam pertemuan itu dibahas masalah anggaran pemasangan Trucuk Bambu dan penanaman *Mangrove* yaitu Perubahan Anggaran bulan Juli 2002 dengan rencana anggaran Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). Rencana penanganannya pada bulan Agustus 2002. Dan untuk *sea wall* (sabuk pantai) yang permanen akan dianggarkan pada Tahun Anggaran 2003 dengan panjang 5 km dengan dana dari APBD TK. II, APBD TK I dan APBN sebab dananya besar sekali sedang daerah tidak kuat menanggungnya sendiri..

a. Jumlah Penduduk

Data monografi triwulan ketiga desa / kelurahan kajian memperlihatkan bahwa desa Morejo memiliki (wilayah seluas 1.435,095 ha, dengan jumlah penduduk 6.285 jiwa 50,7% diantaranya perempuan) dan terdiri dari 1.633 kepala keluarga. Desa Wonorejo yang memiliki luas 1.205,216 ha berpenduduk 3.181 jiwa (49,7% diantaranya perempuan) yang terdiri dari 775 kepala keluarga. Kelurahan Mangkang Kulon yang berpenduduk 2.885 jiwa (49,3% diantaranya perempuan) memiliki wilayah seluas 398 ha, sedangkan kelurahan Mangunharjo dengan luas wilayah 482,37 ha berpenduduk

Kondisi desa yang dikaji adalah sebagai berikut :

/ kelurahannya.

Gambaran rona sosial difokuskan di empat desa / kelurahan, yakni desa Morejo dan Wonorejo Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal dan Kelurahan Mangkang Kulon dan Mangunharjo, Kecamatan Tugu Kota Semarang. Gambaran rona dalam uraian ini meliputi gambaran demografis dan persepsi masyarakat tentang pemanfaatan pantai di desa

### 3. Implikasi Ekonomis Keberadaan PT KLI Terhadap Masyarakat

Namun demikian dalam perubahan anggaran yang diajukan Pemerintah ke hadapan Dewan, ternyata anggaran rehabilitasi tersebut diperuntukkan bagi seluruh Pantura, sehingga upaya negara melindungi rakyatnya dari tekanan modal diragukan. Sebab dari beberapa kali pertemuan tampak keengganan Pemerintah menindak PT. KLI.

Dari komposisi penduduk menurut umur, dapat diketahui angka beban ketergantungan penduduk (*dependency ratio*), yakni salah satu indikator ekonomi suatu wilayah yang memperlihatkan gambaran

Tabel di atas dapat disimak bahwa untuk usia kelompok balita presentase tertinggi di Kelurahan Mangunharjo, kelompok usia sekolah dapat dikatakan seimbang diantara empat desa / kelurahan kajian, yakni 15 – 20% dari jumlah keseluruhan penduduk. Untuk kelompok usia kerja dua desa memperlihatkan angka sekitar tujuh puluh persen dan dua kelurahan sekitar enam puluh persen, sedangkan untuk kelompok usia lanjut tertinggi ada di Kelurahan Mangkang Kulon.

Sumber : Monografi desa / Kelurahan Triwulan III, 2000

Kelompok Umur	Mororejo	Wonorejo	Mang. Klin	Mangunharjo
0 - < 5 th	344 ( 5,5% )	321 ( 10,1% )	215 ( 9,4% )	843 ( 17,1% )
Usia sekolah	1.342 ( 21,4% )	500 ( 15,7% )	447 ( 19,6% )	1.008 ( 20,4% )
Usia kerja	4.404 ( 70,1% )	2.263 ( 71,1% )	1.436 ( 62,8% )	2.985 ( 60,4% )
Usia lanjut	195 ( 3,1% )	97 ( 3,1% )	187 ( 8,2% )	107 ( 2,2% )
Jumlah	6.285 ( 100% )	3.181 ( 100% )	2.285 ( 100% )	4.943 ( 100% )

Distribusi Penduduk Menurut Kelompok Umur

Tabel 3.1

4.943 jiwa (50,23% perempuan). Secara rinci gambaran jumlah penduduk di desa/ kelurahan yang dikaji tersaji pada Tabel 3.1 berikut.

Dilihat dari tingkat pendidikan penduduk empat desa / kelurahan yang dikaji dapat dikatakan masih rendah, karena presentase penduduk tingkat sekolah dasar masih tinggi. Tingkat pendidikan penduduk secara rinci tersaji pada Tabel 3.2. berikut ini.

#### b. Pendidikan

Wonorejo yang paling baik. Mangunharjo adalah yang paling kurang baik, sedangkan desa indikator angka ketergantungan tingkat kesejahteraan di Kelurahan beban 66 penduduk non-produktif. Dengan demikian maka dari penduduk produktif di Kelurahan Mangunharjo harus menanggung menanggung beban 59 penduduk non-produktif, dan setiap 100 Setiap 100 penduduk produktif di Kelurahan Mangkang Kulon harus Wonorejo harus menanggung beban 40 penduduk non-produktif. penduduk non- produktif ; setiap 100 penduduk produktif di desa penduduk produktif di desa Morejo harus menanggung beban 43 (pembulatan dari 65,6). Angka tersebut bermakna bahwa setiap 100 Kulon 59 (pembulatan dari 59,1) dan Kelurahan Mangunharjo 66 42,7), Desa Wonorejo 40 (pembulatan dari 40,1), Kelurahan Mangkang Angka ketergantungan Desa Morejo adalah 43 (pembulatan dari tahun ditambah penduduk usia 65 tahun ke atas.)

15-65 tahun ) terhadap penduduk usia non- produktif ( usia ( 0 - < 15 berapa beban tanggungan penduduk usia produktif atau usia kerja (



c. Matapencarian

Sektor pertanian masih merupakan mata pencaharian bagi sebagian besar penduduk di desa /kelurahan yang dikaji, utamanya untuk Desa Wonorejo. Meskipun pertanian banyak ditekuni oleh penduduk di desa / kelurahan yang dikaji namun dapat disimak bahwa presentase mata pencaharian sebagai buruh tani cukup tinggi, utamanya di Desa Wonorejo dan Kelurahan Mangkang Kulon. Selain sektor pertanian, sektor industri (sebagai karyawan) juga banyak ditekuni oleh penduduk dan hal tersebut dimungkinkan oleh karena memang di sekitar desa / kelurahan merupakan kawasan industri. Gambaran matapencarian penduduk empat desa / kelurahan yang dikaji disajikan pada Tabel 3.3.berikut ini.

Sumber : Monografi Desa / Kelurahan Triwulan III, 2000

Kelompok Umur	More	Wonorej	Mengkang	Mangun harjo
Jumlah	100	100,0	100	100
7. Akademi / PT	3,8	1,1	1,3	1,0
6. Tamat SLTA	6,5	5,1	5,1	15,0
5. Tamat SLTP	15,3	6,2	8,5	8,2
4. Tamat SD	54,2	57,4	52,3	30,1
3. Tidak tamat SD	13,3	13,9	16,1	18,5
2. Belum tamat SD	2,5	8,7	14,1	14,8
1. Tidak sekolah	4,3	7,6	2,5	12,4

Distribusi Penduduk Menurut Kelompok Umur.

Tabel 3.2.

Seperti diketahui bahwa keempat desa / kelurahan yang dikaji merupakan desa pantai, sehingga ada sebagian warganya yang menandakan hidup dari hasil laut dan tambak. Di Desa Morejo terdapat 747,472 ha tambak ( 52,1% dari luas wilayah), sedangkan Desa Wonorejo kurang lebih 40% wilayahnya berupa tambak. Luas tambak Kelurahan Mangkang Kulon 181 ha (45,5% dari luas wilayah) dan luas tambak Kelurahan Mangunharjo tercatat 226,072 ha (46,9% dari luas wilayah). Hasil tambak yang lebih baik dibandingkan dengan hasil pertanian (yang umumnya ditanami udang Windu) mendorong

Sumber : Monografi Desa / Kelurahan Triwulan III, 2000

Kelompok	Umur	1. Petani Pemilik	2. Buruh Tani	3. Nelayan	4. Buruh industri	5. Buruh bangunan	6. Perdagangan	7. Angkutan	8. Pegawai negeri	9. Pensiunan	10. Lainnya	Jumlah
Morejo		31,2	14,8	1,6	33,8	8,4	4,7	3,9	0,7	0,2	0,6	100,0
Wonorejo		31,3	50,2	3,9	2,1	0,7	2,1	1,5	1,3	0,4	6,5	100,0
Mang.	Kln	12,5	38,1	2,4	14,6	13,4	3,1	1,9	3,9	0,5	9,6	100,0
Mangu	harjo	13,6	12,5	11,1	23,8	1,0	8,5	1,7	5,1	1,5	21,3	100,0

Distribusi Presentase Penduduk Menurut Pekerjaan.

Tabel 3.3.

Menurut para perangkat desa dan tokoh masyarakat setempat, kehadiran kedua industri di desa ini selain udang windu.

tambak umumnya digunakan untuk membesarkan nener dan ditanami yang berdampingan dengan dua perusahaan tersebut. Tambak-Pertambakan di desa ini tumbuh di dukuh Ngebum ( RW7 dan RW 8 ) Rimba Partikel Indonesia ( RPI); serta 90 tambak dan pemukiman. kegiatan industri, yakni PT. Kayu Lapis Indonesia ( PT KLI ), dan PT. Ada 2 ( dua ) pemanfaatan utama pantai Morejo, yakni : (a) untuk

#### a. Desa Morejo

desa / kelurahan. di pantai. Berikut adalah uraian persepsi masyarakat masing-masing kegiatan, baik kegiatan ekonomi maupun sosial di sekitarnya, utamanya masyarakat setempat mempersepsikan dan memahami kegiatan-terhadap pemanfaatan pantai diperlukan untuk melihat bagaimana Ngebruk Kelurahan Mangunharjo). Uraian persepsi masyarakat Desa Wonorejo, Dukuh Pondok Kelurahan Mangkang Kulon dan Dukuh dengan pantai (Dukuh Ngebum desa Morejo, Dukuh Panggangayom kelurahan yang dikaji, utamanya di dukuh atau RW yang berdekatan Kehidupan masyarakat agraris-nelayan tampak di empat desa / semakin bertambah.

luas lahan sawah semakin berkurang sementara lahan tambak warga untuk mengubah sawahnya menjadi lahan tambak, sehingga

menguntungkan warga setempat, juga mendatangkan beberapa kerugian.

Beberapa keuntungan yang dirasakan oleh masyarakat, yakni :

1. Terserapnya tenaga kerja setempat di PT. KLI.
2. Dengan adanya dua perusahaan tersebut, terdapat sebagian masyarakat yang membuka jasa pemondokan bagi tenaga kerja dari luar.
3. Tumbuh usaha di sektor informal, yakni warung / kios yang menyediakan kebutuhan makan / minum dan kebutuhan sehari-hari, meskipun dalam ukuran kecil.
4. Untuk kebutuhan pembangunan dan kegiatan desa kadang-kadang mendapat bantuan dari perusahaan. Bantuan tersebut berupa sarana olah raga, bantuan dana jika ada kegiatan olah raga, pembangunan mushola dan gedung serbaguna desa yang sekarang ini tidak dimanfaatkan oleh karena letaknya jauh dari pemukiman. Kegiatan olah raga bersama-sama juga pernah dilakukan yakni pada saat memperingati hari kemerdekaan RI.

Di samping segi positif, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh industri di wilayah Morejo, yakni :

1. Menurut para petani tambak PT. KLI kurang disiplin dalam pengelolaan limbah, sehingga limbah cair masih dapat mencemari lingkungan di sekitarnya.

2. Ada isu bahwa PT. KLI menggunakan obat-obatan yang disemprotkan ke balok-balok untuk menghilangkan runtu. Sisa-sisa obat ini diperkirakan warga telah mengganggu produktivitas tambak.

3. Tenaga kerja lokal yang direkrut oleh perusahaan belum sesuai seperti jumlah yang disarankan oleh studi SEL.
4. Limbah gergajian PT. RPI sampai ke rumah-rumah warga di Morejo, meskipun sedikit, namun lama-kelamaan cukup mengganggu.

Para nelayan Mororejo dulu sebelum normalisasi Kali Aji yang digabung dengan Kali Jangrono dan dibelokkan ke timur masih bisa memanfaatkan perahunya di kali tersebut. Namun sekarang kegiatan nelayan semakin sepi, bahkan TPI yang pernah adapun sudah mati oleh karena kegiatan nelayan juga semakin berkurang. Tumbuhnya industri di sekitar desa Mororejo, menurut para narasumber mempengaruhi kondisi lingkungan setempat, utamanya pada saat musim hujan. Peningkatan kualitas jalan dari arah jalan raya menuju ke PT. KLI dan PT. RPI secara fisik jalan semakin lama makin tinggi namun tidak diimbangi dengan pembangunan selokan di sekitarnya. Kondisi ini pada waktu musim hujan mengakibatkan tergenangnya lahan di sekitar jalan yang pada akhirnya akan mengganggu pekarangan di sekitar jalan, utamanya di dukuh Sabetan. Kadaan ini menurut para perangkat desa memang bukan semata-mata menjadi tanggung jawab PT. KLI dan PT. RPI, namun menjadi tanggung jawab bersama antara warga dan perusahaan yang membutuhkan fasilitas jalan. Di samping itu, kondisi lingkungan di musim hujan sangat dipengaruhi oleh keberadaan industri di atas, seperti kelompok PT. Texmaco, PT. Tensindo, dan PT. Indogas Raya Utama, yang di musim penghujan menyebabkan semua air mengalir ke Desa Mororejo.

Harapan kepala desa berharap industri dapat berkembang dan dalam pemanfaatan wilayah antara industri dengan masyarakat dapat berdampingan tanpa ada yang dirugikan.

b. Desa Wonorejo

tahun makin besar. Ombak yang besar inilah yang merusakkan disebabkan oleh ombak yang secara alami memang makin

1. Pendapat yang menyatakan bahwa kerusakan pantai

yang semakin parah ini, Yaitu :

kalangan masyarakat berkaitan dengan penyebab kerusakan pantai Menurut seorang narasumber ada dua pendapat yang muncul di lama makin parah dan kerusakan tambak penduduk semakin parah. Sementara itu kondisi kerusakan pantai akibat abrasi makin datangnya.

telah terkena limbah, meskipun tidak tahu limbah apa dan darimana umumnya menduga air laut yang masuk ke tambak pada saat pasang saja udang mengalami stres. Oleh karena itulah petani tambak tambak, setelah dua hari baru air dialirkan ke tambak, namun tetap dicoba cara menampung air laut di saat pasang dalam satu kolam pengaturan pengaliran, namun udang tetap saja stres. Pernah pula ini seringkali mengalami kegagalan panen. Meskipun telah dilakukan beberapa petani tambak, semenjak tahun 1997 budi daya udang windu Tambak-tambak di desa ini membudidayakan udang windu. Menurut Tanaman bakau masih dapat dijumpai di sekitar tambak penduduk. nampaknya masyarakat lebih tertarik pada kegiatan pertambakan. sebagian penduduknya menekuni pekerjaan sebagai nelayan, namun sehingga pemanfaatan pantai hanyalah untuk pertambakan. Meskipun Di pantai wilayah desa Wonorejo tidak ada kegiatan industri,

tambak karena dinding tambak tidak kuat menahan hantaman

gelombang yang secara alami memang besar.

2. Pendapat yang kedua menyatakan bahwa kerusakan diakibatkan karena pernah ada kegiatan penyedotan pasir yang dilakukan oleh PT. KLI yang menyebabkan pasir di pantai, terbawa ke laut sehingga menipiskan pasir pantai. Dengan demikian ombak akan menghantam dinding tambak dan akibatnya tambak akan rusak.

Dari uraian di atas terlihat bahwa persepsi yang muncul di masyarakat Wonorejo tentang kondisi tambak dan pantai dikaitkan dengan adanya limbah industri (namun tidak secara langsung menyebabkan industri tertentu), karena kondisi alami dan karena adanya kegiatan PT. KLI.

c. Kelurahan Mangkang Kulon

Pemanfaatan wilayah pantai Kelurahan Mangkang Kulon adalah untuk tambak. Luasan tambak di kelurahan ini makin bertambah, bahkan dalam lima tahun terakhir terjadi penambahan tambak (semula lahan sawah) kurang lebih 15 ha. Menurut sebagian besar petani tambak di kelurahan ini, produktivitas tambak semakin menurun, utamanya tambak yang terletak di pinggir pantai. Menurunnya produktivitas tambak ini menurut para petani tambak disebabkan karena :

1. Adanya limbah dari PT. KLI yang masuk ke perairan tambak.

## 2. Adanya gergajian ( grajen ) dari PT. RPI yang masuk ke tambak

dan membusuk sehingga membuat kotor air tambak. Hal ini mengganggu kehidupan tambak.

Di kelurahan Mangkang Kulon muncul persepsi bahwa industri kayu juga menyebabkan banyaknya kematian pohon kelapa di pinggir pantai. Hal ini dikemukakan oleh seorang perangkat kelurahan.

### d. Kelurahan Mangunharjo

Pemanfaatan utama pantai Mangunharjo adalah untuk lahan tambak. Seperti halnya desa Mororejo dan kelurahan Mangkang Kulon, di kelurahan Mangunrejo juga terjadi peningkatan luasan tambak. Saat ini dapat dilihat munculnya tambak-tambak baru yang semula merupakan lahan tambak. Semua ini tidak lain disebabkan oleh daya tarik hasil tambak yang dirasakan lebih menguntungkan jika dibanding dengan hasil sawah. Namun petani tambak Mangunharjo saat ini sedang menghadapi masalah kerusakan tambak dan pantai. Masyarakat setempat, utamanya petani tambak, menduga kerusakan tersebut disebabkan oleh karena kegiatan PT. KLI yakni pembelokan aliran sungai Wakak ke arah timur sepanjang 1,6 km, reklamasi pantai sejauh kurang lebih 500 m, kegiatan penyedotan pasir yang pernah dilakukan oleh PT. KLI dan pembuangan limbah (oli dan solar) serta penyemprotan obat



pada balok-balok yang menimbulkan pencemaran air di sekitar

perairan PT. KLI.

Di Kelurahan Mangunharjo juga muncul persepsi bahwa semakin sedikitnya tanaman kelapa yang disebabkan oleh kematian pohon karena kwangwung dari kayu- kayu bahan produksi PT. KLI.

Hasil dari ADR yaitu berupa ganti rugi terhadap 16 orang pemilik tambak yang rusak terlihat dalam tabel berikut :

TABEL 3.4.

Daftar penerima Tali Asih Korban Abrasi

Masyarakat Mangunhardjo dan Mangkan Wetan.

No	Nama	Jumlah Penerimaan
1	Zaenudin	Rp. 54.000.000,00
2	Zaenuri	Rp. 54.000.000,00
3	Sayudi	Rp. 37.000.000,00
4	H. Usman	Rp. 37.000.000,00
5	Eko restu Wardana	Rp 37.000.000,00
6	Atfal bin Khalil	Rp 37.000.000,00
7	Azir bin Khoiril	Rp 37.000.000,00
8	Sunarti	Rp 37.000.000,00
9	Masruri	Rp 26.500.000,00
10	Sururi	Rp 26.500.000,00
11	A. Ghozali	Rp 26.500.000,00

terhadap rakyat dan alam.

menyebabkan berubahnya lingkungan hidup yang akan berpengaruh tergantung kepada pabrik, di sektor lingkungan pendirian pabrik juga merupakan tempat hidup masyarakat dan menjadikan mereka mulai Pendirian sebuah pabrik mengakibatkan hilangnya tanah yang

### Mangunharjo Kecamatan Tugu Kota Semarang

#### 1. Format Pelaksanaan ADR antara PT KLI dengan Warga Desa

##### B. Pembahasan

tambah dengan kegiatan PT. KLI.

umumnya mengkaitkan kerusakan pantai dan penurunan produktivitas dimana dua industri berlokasi. Sedangkan di tiga desa / Kelurahan lainnya. manfaat dari keberadaan industri di wilayah pantai, yakni desa Morejo dikaji hanya ada satu desa yang secara langsung dapat merasakan saat ini muncul di kalangan masyarakat. Dari empat desa/ Kelurahan yang Demikianlah gambaran persepsi tentang pemanfaatan pantai yang

Sumber : Bapedal, 2001.

		TOTAL	Rp 500.000.000,00
16	Khoeron		Rp 16.000.000,00
15	Syarif		Rp 16.000.000,00
14	Basyari		Rp 16.000.000,00
13	Choiriyah		Rp 16.000.000,00
12	Nasikin		Rp 26.500.000,00

Begitu pula yang terjadi dengan pembangunan PT. KLI,

keberadaan pabrik ini menyebabkan kerugian materiil yang besar terhadap masyarakat. Khusus untuk Kelurahan Mangunharjo, keberadaan PT.KLI terutama reklamasi, penyedotan pasir, pembelokan sungai Wakak, dan aktivitas kapal-kapal besar yang membawa bahan baku kayu ke dalam pabrik atau produk jadi keluar pabrik, menyebabkan abrasi yang mengakibatkan hilangnya banyak tambak rakyat.

Disadari lingkungan merupakan kawasan yang vital tetapi rentan terhadap gangguan. Karena rentan terhadap gangguan menyebabkan kawasan ini mudah berubah dan berkembang secara dinamis, baik dalam skala temporal maupun skala spasial. Perubahan konfigurasi pantai di kawasan pesisir dapat disebabkan oleh kegiatan atau proses-proses alami dan non alami (kegiatan manusia), baik yang berasal dari darat maupun laut. Proses-proses *hidro-oseanografi* dari laut yang dapat memberikan pengaruh, antara lain ; hampasan gelombang, perubahan pola arus, serta fenomena pasang surut. Sedangkan fenomena alami dari darat memberikan pengaruh, antara lain ; hampasan gelombang, perubahan pola arus, serta fenomena pasang surut. Sedangkan fenomena alami dari darat yang ikut memberikan pengaruh terjadinya perubahan garis pantai, antara lain *erosi* dan *sedimentasi* akibat arus pasang akibat banjir serta perubahan alur aliran air sungai. Di samping itu ada beberapa kegiatan manusia yang berpotensi menimbulkan perubahan di kawasan pantai, antara lain ;

1. *Reklamasi* yang dilakukan oleh PT. KLI dalam rangka pengembangan pembangunan perusahaan, yang selesai dibangun tahun 1987. *Reklamasi* yang dilakukan menjorok ke tengah laut sepanjang 500 meter. *Reklamasi* laut ini kemudian digunakan untuk mendirikan bangunan pabrik pengolahan kayu. Akibatnya pembangunan daratan tanggal tersebut menyebabkan angin barat gelombang yang hanya lurus menjadi berbalik dan menggerus pantai.

Untuk menunjang peningkatan produksinya, PT. KLI telah melakukan beberapa kegiatan. Kegiatan-kegiatan tersebut adalah :

#### 1.1 Aktivitas merugikan yang dilakukan PT. KLI

- a. Pendirian bangunan yang terlalu menjorok ke laut sehingga menghalangi transport *sedimen* serta membiaskan arah arus dan gelombang.
  - b. Pengerukan/penggalian dasar perairan pantai, yang dapat merubah pola arus, mendekatkan *breaker zone* (daerah pecahnya gelombang) pada garis pantai serta meningkatkan kecepatan/daya gelombang dan kekuatan gelombang yang menghantam pantai.
  - c. Pemblokiran alur sungai atau perubahan *estuair* (muara), yang dapat merubah abrasi / erosi dan sedimen di kawasan pantai<sup>45</sup>.
- Sehingga pembangunan di pesisir seperti yang di lakukan oleh PT. KLI apalagi tindakan-tindakan di atas akan merugikan kepentingan lingkungan.

## 2. Pembelokan sungai Wakak sekitar 90% dan di masukan ke alam

*sungai Regasi /S Plumbon* . Sementara muara sungai yang asli di jadikan *jog pond* oleh PT KLI. Pembelotan tersebut mengakibatkan luapan air dari Kaliwungu yang seharusnya apabila sungai lurus air akan langsung ke laut, sementara dengan pembelotan aliran sungai maka luapan air akan menyebabkan air tersebut menggenang dan menggerus tambak.

Pembelokan sungai ini bermula dari upaya pemerintah untuk melakukan penanggulangan banjir di wilayah Kaliwungu Kendal. Untuk melakukan penanggulangan tersebut, pemerintah yang diwakili oleh Ir. Sohardi, Dipl, selaku Pemimpin Proyek Irigasi Semarang Barat (PISB) pada tanggal 18 Februari 1987 melakukan kerjasama dengan PT KLI yang diwakili oleh Agus Sutanto (Direktur) untuk melakukan perbaikan pada sungai Slembung. Perjanjian kerjasama tersebut diketahui oleh Sudono Yusuf B.A (Bupati Tk. II Kendal) H. R. Sigit Raharjo (Kakanwil DPU Jawa Tengah) dan Drs. H. Soeparto Wakil Gubernur KDH Tk. I Jawa Tengah . Perjanjian kerjasama tersebut didasarkan pertemuan tanggal 17 –2 – 1987 di Kantor PEMDA Tk. I Jawa Tengah, yang dipimpin oleh Wakil Gubernur KDH Tk. I Jawa Tengah.

Isi perjanjian tersebut adalah, *detail design* kali Slembung dibuat PISB sekaligus melaksanakan supervisi atas pelaksanaan proyek tersebut. PT KLI berkewajiban untuk melaksanakan desain tersebut paling

lambat akhir 1987 sedemikian rupa sehingga saluran tersebut dapat

bertungsi sepenuhnya sebagai saluran pembuang banjir.

Batas pembelokan adalah 100 m dari sudut timur batas pagar

batas areal PT KLI. Apabila sampai batas waktu yang ditentukan (akhir Desember 1997) PT KLI tidak mampu melaksanakan kewajibannya, maka

pihak PISB akan melaksanakan perbaikan tersebut sesuai dengan rencana awal. Selanjutnya PT KLI tidak akan melaksanakan kegiatan-

kegiatan yang diperkirakan akan mengubah bentuk maupun aliran dari sungai tanpa ijin tertulis dari instansi berwenang. Dan PT KLI menyadari

bahwa menurut UU yang berlaku bahwa penguasaan sungai dan muaranya baik yang lama dan yang baru adalah tetap di tangan negara.

Masalah-masalah yang timbul kemudian akan diselesaikan secara musyawarah antara masing-masing pihak.

Berdasar perjanjian tersebut seharusnya proses penyudetan sungai Slembung sebagai saluran pembuangan banjir tersebut adalah

menyusur sebelah timur PT KLI. Tapi secara sepihak PT KLI telah menjadikan muara sungai bersangkutan sebagai "log pond" (tempat

penimbunan kayu). Batasan teknis tersebut berupa pemboran mulai 100 m dari sudut selatan timur pagar batas areal PT KLI sampai ke pantai.

Tetapi kenyataan yang terjadi adalah PT KLI melakukan pelanggaran terhadap perjanjian tersebut dengan memblokirkan Sungai

Slembung sejauh 1,6 km. Pemblokiran sungai tersebut berpengaruh dengan tambak-tambak di sekitar sungai baru tersebut. Mulai tahun 1989

## 1.2 Pelanggaran Hukum Yang dilakukan PT KLI

Selain keempat aktivitas di atas, PT KLI juga melakukan pembuangan limbah cair dan limbah padat. Limbah cair yang dibuang, berupa oli pelumas bekas mesin kapal, sisa-sisa *glue* (*lem*) dan limbah hasil penyemprotan kayu untuk menjaga keawetan kayu *log* (kayu gelondongan).

satu bagian dari penyebab terjadinya *abrasi pantai*. Dan diduga bahwa *jalur tongsang* inilah adalah salah satu bagian dari penyebab terjadinya *abrasi pantai*. Selain keempat aktivitas di atas, PT KLI juga melakukan pembuangan limbah cair dan limbah padat. Limbah cair yang dibuang, berupa oli pelumas bekas mesin kapal, sisa-sisa *glue* (*lem*) dan limbah hasil penyemprotan kayu untuk menjaga keawetan kayu *log* (kayu gelondongan).

Munculnya dermaga atau pelabuhan baru yang diperkirakan dalam setiap harinya kurang lebih 5-6 kapal pengangkut kayu. Yang menarik bahwa kapal-kapal tersebut dalam aktivitas bongkar muat tidak dilakukan di pelabuhan Tanjung Mas Semarang, tetapi dilakukan secara langsung lewat pengangkutan Kapal Tongkat yang ditarik dengan kapal kecil (sejenis patroli). Sedikitnya ada sekitar 4 sampai 5 kapal penarik kapal tongsang yang dimiliki oleh PT KLI. Aktivitas bongkar muat secara langsung ini telah berjalan sekitar tahun 1991 tanpa dilengkapi dengan ijin dari instansi-instansi yang pemerintah yang berwenang untuk memberikan surat ijin kepada pihak PT KLI untuk melangsungkan kegiatan. Dan diduga bahwa *jalur tongsang* inilah adalah salah satu bagian dari penyebab terjadinya *abrasi pantai*.

memperhatikan kedalaman *log pond*. Selain itu digunakan juga untuk lapisan kayu lapis tak terpakai. Selain itu digunakan juga untuk menimbulkan limbah PT KLI yang berupa *sludge* dan potongan kayu serta rusaknya tanggul. Penyedotan pasir, aktivitas ini dilakukan untuk *rob* menggenangi tambak-tambak petani (52 Ha) dan menyebabkan

**a. UU No. 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang**

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa pendirian PT. KLI jelas-jelas melanggar Rencana Umum Tata Ruang Kabupaten Kendal, sebab daerah tersebut merupakan daerah tambak bukan daerah yang ditunjuk sebagai kawasan industri.

**b. Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup**

Pasal 6 ayat (1) dimana setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa apa yang telah dilakukan oleh PT. KLI jelas-jelas mengabaikan kewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup apalagi mencegahnya. Ini dapat dilihat dari adanya rencana antispasi dalam Studi Evaluasi Lingkungan (SEL), Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) maupun Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) akibat perubahan pola arus angin dan gelombang setelah didirikannya. Padahal dalam SEL jelas disebutkan bahwa dengan pembangunan reklamasi akan mempengaruhi pola arus angin dan gelombang laut.

Pasal 15 dimana kewajiban memiliki AMDAL bagi usaha/kegiatan yang memiliki dampak besar dan penting.

Pasal 18 dimana setiap usaha dan/atau kegiatan wajib memiliki AMDAL untuk memperoleh ijin usaha dan/atau kegiatan.



Fakta di lapangan menunjukkan bahwa perubahan aliran sungai hanya berdasarkan pada perjanjian antara Proyek Irigasi Semarang Barat (PISB) dengan PT. KLI berkaitan dengan normalisasi sungai Wakak. Itu pun kemudian diingkari oleh PT. KLI dengan memblokir sungai sejauh 1,6 kilometer. Dengan adanya surat Gubernur KDH Tingkat I Jawa Tengah No. 050/014193/90 tertanggal 28 Februari 1990 tersebut dapat diartikan bahwa Gubernur (pejabat yang berwenang) secara implisit sebenarnya tidak mengijinkan pemblokiran sungai tersebut.

dari pihak yang berwenang

Pasal 25 dimana larangan mengubah aliran sungai kecuali jika

**c. PP No. 35 Tahun 1991 tentang Sungai**

untuk memblokir sungai Wakak ini.

sekitar sungai Wakak, sehingga PT. KLI seharusnya membuat AMDAL dapat diperkirakan apa akibat pemblokiran sungai bagi tambak-tambak merugikan rakyat (petani tambak). Padahal PT. KLI seharusnya sudah secara implisit tidak menyetujui pemblokiran sungai sebab dapat keras terhadap perbuatan PT. KLI ini menunjukkan bahwa Gubernur 050/014193/90 tertanggal 28 Februari 1990 yang memberikan peringatan berdasarkan surat Gubernur KDH Tingkat I Jawa Tengah No. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa pemblokiran sungai

**d. PP 27 Tahun 1990 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan**

Pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa usaha dan/atau kegiatan yang kemungkinan dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, meliputi penguubahan bentuk dan bentang alam.

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa pembelokan sungai Wakak tidak memiliki dokumen AMDAL. Padahal PT. KLI sudah dapat memperkirakan bahwa pembelokan sungai dan reklamasi pantai menimbulkan perubahan perilaku arus laut dan angin, yang pada akhirnya berdampak pula pada perubahan garis pantai.

**e. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. Kep**

**45/MENLH/11/1999 tentang Program Pantai Lestari**

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa pembelokan sungai, reklamasi pantai dan pengerukan pasir telah berakibat pada rusaknya wilayah pantai. Dan PT. KLI tidak melakukan tindakan pencegahan namun justru membiarkan perusahaan terjadi. Ini dilihat pada tidak ada upaya dari PT. KLI untuk mempertahankan kondisi pantai dan populasi hutan bakau yang menjadi penghalang arus laut agar tidak merusak tambak-tambak.

Apabila kita melihat format penyelesaian yang dilakukan oleh beberapa komponen masyarakat baik korban maupun PT KLI dengan menyertakan pihak-pihak lain maka sebagaimana yang kita ketahui bisa merupakan campuran bentuk dari ADR antara model *negosiasi* dan *mediasi*.

Menurut *Grenville Wood*, cara ini pada pokoknya diartikan sebagai suatu proses penyelesaian sengketa dengan bantuan pihak ketiga yang netral dalam upaya negosiasi penyelesaian sengketa tersebut. Dengan

penyelesaian negosiasi. Akan tetapi mendekati pula format mediasi. maka format penyelesaiannya hampir sama dengan ciri-ciri model Melihat berlarut-larutnya perundingan antara kedua belah pihak menciptakan ketegangan dan tekanan terhadap pihak lawan.

5. Seringkali menggunakan yang berlebihan, kasar, menggunakan ancaman, *bluff* dan melemparkan tuduhan-tuduhan untuk mengganggu perunding lain sebagai musuh atau lawan;

4. Secara psikologis perunding yang menggunakan teknik ini

3. *Konsepsi* diberikan sangat langka/jarang atau terbatas.

dilangsungkan.

2. Menjaga tuntutan agar tetap tinggi sepanjang proses *negosiasi*

1. Mengajukan permintaan awal yang tinggi pada awal *negosiasi*

seorang *negotiator kompetitif* adalah sebagai berikut :

Teknik *negosiasi* yang kompetitif seringkali diistilahkan dengan teknik *negosiasi* yang bersifat alot (*tough*) dimana unsur-unsur yang menjadi ciri

pihak ketiga yang berwenang mengambil keputusan (*arbitrase*).<sup>65</sup>

Dimana *negosiasi* merupakan sarana bagi pihak-pihak yang ketiga yang tidak berwenang mengambil keputusan (*mediasi*) maupun bersengketa untuk melakukan penyelesaiannya tanpa keterlibatan pihak

cara ini, para pihak mencari seorang atau *tim mediator* dengan cara seperti mencari pengacara yang dapat diterima oleh semua pihak.<sup>66</sup>

Seorang *mediator* pada prinsipnya akan membantu para pihak yang bersengketa untuk menyepakati suatu kesepakatan yang berorientasi ke depan sesuai kebutuhan dan memenuhi rasa keadilan. *Mediator* tidak memiliki kewenangan campur tangan untuk memutuskan dan menentukan hasil akhir kesepakatan karena para pihak yang bersengketa itu sendiri yang harus melakukannya.

Aspek yang paling penting dalam proses *mediasi* adalah adanya kesediaan para pihak untuk berunding menyelesaikan sengketa secara jujur dan dapat diterima semua pihak. Dengan mengadakan perundingan secara jujur ini, para pihak akan saling mengetahui hak-hak dan kewajibannya, dengan demikian akan memahami keprihatinan masing-masing.

Keterlibatan serta kesediaan berbagai pihak untuk berunding memecahkan masalah juga sesuai dengan ciri model penyelesaian lewat jalan mediasi, sehingga bisa disimpulkan bahwa format penyelesaian sengketa kasus tersebut menggunakan model campuran antara negosiasi dan mediasi.

Penyelesaian masalah melalui jalur di luar pengadilan ini menurut Mas Achmad Santosa (1998) merupakan penegakan hukum lingkungan perdata.

---

<sup>66</sup> Hadimulyo, *Loc. Cit.* hal 381

Selanjutnya penyelesaian sengketa melalui jalur ADR sangat menguntungkan masyarakat Mangunhardjo sebagaimana sesuai dengan pendapat dari Philip D. Bootstwick yang menyatakan bahwa :

- 1) Memungkinkan sengketa-sengketa hukum diselesaikan di luar pengadilan untuk keuntungan atau kebaikan para pihak yang bersengketa sendiri
- 4) Mengurangi biaya dan keterlambatan kalau sengketa tersebut diselesaikan melalui *ligitasi konvensional*
- 5) Mencegah agar sengketa-sengketa hukum tidak dibawa ke pengadilan<sup>67</sup>

Peran serta masyarakat dalam proses perundingan sudah cukup bagus dan membantu keberhasilan dalam proses negosiasi dan mediasi. Hal tersebut seperti diungkapkan oleh Lothar Gunding<sup>68</sup> mengenai bentuk dari peran serta masyarakat yaitu :

1. Memberi informasi kepada pemerintah
  2. Meningkatkan kesediaan masyarakat untuk menerima keputusan
  3. Membantu perlindungan hukum
  4. Mendemokratisasikan pengambilan keputusan
- Melihat proses penyelesaian tersebut maka sesuai dengan Pasal 30-33 UU No 23 Tahun 1997 tentang ADR yaitu :
1. ADR merupakan pilihan (*optional*) dan bukan merupakan kewajiban (*mandatory*).

<sup>67</sup> Hadimulyp, *Loc.Cit.*

<sup>68</sup> Koesnadi Hardjasoemantri, *Loc.Cit.*

1. Penyelesaian masalah hanya berupa uang tanpa perbaikan lingkungan. Ini mencerminkan perbedaan keinginan kedua belah pihak mengenai substansi dari penyelesaian masalah. Di sini bisa

bisa disimpulkan terdapat berbagai hal seperti:

Melihat berbagai masalah dan solusi yang dikemukakan di atas maka

## ADR.

### 2. Masalah-masalah serta solusi yang timbul dari pelaksanaan

7. Pembentukan lembaga penyedia jasa, pelayanan penyelesaian sengketa yang dibentuk oleh pemerintah (untuk kepentingan publik) maupun swasta berlandaskan kepada prinsip ketidakberpihakan dan profesionalisme.
6. Prasyarat minimal *mediator* (penengah) yaitu sifat kemandirian dan (*mediasi*) maupun perwasitan (*arbitrase*).
5. ADR dapat ditempuh melalui perundingan (*negosiasi*), perantaraan tidak terulang kembali dampak negatif).
4. Obyek penyelesaian sengketa yang diupayakan melalui ADR dapat mencakup ganti rugi dan atau tindakan *mitigasi* (mencegah agar upaya ADR dinyatakan tidak berhasil).
3. Larangan untuk menempuh jalur penyelesaian pengadilan apabila ADR sedang diupayakan (jalur pengadilan dapat ditempuh apabila ADR tidak dapat diterapkan dalam kasus pidana lingkungan.

terlihat perbedaan kepentingan antar kedua pihak serta keinginan

dari para mediator dalam konflik tersebut. Akan tetapi di sini mediator tidak mempunyai kekuatan untuk membuat atau memaksakan keinginan kepada salah satu pihak atau membuat kesepakatan tersendiri.

2. Berlarut-larutnya masalah penyelesaian kasus tersebut tidak lepas dari model pendekatan ADR yang digunakan oleh masyarakat. Disamping hal tersebut juga kesadaran masyarakat untuk melibatkan pihak ketiga dalam perundingan sangat menentukan tingkat keberhasilan dari penyelesaian kasus tersebut.

3. Keterlambatan turut campur pihak ketiga menjadi faktor dari lamanya penyelesaian masalah tersebut.

4. Adanya pihak-pihak yang menyatakan belum selesainya masalah tersebut menyiratkan perundingan-perundingan yang dilakukan belum memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tiga masalah yaitu kurang bersatunya masyarakat korban dalam setiap negosiasi, lambatnya keterlibatan pihak ketiga netral serta seringnya pihak KLI tidak hadir dalam perundingan. Hal tersebut diakibatkan oleh perbedaan kepentingan dalam masyarakat korban sendiri. Sebenarnya hal tersebut wajar terjadi dalam sebuah masyarakat yang terlibat suatu konflik. Perpecahan dalam masyarakat dalam praktek di lapangan mengganggu proses penyelesaian sengketa.

Untuk persoalan lambatnya keterlibatan pihak ketiga netral lebih

disebabkan karena sistem pemerintahan yang berkuasa di Indonesia. Gelombang reformasi tahun 1998 berimplikasi pada tingkat kesadaran masyarakat untuk melibatkan pihak ketiga dalam kasus yang mereka alami. Seringnya PT KLI tidak hadir dalam perundingan menunjukkan bahwa dalam perundingan ADR masyarakat korban yang harus aktif untuk melakukan inisiatif pertemuan.

Solusi dari akhir ADR yang diberikan adalah berupa ganti kerugian sejumlah Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah). Peran pemerintah sangat besar dalam memberikan solusi atau jalan keluar dari permasalahan yang terjadi. Walaupun kompensasi untuk rehabilitasi lingkungan hidup tidak pernah diberikan.

Hal tersebut tidak terlepas dari pada kendala penegakan hukum seperti yang diungkapkan oleh Koesnadi Hardjasoemantri<sup>69</sup> yang menyatakan bahwa :

1. Pemasyarakatan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkungan hidup kurang memadai selama ini masyarakat kurang mengetahui hak dan kewajibannya.

2. Aparat penegak hukum, yaitu meliputi, pertama, pejabat yang berwenang memberi izin, kedua, polisi, ketiga, jaksa, keempat, hakim, dan kelima, pengacara/konsultan hukum kurang tanggap terhadap perkembangan hukum lingkungan.

---

<sup>69</sup> Koesnadi Hardjasoemantri, *Loc.Cit.*



### 3. Beberapa ketentuan Undang-Undang Lingkungan Hidup,

terutama yang berkaitan dengan penegakan hukum kurang

ada penjabaran secara jelas.

Secara umum, penegakan hukum lingkungan menurut Harun M,

Husein akan terkait dengan beberapa kendala, yakni : <sup>70</sup>

#### 1. Sarana Hukum

Peraturan hukum hasil manusia tidak mungkin akan dapat mencapai kesempurnaan, terlebih lagi yang kesempurnaan bersifat hakiki. Hal ini disebabkan karena kemampuan manusia dalam menciptakan produk hukum dibatasi oleh kemampuan yang bersifat manusiawi. Namun demikian, berdasarkan pengalaman sekali pun banyak peraturan hukum yang mengandung kelemahan atau kekurangan, tetapi dalam kenyataannya peraturan hukum tersebut dapat berhasil mendekati rasa keadilan.

Dalam hal ini perlu ditegaskan bahwa hukum itu hanya sebagai sarana belaka. Karena itu, kalau hukumnya baik maka tersedia sarana yang baik. Agar kebaikan dapat terlaksana secara nyata, maka sarana yang ada perlu diterapkan dan digunakan sebaik-baiknya. Dalam hal ini terlaksananya kebaikan secara nyata tergantung dari kehendak dan perbuatan nyata manusia yang dapat ditunjang oleh hukum.

Menurut M. Danusastro (1985) hukum yang baik belum menjamin bahwa kebaikan akan sungguh-sungguh dapat terlaksana, tanpa manusia

---

<sup>70</sup> Harun M. Husein, *Loc.Cit.*

mau dan mampu melaksanakannya secara seksama. Oleh karena itu, di samping perlu disusun hukum yang baik, maka perlu pelaksanaannya secara nyata.

## 2. Aparat Penegak Hukum

Dalam hal ini akan terkait pada aspek kuantitas dan kualitas aparat penegak hukum. Kuantitas berkaitan dengan jumlah atau lengkap tidaknya aparat penegak hukum yang ada. Sedang kualitas berkaitan dengan kemampuan dan kemahiran (*professionalisme*) aparat penegak hukum dalam menangani kasus-kasus lingkungan hidup. Kekurangan baik dari segi kuantitas maupun kualitas aparat penegak hukum akan sangat mempengaruhi efektivitas penegakan hukum lingkungan.

Aparat penegak hukum baik dalam arti *preventif* maupun *representatif* dalam menangani kasus pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup, di samping jumlahnya amat terbatas, juga kemampuannya masih terbatas. Saat sekarang ini aparat pemerintah yang bertugas di berbagai instansi, seperti di berbagai departemen, Pemda dan Bapedal, kebanyakan baru dapat melaksanakan tugas-tugas yang bersifat *preventif*, seperti pemantauan, pembinaan, dan peringatan. Apabila terjadi pelanggaran terhadap lingkungan hidup, mereka tidak melakukan tindakan hukum.

Kenyataan menunjukkan bahwa aparat penegak hukum, seperti penyidik, penuntut umum, dan hakim yang memahami peraturan atau ketentuan lingkungan hidup jumlahnya maupun kemampuan terbatas. Di

Fasilitas dan sarana dibutuhkan karena dalam menangani kasus-kasus lingkungan akan melibatkan berbagai perangkat teknologi canggih (peralatan laboratorium) yang untuk kepentingan operasionalnya memerlukan tenaga ahli dan biaya sangat mahal. Belum tersedianya beberapa laboratorium yang sangat memadai menyebabkan dalam pembuktian sampel yang diajukan kepada para pihak pada masing-masing laboratorium menunjukkan hasil yang berbeda-beda sehingga kalau dipakai sebagai alat bukti di pengadilan sering kali menimbulkan aparat penegak hukum, sehingga menimbulkan keragu-raguan hakim dalam menjatuhkan sanksi hukuman.

Fasilitas dan sarana lingkungan adalah alat untuk mencapai tujuan penegakan hukum lingkungan. Ketidadaan dan keterbatasan fasilitas dan sarana penunjang lainnya akan sangat mempengaruhi keberhasilan penegakan hukum lingkungan.

### 3. Fasilitas dan Sarana Lingkungan

*yang komprehensif dan integral.*

samping itu juga harus disadari bahwa persoalan aturan lingkungan hidup aspeknya sangat luas dan bersifat kompleks yang akan berkaitan dengan berbagai disiplin ilmu (*multidisipliner*). Karena itu perlu mendidik tenaga-tenaga profesional aparat penegak hukum sehingga diharapkan mereka akan mampu menangani kasus-kasus lingkungan atas dasar wawasan

#### 4. Kesadaran Masyarakat Terhadap Lingkungan

Indikator kesadaran hukum masyarakat terletak pada kepatuhan kepada ketentuan hukum. Kepatuhan dan ketaatan pada ketentuan hukum lingkungan menunjukkan efektivitas berlakunya hukum lingkungan di tengah masyarakat. Menurut Otto Soemarwoto (1989) manusia berintegrasi secara terus-menerus dengan lingkungan hidupnya di mana dalam interaksinya itu, ia mengamati lingkungan dan mendapatkan pula pengalaman. Dari pengalaman dan pengalamannya, ia mempunyai gambaran tertentu tentang lingkungan hidupnya yang disebut sebagai citra lingkungan.

Bila citra seseorang bersifat negatif, dalam arti ia tidak memahami dan menghayati betapa pentingnya kelestarian lingkungan hidup bagi kelangsungan hidup dan kehidupan, maka ia cenderung bersifat masa-bodoh terhadap lingkungan. Orang yang demikian bahkan tidak segan-segan melakukan perbuatan yang berdampak negatif terhadap lingkungannya, seperti membatat hutan, membuang limbah sesuka hatinya, menangkap ikan dengan bom atau racun, menggali batu atau pasir semau-maunya dan sebagainya.

Terbatasnya kesadaran hukum masyarakat terhadap lingkungan disebabkan pula karena keawaman masyarakat terhadap berbagai aspek lingkungan. Dalam hal ini, citra dan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan dapat dibina dan ditingkatkan melalui usaha-usaha seperti penyuluhan, bimbingan keteladanan, dan keterlibatan masyarakat dalam

menanggulangi masalah lingkungan. Untuk itu peningkatan-peningkatan kegiatan penegakan hukum yang berdimensi *edukatif dan persuasif* serta *preventif* perlu ditingkatkan dan digalakkan.

##### 5. Faktor Sosial, Politik dan Kultural

Faktor sosial, politik dan kultural akan amat menentukan berhasilnya pengelolaan lingkungan hidup dan penegakan hukum lingkungan. Berkaitan dengan faktor sosial, politik dan kultural, maka menurut Munadjat Danusastro (1980) penyebab masalah lingkungan dapat dikategorikan dalam 4 K atau *the four P*, yaitu *pertama*, kemiskinan (*poverty*), *kedua*, kepadudukan (*population*), *ketiga*, kekotoran atau kerusakan (*pollution*) dan keempat, kebijakan (*policy*).

Berkaitan dengan itu, menurut Siahaan (1987) maka faktor yang amat berpengaruh adalah faktor kemiskinan dan ledakan penduduk. Kedua faktor tersebut menduduki ranking yang paling sentral yang selanjutnya menimbulkan komplikasi yang tidak sehat pada lingkungan hidup.

Faktor sosial budaya yang dapat memberikan pengaruh terhadap lingkungan hidup adalah faktor agama dan tradisi. Setiap agama mengajarkan kepada umatnya untuk memelihara dan mengelola alam dan seisinya secara bijaksana. Alam dan isinya titipan sang Pencipta kepada manusia, karena itu harus dijaga dan dipelihara dengan sebaik-baiknya dan tidak boleh dirusak. Dengan demikian, orang yang menghayati agama akan selalu menjaga kelestarian dan keseimbangan dalam hubungannya

dengan sesama manusia, hubungannya dengan alam dan lingkungannya

dan hubungannya dengan Tuhan pencipta alam semesta.

Sementara itu menurut Hamrat Hamid, kendala dan masalah

penegakan hukum lingkungan dapat dijumpai, yakni :

1. Kemampuan teknis aparat yang belum memadai dapat menimbulkan keragu-raguan dan kelambatan dalam bertindak.

2. Kesulitan mendapatkan data yang akurat dan fakta yang relevan dengan pembuktian.

3. Pandangan bahwa daya saing industri tidak boleh dilemahkan oleh bertambahnya biaya produksi karena membuat alat pengolah

limbah.

4. Sikap "rikuh" dan "ewuh pekewuh" yang masih melekat dalam budaya masyarakat Indonesia sehingga apabila hak-hak dilanggar, termasuk lingkungannya mereka diam saja, tidak mempermasalahkan atau mengugat ke pengadilan.

5. Banyaknya peluang bagi pihak pengusaha untuk melakukan upaya penangkalan, atau mempersulit penelitian dan pemeriksaan.

6. Prasarana dan sarana yang masih terbatas, termasuk juga teknis dan biaya serta kemampuan personil.

7. Sering terjadi *intervensi* pihak ketiga yang dilakukan dengan menggunakan pengaruh dan kekuasaan. Kerahasiaan yang kurang

terjamin.

Dari aspek perdata masalah ganti kerugian memang sangat sulit

untuk dilakukan apabila mengacu pada peraturan yang ada disebabkan minimnya undang yang mengatur hal tersebut. Hal tersebut sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh Paulus Efendi Lutung<sup>71</sup> yang menyatakan bahwa dalam kenyataannya sampai dengan UU No. 4 Tahun 1982 diganti dengan UU No.23 Tahun 1997, peraturan perundang-undangan atau peraturan pelaksana yang mengatur tata cara pengaduan, tata cara penelitian dan tata cara penuntutan ganti kerugian belum pernah dikeluarkan. Hal ini menjadikan kendala dalam penegakan hukum lingkungan dari aspek hukum perdata. Banyak kasus gugatan ganti rugi yang diajukan masyarakat menjadi tidak tertampung.

Dalam masalah ganti rugi, untuk menentukan siapa yang telah melakukan perbuatan melawan hukum, menurut ketentuan hukum perdata, yakni Pasal 1243 dan Pasal 1365 KUH Perdata diatur asas *Liability based on fault*. Pasal 1243 berisi "penggantian biaya, kerugian, dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan apabila si terutang setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatan, tetap melalaikannya, atau jika suatu yang harus diberikan atau dibuatnya hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampauinya. Pasal 1365 berisi tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut

---

<sup>71</sup> Paulus Efendie Lutung, *Loc. Cit.*

### 3. Implikasi Ekonomis Keberadaan PT KLI terhadap masyarakat

sekitar.

Keberadaan industri seringkali lebih banyak merugikan masyarakat sekitar. Hal tersebut tidak terlepas dari globalisasi yaitu munculnya industrialisasi yang menyebabkan krisis lingkungan hidup. Dampak yang nyata akan terlihat bagi korban pencemaran lingkungan hidup. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Surma Djajaningrat<sup>72</sup> yang menyatakan bahwa walaupun sudah Perang Dunia II perdagangan internasional meningkat sepuluh kali lipat, namun kemiskinan di negara-negara Dunia

Ketiga tetap memprihatinkan.

Demikian pula penganjur pasar bebas mengatakan bahwa liberalisasi perdagangan adalah jalan terbaik untuk mencapai perlindungan lingkungan karena kekayaan yang dihasilkan akan membuat pemerintah mampu membiayai kegiatan pelestarian. Namun, Martin Khor Kok Peg mengatakan bahwa kalau memang demikian halnya maka perdagangan dunia secara besar-besaran selama dua dasawarsa terakhir ini seharusnya menciptakan lingkungan yang baik.<sup>73</sup> Tapi bukanlah krisis lingkungan global justru terjadi dalam dua sampai empat dasawarsa terakhir ini, mungkin saja perdagangan bebas memang meningkatkan taraf ekonomi, namun pola produksi dan konsumsi yang mendasari perdagangan saat ini justru bersifat eksploitatif dan merusak

---

<sup>72</sup> ST Djajaningrat, *Loc.cit.*

<sup>73</sup> M. Khor Kok Peng, *Loc.Cit.*



lingkungan sehingga pada akhirnya perdagangan bebas berarti meningkatkan kerusakan ekologi.

Kerusakan yang diakibatkan oleh PT KLI tidak lepas dari skenario internasional yang berimplikasi ekonomis terhadap masyarakat korban pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.

Dari hasil penelitian khususnya kompensasi terhadap masyarakat Mangunhardjo atas kompensasi yang diberikan tetap tidak membawa perubahan secara ekonomi yang baik. Hal tersebut tidak terlepas dari tidak mudahnya merubah perilaku ekonomi mereka dimana dahulu mata pencaharian enam belas orang tersebut adalah petani tambak. Sehingga ketika sumbu-sumbu ekonomi dihilangkan maka terjadi kebimbangan dalam mengelola modal yang ada.

Keterkaitan antara aspek ekonomi masyarakat korban perusahaan lingkungan hidup dengan dampak globalisasi (industrialisasi) sangat erat.

Perkembangan perdagangan antar negara dewasa ini telah membuka batas-batas kepentingan berdasarkan prinsip kedaulatan yang dimiliki suatu negara. Tak ada satu negara pun di dunia ini yang dapat melepaskan diri dari pengaruh globalisasi dan liberalisasi yang semakin merebak seiring dengan akan diberlakukannya era perdagangan bebas setelah ditandatanganinya kesepakatan putaran Uruguay (*Uruguay round*) dalam konferensi di Marrakes.

Konferensi tersebut merupakan forum perundingan internasional yang dilaksanakan dalam kerangka GATT (*General Agreement on Tariffs and*

*Trade*) yang kemudian berubah menjadi WTO (*World Trade Organisation*). Dengan demikian, ini merupakan tonggak baru dari keinginan masyarakat internasional yang diprakarsai negara-negara maju untuk memberlakukan perdagangan bebas, guna membantu pertumbuhan ekonomi dan pembangunan untuk mewujudkan kesejahteraan manusia. Konsekuensinya setiap negara dituntut untuk pandai-pandai mengantisipasi dan mempersiapkan diri baik kondisi kekuatan ekonomi dalam negeri, kawasan regional maupun lebih jauh untuk tingkat internasional.

Sebagai langkah untuk mempersiapkan diri banyak negara mulai berbenah diri dengan cara melakukan perombakan struktur ekonominya melalui kebijaksanaan deregulasi. Demikian juga, beberapa negara yang berada dalam suatu kawasan regional tertentu mulai melakukan kesepakatan antar negara, seperti kesepakatan untuk menghapus atau menurunkan hambatan terhadap *import* dan negara anggota yang satu ke negara anggota lainnya sehingga lahiriah kesepakatan regional seperti APEC (*Asia Pasific Economic Community*), AFTA (*ASEAN Free Trade Area*), NAFTA (*North American Free Trade Area*), dan Uni Eropa (*European Union*).

Kecenderungan terintegrasinya perdagangan antar negara Semakin nampak. Globalisasi dan liberalisasi merupakan suatu keniscayaan yang tidak dapat dihindari. Kaitannya dengan dinamika ekonomi antar negara, menurut Angito Abimanyu setidaknya ada (3) tiga dimensi, pertama,

globalisasi telah menyebabkan pergerakan dan mobilitas modal semakin tidak memiliki bendera dan lebih berdasarkan pada perhitungan ekonomis; kedua, globalisasi investasi mendorong tumbuh dan menyebarnya perusahaan transasional ke seluruh penjuru dunia; ketiga, terjadi pergeseran kekuatan ekonomi global yang memunculkan tiga mega markets ekonomi dunia, yaitu Eropa Barat, Amerika utara, dan Asia Timur-Tenggara.<sup>74</sup>

Indonesia sebagai negara yang berada di wilayah Asia-Pasifik yang oleh John Naisbitt diprediksikan akan menjadi kawasan penggerak ekonomi dunia di masa yang tidak lama lagi, tentunya harus berupaya untuk mengantisipasi dan mempersiapkan diri untuk terjun dalam kompetisi perdagangan antar negara. Dengan demikian, dibutuhkan langkah-langkah strategis dalam bentuk kebijaksanaan deregulasi yang menunjang pembentukan struktur ekonomi dalam negeri agar menjadi semakin kokoh. Langkah semacam ini perlu dilakukan mengingat kondisi Indonesia posisinya dalam keadaan masih lemah kalau dibandingkan dengan negara-negara di kawasan Asia-Pasifik lainnya seperti, Taiwan, Korea Selatan, Australia, Malaysia, Singapura, Thailand, apalagi Jepang. Karena itu, Indonesia dituntut untuk bisa menentukan pilihan yang tepat pada sektor unggulan yang dimiliki yang memungkinkan bisa bersaing dan memainkan peranan yang menguntungkan untuk

---

<sup>74</sup> Anggito Abirmanyu, 'Ekonomi Indonesia dalam Era Globalisasi dan Liberalisasi Suatu Fakta Empiris', Makalah Diskusi PSSK, Yogyakarta, 1996, hal 2.

memperoleh nilai surplus dalam setiap transaksi perdagangan yang

dilakukan.

Dari uraian tersebut dapat dikemukakan permasalahan sebagai berikut: pertama, bagaimana sebenarnya era perdagangan bebas, keberadaan dan peran GATT/WTO, apakah merupakan suatu keniscayaan yang harus diikuti oleh semua negara di dunia, ataukah dibalik itu ada kepentingan yang tersembunyi dari negara-negara maju dalam rangka untuk tetap dapat menguasai negara berkembang; dan kedua, bagaimana antipaksi dan kesiapan Indonesia sebagai negara yang telah melakukan ratifikasi hasil konferensi Marrakes yang konsekuensinya tentunya harus tunduk pada aturan-aturan internasional yang telah ditandatanganinya.

Istilah globalisasi dan liberalisasi bermula dari suatu harapan akan munculnya kesejahteraan, kedamaian, dan kebebasan seiring dengan runtuhnya rezim komunis di negara-negara Eropa Timur dan Uni Soviet. Keruntuhan rezim ini menandai berakhirnya perang dingin antara blok Barat yang diprakarsai Amerika Serikat dan negara-negara Eropa Timur. Era ini menandai munculnya suatu era tatanan dunia baru (*New World Order*) yang memberikan harapan kepada masyarakat internasional akan kesejahteraan dan kedamaian. Upaya yang ingin dilakukan adalah menghapus gangguan yang semakin tinggi diberbagai belahan dunia,

memperbesar peluang kerja, menciptakan perdamaian dengan cara menghentikan peperangan.

Seiring dengan harapan tersebut, gagasan perekonomian pasar bebas semakin merebak, setahap demi setahap upaya pengaturan perdagangan dan pasar dunia, yang sebenarnya sudah dirintis sejak penghujung tahun 1940-an, mulai menampakkan bentuknya dan mulai diterima di banyak negara. Upaya tersebut dimulai dari dialog yang dikenal dengan Geneva Round 1947, Annecy Round 1949, Tonquay Round 1950-1951, Geneva Round 1956, Dillon Round 1960 - 1961, Kennedy Round 1964-1967, Tokyo Round 1973-1979, dan yang baru saja selesai Uruguay Round 1986-1994. Untuk mengakhirinya pada tanggal 15 April 1994 sebanyak 124 negara hadir pada pertemuan tingkat menteri di Marrakesh, Maroko, yang setuju untuk memulai kesepakatan umum tentang tarif dan perdagangan yang sering dikenal GATT (*General Agreement on Tariff and Trade*) yang kemudian berubah menjadi WTO (*World Trade Organisation*) dan mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1996. WTO ini menjadi institusi yang bertugas untuk mengawasi aktivitas perdagangan dunia, sekaligus menjadi forum untuk melakukan penyelesaian sengketa dan negosiasi antar negara yang menjadi anggota WTO (M. Thammn, 1996 305).

John Naisbit, dalam Megatrend 2000, mengambarkan bahwa dalam dasa wara tahun 1990-an perdagangan dunia tengah memasuki periode kemakmuran ekonomi. Ekonomi global tidak lagi dapat dimengerti jika dianggap hanya sebagai perdagangan yang membengkok di antara 160

negara. Dunia bergerak dari perdagangan antar negara ke ekonomi tunggal. Persoalan yang timbul adalah bagaimana cara mengatur distribusi barang, jasa, dan keuntungan dalam era kemakmuran ekonomi tunggal. Siapakah yang berwenang untuk merumuskan perkara tersebut (John Niesbit dalam Imran Ds, 1995: 60). Persoalan-persoalan tersebut nampaknya akan semakin transparan setelah disetujuinya konferensi

Marrakesh.

Penandatanganan kesepakatan putaran Uruguay pada konferensi di Marrakesh merupakan suatu kemajuan besar dari perkembangan perdagangan antar negara yang terkait dengan perkembangan politik ekonomi internasional sebagai upaya menuju era perdagangan bebas. Dari sisi politik ekonomi, deklarasi Marrakesh merupakan keputusan internasional untuk mengatur perdagangan dunia yang konsekuensinya harus dipatuhi oleh negara-negara yang meratifikasi dan bagi negara pencetus (negara maju) merupakan bukti keunggulan politik untuk dapat memasukkan misi dan mengatur sesuai dengan kehendak mereka sehingga banyak kritik yang mengatakan bahwa inilah awal dari era neo kolonialisme.

Beberapa hal yang penting yang disepakati melalui konferensi Marrakesh tersebut, di antaranya pertama, ditandatanganinya akta final yang mencakup keseluruhan hasil putaran Uruguay yang mengatur negosiasi perdagangan multilateral; kedua, disepakatinya WTO sebagai pengganti GATT yang menjadi pelaksana seluruh hasil perundingan

putaran Uruguay; ketiga, beberapa perjanjian yang akan diawasi WTO

berupa perjanjian multilateral perdagangan barang dan jasa; keempat, kesepakatan penurunan tarif, tarif bea masuk, klarifikasi dalam aturan anti dumping dan efisiensi dalam *dispute settlement*; kelima, mengenai TRIPs (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Right*) berupa hak cipta, paten, merek, dan produk industri disepakati tiga hal pokok, yaitu: (a) menetapkan kesesuaian dengan perjanjian internasional dalam hal hak cipta pada konvensi Bern dan paten pada konvensi Paris, (b) memuat norma-norma baru dengan standar kualitas yang lebih tinggi, (c) memuat ketentuan mengenai penerapan (*enforcement*).

Pelbagai kawasan (regional), dalam rangka meningkatkan kerja sama ekonomi untuk menghadapi era perdagangan bebas, telah membuat berbagai bentuk kerja sama. Untuk kawasan Asia-Pasifik membentuk Asia *Pacific Economic Cooperation* yang lebih dikenal dengan APEC, suatu kerja sama ekonomi yang mengarah pada pasar bersama negara-negara di kawasan Asia-Pasifik, seperti ASEAN *Free Trade Association* (AFTA), *Uni European* (UE) dan *North American Free Trade Association* (NAFTA). Di samping itu ada bentuk kerja sama yang bersifat trilateral, seperti kawasan segi tiga pertumbuhan ekonomi Singapura-Johor-Riau dan Malaysia-Thailand-Indonesia.

Bentuk kerja sama ekonomi dan perdagangan tersebut merupakan upaya untuk lebih mengoptimalkan potensi pasar kawasan regional. Inti

kerja sama tersebut adalah mekanisme pasar bebas dan keterbukaan, terbuka baik terhadap perpindahan modal (investasi) maupun arus masuk barang impor. Masing-masing negara berusaha untuk menyesuaikan ketentuan aturan hukumnya dengan melalui deregulasi yang kadang-kadang menerapkan prinsip kedaulatan yang dimilikinya sehingga menimbulkan ketidakkonsistenan aturan hukum dan bententangan dalam prinsip hukum yang sudah ada sebelumnya. Semuanya dilakukan dalam rangka untuk mengantisipasi dan mempersiapkan diri menuju era perdagangan bebas.

Munculnya organisasi kerja sama ekonomi dan perdagangan di kawasan regional juga merupakan langkah alternatif untuk mengatasi kelambatan dan tidak efektifnya prinsip-prinsip dalam persetujuan umum tentang tarif dan perdagangan atau GATT yang kemudian membuka mata dunia untuk perlunya mendirikan suatu organisasi perdagangan internasional yang bisa menyelesaikan masalah ekonomi antar negara anggota. Kemudian lahirilah WTO yang mulai menjalankan tugas-tugasnya sejak 1 Januari 1996. Melalui WTO diharapkan mampu dijadikan wadah untuk menyelesaikan atau mengadili pihak-pihak yang bermasalah secara proporsional tanpa memihak sehingga para pihak merasa puas.

Namun demikian, keberadaan WTO akan diuji ke-independennanya mengingat negara maju nampaknya mulai menginginkan untuk memasukkan klausul-klausul tertentu yang bersifat non ekonomi, seperti standar perburuhan, HAM, dan lingkungan hidup yang hanya



menguntungkan negara maju (industri) tetapi sebaliknya akan

memojokkan negara-negara berkembang. Karena kebanyakan negara

berkembang masih mengalami kesulitan untuk menyesuaikan standar

perburuhan, HAM, dan lingkungan hidup yang disyaratkan sebagaimana

yang dilakukan negara-negara maju, lagi pula kondisi sosial, politik, dan

ekonomi yang terdapat di negara berkembang sudah barang tentu

berbeda.

Keinginan negara-negara maju semakin tampak ketika menjelang

sidang WTO di Singapura tanggal 9-13 Nopember 1996, Amerika Serikat

dan Uni Eropa mendesak supaya standar perburuhan dan lingkungan

hidup dikaitkan dengan masalah ekonomi dan perdagangan, yaitu berupa:

a. kebebasan berorganisasi;

b. tidak ada diskriminasi pekerja;

c. hak berunding secara kolektif;

d. pemberantasan praktek buruh anak.

Sudah barang tentu, negara berkembang menolak dengan alasan

bahwa hal tersebut sudah menjadi wewenang organisasi perburuhan

internasional (ILO). Persoalan ini pernah menimpa Indonesia. Oleh karena

Indonesia dinilai termasuk negara yang tidak melindungi HAM dan

merusak hutan sebagai paru-paru dunia, maka ekspor tekstil dan kayu

lapis Indonesia mengalami kesulitan untuk bisa masuk ke Amerika.

Berdasarkan kondisi objektif, banyak negara berkembang termasuk

Indonesia yang kurang siap untuk menghadapi era perdagangan bebas.

Menurut Charles R. Carlisle, ketidaksiapan tersebut tidak hanya dialami negara berkembang tapi juga negara maju. Ketidaksiapan tersebut disebabkan karena adanya dukungan politik dalam negeri negara yang bersangkutan dan kondisi kekukohan ekonominya dalam menghadapi era liberalisasi.

Uni Eropa, terutama Perancis dan Eropa Selatan, merasa kebetaran untuk menghapus proteksi dan subsidi pertanian untuk masa mendatang dan belum siap untuk menerima perdagangan bebas di sektor pertanian. Jepang dan Korea Selatan merasa enggan untuk membuka pasar impor berasnya. Demikian juga, Amerika Serikat ternyata masih memproteksi sektor tekstilnya.

Melihat kondisi semacam itu, apakah era perdagangan bebas sebagaiirmana yang dimaksudkan ekonom Amerika Serikat Fred Bergsten akan terwujud di tahun 2010 untuk negara maju dan tahun 2020 untuk negara miskin. Kawasan Asia Pasifik sudah ditetapkan berdasarkan deklarasi Bogor bahwa realisasi perdagangan bebas diharapkan akan tercipta setidaknya pada tahun 2010 untuk negara industri (maju) dan tahun 2020 untuk negara berkembang.

Bagi Indonesia yang telah melakukan ratifikasi hasil konferensi Marrakesh dengan UU No. 7 Tahun 1994, mau tidak mau harus mempersiapkan diri dengan cara:

a. Memperkokoh perekonomian nasional tanpa harus melonggar ketentuan yang telah disetujui melalui GATT yang Sekarang

menjadi WTO.

b. Meningkatkan daya saing produk Indonesia melalui intra struktur,

kebijaksanaan dan deregulasi perekonomian dalam negeri.

Untuk mengantisipasi perkembangan perekonomian internasional,

Pemerintah Indonesia telah melakukan pembenahan untuk meningkatkan

daya saing, di antaranya melalui deregulasi dengan PP No. 4 tahun 1994

yang intinya memberikan kemudahan bagi investasi, bahkan investor

asing diuntungkan untuk menguasai saham dalam jumlah 100 % dan

dapat menanamkan investasinya pada sektor penting yang berkaitan hajat

hidup orang banyak yang sebelumnya tidak diperkenankan. Sebagai

tindak lanjut, pada bulan Mei 1995 dikeluarkan paket deregulasi

perdagangan dan investasi dengan maksud sebagai langkah untuk

memperbaiki daya kompetitif produk dalam negeri, berupa penurunan tarif

bea masuk beberapa produk utama termasuk mobil secara bertahap dan

transparan untuk mencapai tarif menyeluruh dan seragam tahun 2003.

Salah satu kesepatan penting deklarasi Bogor adalah berupa

penurunan tarif bea masuk dan hambatan non tarif. Kalau dilihat nilai

positifnya, hal ini akan membuka peluang besar bagi Indonesia, dengan

didukung organisasi ekonomi kawasan regional, seperti APEC dan AFTA

sebagai kawasan pertumbuhan ekonomi paling pesat, akan dapat

mengangkat pasar dunia yang sekaligus merupakan peluang pasar

ekspor bagi produk Indonesia.

Namun apabila tidak pandai menyiasati justru bisa menjadi bumerang,

sebagaimana yang dikemukakan Michail Vitikiotis, Kepala Biro Far East Economic Review Bangkok, bahwa dalam dua tahun terakhir ini pertumbuhan ekonomi Thailand mengalami penurunan dari 9% menjadi hanya 5%. Penurunan tersebut terjadi bersamaan dengan dorongan global untuk menghapus hambatan tarif dan non tarif (M.Vitikiotis, 1997:

2).

Masalah lain yang dapat menjadi penghambat dalam praktek perdagangan internasional adalah masalah dumping. Politik berupa produk impor dapat dijual murah di negara tujuan ekspor, tetapi di negaranya sendiri dijual lebih mahal. Biasanya karena barang tersebut disubsidi oleh Pemerintah negara asal barang impor tersebut. Karena itu, praktek demikian bisa menimbulkan kerugian produsen barang sejenis di negara pengimpor.

Untuk mengantisipasi hal tersebut, Pemerintah Indonesia membentuk Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) untuk menangani permasalahan yang berkaitan dengan upaya penanggulangan impor barang dumping dan barang yang mengandung subsidi. Komite ini juga bertugas untuk melakukan penyelidikan terhadap barang dumping dan barang yang mengandung subsidi, mengumpulkan, meneliti, mengolah bukti-bukti, dan informasi serta mengusulkan bea masuk anti dumping dan bea masuk imbalan.

Komite ini juga dapat memberikan bimbingan dan membantu produsen dalam negeri yang produknya dikenakan tuduhan dumping di

Langkah antisipasi tersebut dilakukan untuk menghadapi segala kemungkinan yang kurang menguntungkan, mengingat kondisi kemampuan perusahaan Indonesia masih dipertanyakan untuk dapat bersaing secara bebas. Selama ini, banyak perusahaan Indonesia yang lama.

ganda dari modal yang diinvestasikan dan pembayaran *royalty* yang lebih menamakan investasinya di Indonesia akan memperoleh keuntungan Dengan demikian para investor yang mempunyai hak paten dalam atau lembaga yang menggunakan temuannya dalam jangka waktu lama. hak paten, yaitu akan memperoleh pembayaran *royalty* dan setiap orang Perubahan jangka waktu diperkirakan akan menguntungkan pemegang menjadi 20 tahun sesuai dengan ketentuan kesepakatan TRIPs. adalah masalah jangka waktu yang tadinya hanya 14 tahun akan dirubah UU No. 6 Tahun 1989 tentang hak Paten. Hal yang penting di antaranya Januari tahun 2000, Pemerintah Indonesia akan melakukan perubahan *of Intellectual Property Rights*) yang akan berlaku efektif mulai tanggal 1 Dalam rangka menyesuaikan dengan TRIPs (*Trade Related Aspects* dibawa ke forum WTO.

mencapai penyelesaian yang adil untuk kedua belah pihak, maka dapat antar negara yang bersangkutan. Bilamana konsultasi bilateral tidak dapat jika dipandang perlu, dapat dilakukan upaya melalui konsultasi bilateral masalah dumping yang dilakukan negara lain terhadap produk Indonesia, luar negeri sesuai dengan ketentuan GATT/WTO. Dalam mengatasi

biasa menikmati berbagai kemudahan, fasilitas, dan proteksi yang dapat membangkitkan kreativitas dan kemampuan daya saing perusahaan yang berorientasi pada pertumbuhan dan kemauan politik untuk menciptakan lingkungan bisnis yang sehat dan kompetitif.

Indonesia, tidak bisa tidak, harus memanfaatkan peluang dari ketentuan yang sudah disepakati melalui GATT/WTO, di antaranya pertama, kesepakatan WTO untuk tidak melakukan kebijakan protektif menjadikan Indonesia harus mulai melakukan apa yang disebut efisiensi produksi dan peningkatan kualitas agar produk-produknya mempunyai daya saing yang sangat tinggi di pasar dunia; kedua, Indonesia, melalui WTO, dapat mengajukan komplain jika dirugikan negara lain, seperti menuntut Amerika Serikat agar mau mencabut aturan proteksi tersendiri yang menghambat ekspor tekstil dan garmen Indonesia.

Sisi lain yang perlu diantisipasi, yaitu niat baik negara maju yang tampaknya tidak murni benar dalam era perdagangan bebas untuk membantu pertumbuhan ekonomi dan pembangunan untuk mewujudkan kesejahteraan manusia. Hal ini bisa dilihat dari perilaku negara maju yang cenderung memaksakan keinginan dan kehendaknya dengan cara memasukkan klausul-klausul tertentu yang bersifat non ekonomis dalam setiap perjanjian internasional, seperti masalah standar perburuhan, HAM, dan lingkungan hidup sebagai persyaratan yang harus dipenuhi dalam transaksi perdagangan yang dilakukan.

Persoalan lingkungan akibat pembangunan dan industrialisasi, terlebih lagi pada era perdagangan bebas menjadi isu global, mengakibatkan kecemasan dan ketakutan masyarakat dunia. Karena itu, untuk mengevaluasi dan mengatasinya perlu dilakukan langkah penanggulangan melalui forum masyarakat internasional yang dimulai dalam bentuk konferensi internasional. Sebagai langkah kongkrit, penanggulangannya melalui berbagai program penyelamatan lingkungan hidup.

Program kerja *The Commission on Crime Prevention and Criminal Justice* tahun 1992-1996 menempatkan kaitan antara masalah lingkungan hidup dengan sistem pengadilan pidana sebagai prioritas.<sup>75</sup> Kongres PBB tentang pencegahan dan pembinaan para pelaku di Cairo 29 April - 8 Mei 1995 menjadikan masalah lingkungan hidup sebagai salah satu agenda utama.

Hal tersebut amat berkesan, sebab persoalan lingkungan, dalam hal ini hak untuk memperoleh lingkungan hidup yang sehat (*the Right to Healthy Environment*), merupakan salah satu hak asasi manusia (HAM) yang diatur dalam deklarasi hak-hak asasi manusia (*Universal Declaration of Human Right*) tahun 1948 yang ditegaskan dalam deklarasi Stockholm (*United Nation Conference on the Environment*) tahun 1972, juga ditegaskan dalam *the United Nation Conference on Environment and*

---

<sup>75</sup> Muladi, Trinsip-Prinsip Dasar Hukum Pidana Lingkungan dalam Kaitannya dengan UU No. 23 Tahun 1997, Makalah Seminar Fakultas Hukum UJAJDLJ, Semarang, tanggal 21 Februari 1998, hal 4.

*development di Rio de Janeiro tahun 1992.*

Kaitan antara lingkungan hidup dengan hak asasi manusia secara lebih mendalam tercantum dalam laporan *Human Rights and the Environment, Commission on Human Right PBB* tanggal 6 Juli 1994 yang menegaskan bahwa efek lingkungan hidup terhadap hak asasi manusia berkaitan dengan:

a. *Right to self determination and permanent sovereignty over natural resources,*

b. *Right to life;*

c. *Right to health,*

d. *Right to food;*

e. *Right to safe health~ working conditions;*

f. *Right to housing;*

g. *Right to information;*

h. *Popular participation;*

i. *Culture rights.*

Beberapa forum konferensi internasional yang membahas persoalan pembangunan dan dampaknya terhadap lingkungan hidup, antara lain:

#### 1. Konferensi Stockholm

Konferensi Stockholm yang dilaksanakan pada tanggal 5-16 Juni 1972 merupakan forum internasional yang membahas persoalan persoalan penting pembangunan dan lingkungan hidup. Konferensi



tersebut merupakan tonggak baru bagi masyarakat internasional yang menghasilkan prinsip-prinsip penting untuk mengatur pembangunan yang berorientasi lingkungan. Terlaksananya konferensi Stockholm telah mampu menumbuhkan dan mendorong semangat masyarakat internasional untuk memahami dan menyadari akan pentingnya lingkungan hidup yang perlu dilekatkan sebagai satu kesatuan dalam pembangunan.

Konferensi terseleenggara tidak lepas dari kerja keras semua pihak terutama panitia persiapan yang telah ditugaskan PBB melalui resolusi No. 2657 tahun 1970 yang secara khusus telah menggunakan untuk mencurahkan perhatian kepada usaha-usaha guna melindungi dan mengembangkan kepentingan-kepentingan negara-negara yang sedang berkembang dengan menyesuaikan dan memadukan secara serasi sesuai dengan kebijaksanaan nasional berikut skala-prioritasnya.<sup>76</sup>

Dalam laporannya, panitia persiapan menyampaikan beberapa saran. Sebagai mata acara pokok konferensi, yakni:

a. Perencanaan dan pengelolaan permukiman manusia demi kualitas lingkungan hidup.

b. Segi-segi lingkungan hidup dalam pengelolaan sumber daya alam.

c. Identifikasi dan pengendalian jenis-jenis pencemaran dan gangguan yang berpengaruh internasional secara luas.

d. Segi-segi pendidikan, penerangan, sosial, dan kebudayaan dalam

---

<sup>76</sup> R.M Gatot P. Sumartono, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hal 30.

- masalah-masalah lingkungan hidup.
- e. Pembangunan dan lingkungan hidup.
- f. Implikasi organisasi secara internasional mengenai tindakan-tindakan yang diusulkan konferensi.
- Hal lain yang dilakukan panitia persiapan adalah membentuk panitia kerja antar pemerintah untuk menyiapkan bahan-bahan dan rancangan perumusan mengenai:
- Deklarasi tentang lingkungan hidup manusia.
  - Pencemaran laut.
  - Pencemaran tanah.
  - Monitoring dan pengawasan.
  - Konversi alam.
- Konferensi Stockholm, yang diikuti oleh 113 negara, pada akhir sidang, yaitu tanggal 16 Juni 1972 berhasil menghasilkan beberapa ketentuan yang penting, di antaranya:
- Deklarasi lingkungan hidup manusia.
  - Rencana aksi lingkungan hidup manusia (*action plan*)
  - Rekomendasi tentang kelembagaan dan keuangan yang menunjang pelaksanaan rencana aksi tersebut.
- Hasil-hasil konferensi Stockholm, baik berupa preambuli, asas asas, dan rekomendasi-rekomendasi telah memberikan pengarah yang cukup jelas terhadap penanganan masalah lingkungan hidup, termasuk di dalamnya pengaturannya melalui perundang-undangan.

dan perjanjian internasional. Hasil yang terpenting adalah dikeluarkannya deklarasi Rio de Janeiro tentang *Declaration on Environment and Development* yang menggariskan prinsip-prinsip fundamental tentang lingkungan dan pembangunan berkelanjutan.

Hasil utama yang diperoleh dari konferensi Rio De Janeiro, yakni:

Konferensi tersebut telah mengaitkan dengan sangat erat dua pengertian kunci, yaitu pertama, pembangunan seluruh bumi dan perlindungan lingkungan, kedua, bahwa jalan yang dilalui kini telah diterangi oleh penerangan baru, yaitu semangat (spirit) konferensi yang meliputi tiga dimensi, yakni dimensi intelektual, dimensi ekonomi, dan dimensi politik (Koesnadi Hardjasoemantri, 1994: 19-25).

Dimensi intelektual merupakan pengakuan bahwa planet bumi adalah suatu perangkat luas tentang ketergantungan satu dengan yang lain. Menginginya permukaan air yang mengancam delta sungai Gangga adalah sama dengan ancaman kota Venesia atau pulau-pulau di samudera Pasifik. Dengan demikian, dimensi intelektual merupakan dimensi pertalian atau hubungan (*coherence*).

Dimensi ekonomi merupakan inti dari semangat Rio, artinya pembangunan berlebih atau pembangunan yang kurang menyebabkan keprihatinan yang sama, yakni kedua-duanya secara bertahap perlu diganti dengan pembangunan seluruh bumi. Konsekuensi logis dan perubahan itu perlu dipahami, yaitu bahwa upaya yang dilakukan harus merupakan upaya global yang dibuat oleh baik negara-negara utara

maupun selain yang keduanya tidak bisa menghindar untuk memberikan kontribusinya. Salah satu kontribusi oleh negara penerima adalah agar sumber daya tambahan dimanfaatkan secara efisien dengan formula sebagaimana telah diterima di Rio.

Dimensi politik adalah adanya kesadaran masyarakat internasional yang jelas tentang kewajiban politik, kewajiban untuk jangka panjang. Politik adalah lebih dari pada semata-mata penjuangan untuk memenangkan atau mempertahankan kekuasaan, aspek esensinya adalah pelaksanaan kekuasaan, yaitu mempersiapkan dunia untuk generasi-generasi mendatang. Apa yang akan dilakukan dalam hubungan ini tidak harus membuahkan hasil dalam waktu beberapa tahun mendatang tetapi dalam jangka waktu yang lebih panjang.

Hasil konferensi Rio de Janeiro, berupa agenda 21 yang berisi kerangka kerja dari suatu rencana kerja yang telah disepakati oleh masyarakat internasional yang bertujuan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan pada abad ke-21 mendatang. Agenda 21 tersebut secara garis besar berisi rencana kerja global secara menyeluruh mengenai pembangunan berkelanjutan, meliputi berbagai isu ekonomi, sosial, dan lingkungan yang berbeda-beda yang dibuat berdasarkan pertimbangan dan masukan dari semua negara di dunia ini.

Sebagai antispasi isu global, upaya lainnya adalah konvensi perubahan cuaca (*Convention Climate Change*). Dalam hal ini, pemerintah Indonesia telah melakukan ratifikasi konvensi tersebut dengan UU No. 6

- tahun 1994. Konvensi tersebut memuat kesediaan negara-negara maju untuk membatasi emisi gas rumah kaca dan melaporkan perkembangannya secara terbuka mengenai kemajuan yang diperolehnya dalam hubungan tersebut. Negara-negara maju juga sepatat untuk membantu negara-negara berkembang dengan sumber daya dan teknologi, sebagai upaya negara-negara berkembang memenuhi kewajiban sebagaimana tercantum dalam konvensi tersebut.<sup>78</sup>
- Beberapa prinsip penting konvensi perubahan iklim tersebut, yaitu:
- a. Semua pihak harus melindungi sistem iklim untuk kepentingan kehidupan generasi kini dan yang akan datang atas dasar keadilan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Negara maju harus mengambil peranan penting dalam menanggulangi perubahan iklim dan kerugian yang diakibatkannya.
  - b. Kebutuhan tertentu dan keadaan khusus dan negara berkembang, terutama yang rawan terhadap akibat perubahan iklim yang merugikan, dan bagi pihak lain, terutama negara berkembang yang harus memikul ketidakseimbangan atau beban yang tidak wajar berdasarkan konvensi harus diberikan pertimbangan penuh.
  - c. Semua pihak harus mengambil tindakan pencegahan untuk mengantisipasi, mencegah, atau mengurangi penyebab dan perubahan iklim dan meringankan akibat yang merugikan.
  - d. Semua pihak mempunyai hak untuk dan harus memajukan pem-

bangunan berkelanjutan.

e. Semua pihak harus bekerja sama untuk mengembangkan sistem ekonomi internasional yang menunjang dan bersifat terbuka menuju pembangunan ekonomi dan pembangunan bagi semua pihak, khususnya pihak negara berkembang sehingga memungkinkan mereka untuk secara lebih baik menghadapi perubahan iklim.

Konvensi lain yang terkait dengan konferensi Rio de Janeiro adalah konvensi keanekaragaman hayati (*Convention on Biological Diversity*), 5 Juni 1992, yang memberikan landasan bagi kerja sama internasional dalam rangka konservasi *species* dan habitat. Konvensi tersebut oleh pemerintah Indonesia telah diratifikasi dengan UU No. 5 Tahun 1994.

Tujuan dari konvensi tersebut adalah untuk melestarikan dan mendayagunakan secara berkelanjutan keanekaragaman hayati dan berbagai keuntungan secara adil dan merata dan hasil pemanfaatan sumber genetika melalui akses terhadap sumber genetika tersebut, alih teknologi yang relevan, serta pembiayaan yang cukup dan memadai.

Asas yang terkandung dalam konvensi tersebut adalah negara memiliki kedaulatan untuk mengeksplorasi sumber alamnya sesuai dengan kebijaksanaan pembangunan dan lingkungannya, serta mempunyai tanggung jawab untuk menjamin bahwa kegiatannya itu tidak akan merusak lingkungan, baik di dalam maupun di luar wilayahnya<sup>79</sup>

Hal yang penting yang berkaitan dengan lingkungan hidup dan

---

<sup>79</sup> Ibid hal 44

perdagangan bahwa konferensi Rio de Janeiro telah merekomendasikan

persoalan lingkungan ke dalam agenda perdagangan internasional.

Karena begitu pentingnya persoalan lingkungan dan perdagangan, maka

isu lingkungan telah dimasukkan dalam agenda perdagangan, baik tingkat

regional seperti NAFTA dan APEC maupun tingkatan yang lebih luas,

WTO dan GATT.

Para menteri luar negeri, pada pertemuan tahun 1994, telah

membentuk *Environment Visions Statement and Principle* menyusul

kemudian ISO (*International Standard Organization*) 1400 yang mengatur

EMS (*Environment Management System*) untuk standar perdagangan

internasional.

Pada era pasar bebas, di mana tidak ada lagi batas-batas antar

negara, dunia menjadi semakin transparan dalam perdagangan.

Berhadapan dengan isu global perdagangan antar negara, maka hasil-

hasil industri negara maupun dapat menembus pasar dunia sepanjang

memenuhi standar internasional bila hasil industri tersebut berkualitas

mutunya dan ramah terhadap lingkungan (*ecolabeling*).<sup>80</sup>

#### E. Dampak Perdagangan Terhadap Lingkungan Hidup

Pada era globalisasi, persoalan pembangunan berkelanjutan

---

<sup>80</sup> Eggy Sudjana, HAM~ Demokrasi dan Lingkungan Hidup dalam Perspektif Islam, Yayasan Asv-Svahidah, Jakarta, Bogor, 199%. hal. 89.

*sustainable development* telah disepakati negara-negara di dunia sebagai

suatu strategi yang memasukkan unsur lingkungan hidup sebagai salah satu pertimbangan. Kata lingkungan kemudian menjadi populer baik di pertimbangan. Kata lingkungan kemudian menjadi populer baik di skala global, nasional, maupun regional.<sup>81</sup> Ia menjadi kata yang sakti yang selalu ditempel sebagai atribut kebijakan pembangunan dibanyak negara.

Pada era perdagangan bebas, rezim lingkungan global mulai muncul dalam bentuk beberapa perjanjian multilateral di bidang lingkungan hidup, yakni *Multilateral Environmental Agreement* (MEA) yang menetapkan langkah-langkah perlindungan lingkungan hidup. Indonesia, menurut Kurnya Roesad, sebagai salah satu negara penanda tangan perjanjian internasional ini telah mengikatkan diri, baik untuk membuka rezim perdagangannya maupun mendukung perlindungan lingkungan hidup.<sup>82</sup>

Desakan untuk memadukan kebijakan perdagangan internasional dengan kebijakan lingkungan hidup, dalam rangka untuk mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan, tanpa mengorbankan keuntungan dan aktivitas perdagangan bebas telah menciptakan ketegangan di antara negara pelaku perdagangan. Kehawatiran tersebut berkisar pada masalah proteksionisme hijau (*green protectionism*), yaitu upaya memberikan proteksi dengan bersembunyi di balik kebijakan perdagangan

---

<sup>81</sup> Sudharto P. Hadi, *Pembangunan Berkelanjutan di Era Globalisasi*, Akademika UMS No. 02/1996, Surakarta, hal 61.

<sup>82</sup> Kurnya Roesad, *Perdagangan Internasional dan Lingkungan Hidup: Implikasi bagi Indonesia*, dalam *Transformasi Industri Indonesia dalam Era Perdagangan Bebas* hal 115.



internasional yang terkait dengan persoalan lingkungan. Beberapa persoalan yang dikawatirkan pelaku perdagangan, terutama negara berkembang adalah:

1. Banyak komoditas ekspor negara berkembang akan menghadapi hambatan-hambatan untuk memasuki pasaran utama, karena alasan pertimbangan peraturan lingkungan hidup, skema sertifikasi maupun kebijakan-kebijakan yang terkait dengan produk dan proses produksi.

2. Penyesuaian ke arah standar lingkungan hidup yang lebih tinggi akan membuat daya saing perekonomian negara-negara berkembang menjadi berkurang atau melemah.

Secara normatif, ketentuan rezim perdagangan bebas mendasarkan pada ketentuan non diskriminatif. Pasal 1-3 GATT menyebutkan bahwa para anggota WTO harus memperlakukan secara adil dalam setiap transaksi perdagangan, tanpa ada perlakuan khusus terhadap pihak tertentu. Ketentuan ini berlaku pada tarif bea masuk dalam kegiatan impor yang dilakukan.

Adapun pasal 20 memberi isyarat perkecualian terhadap ketentuan tersebut di atas, yakni dalam hal berkaitan dengan lingkungan disebutkan bahwa GATT tidak berwenang mencegah negara anggota untuk mengambil tindakan yang diperlukan guna melindungi kehidupan manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan atau sistem kesehatan. Tindakan-tindakan yang terkait dengan upaya pelestarian sumber daya

perdagangan. Negosiasi yang dilakukan dalam kerangka WTO menunjukkan bahwa tidak terdapat kesatuan pandangan antara negara-negara maju dengan negara-negara berkembang dalam hal mengenai luasnya pengaruh proteksi hijau. Dikemukakan oleh Esty (1994), bahwa dewan penyelesaian perselisihan perdagangan (*dispute resolution panel*) yang ada pada WTO pada saat sekarang, jelas tidak mempunyai pengetahuan dan keahlian yang cukup mengenai lingkungan dan tidak cukup transparan kemampuannya terhadap masalah lingkungan dalam suatu perselisihan dagang.

terhadap perdagangan. Karena itu perlu dibedakan antara perlindungan lingkungan dan proteksionisme hijau. Suatu kebijakan perlindungan lingkungan memberikan perlindungan kepada industri dalam negeri dengan menggunakan lingkungan sebagai dalih, tetapi sama sekali tidak memberikan manfaat positif terhadap lingkungan. Kebijakan yang dikaitkan dengan perdagangan internasional memberikan perlindungan terhadap lingkungan, tetapi sekaligus juga membawa dampak perdagangan.

alam yang tidak dapat diperbaharui, asalkan kebijakan perdagangan mereka disertai dengan pembatasan produksi atau konsumsi di dalam negeri. Oleh karena itu, GATT memberikan toleransi yang secara *de facto* cukup besar bagi setiap negara untuk melaksanakan program lingkungan masing-masing. Bahkan, sekalipun program tersebut membawa dampak terhadap perdagangan.

Dampak perdagangan terhadap lingkungan hidup dapat bersifat positif

dan negatif. Dampak liberalisasi perdagangan terhadap lingkungan,

antara lain:

1. Liberalisasi perdagangan umumnya mendorong peningkatan skala aktivitas, termasuk peningkatan sumber daya dan pencemaran, untuk suatu komposisi out put tertentu.

2. Liberalisasi perdagangan dan perubahan harga dan hal yang ditimbulkannya dapat mendorong terjadinya perubahan komposisi out put. Jika suatu negara mempunyai keunggulan komparatif di bidang kegiatan yang kurang padat sumber daya ataupun padat pencemaran, maka liberalisasi perdagangan akan meningkatkan pangsa produk yang ramah lingkungan Hal ini akan berlaku sebaliknya apabila negara tersebut berspesialisasi pada produk yang padat sumber daya atau padat sumber pencemaran.

3. Liberalisasi perdagangan biasanya mendorong perubahan teknologi produksi. Di negara-negara berkembang, teknologi yang digunakan cenderung masih lebih ramah lingkungan mengingat keunggulan komparatif yang dimiliki pada umumnya terletak pada kegiatan produksi yang padat karya. Dalam perkembangannya, para Penanam Modal Asing (PMA) mengalihkan teknologinya yang lebih modern dan ramah lingkungan sehingga tingkat pendapatan negara tersebut meningkat dan pada gilirannya memungkinkan meningkatkan permintaan dan kemampuan pembiayaan lingkungan yang lebih

bersih.

4. Liberalisasi perdagangan mengurangi hambatan-hambatan bagi industri manufaktur dan jasa sehingga memungkinkan negara-negara berkembang dapat mendiversifikasikan ekspornya dan tidak lagi mengandalkan ekspor komoditas yang padat sumber daya alam.

5. Rezim perdagangan bebas cenderung tidak mengandung distorsi harga. Pengurangan distorsi harga akan mengakibatkan sumber daya alam seperti kayu, air, ataupun energi lain cenderung tidak lagi dinilai terlalu rendah sehingga dapat menjadi konsumsi dan produksi yang optimal.<sup>83</sup>

Dalam berbagai studi, dampak perdagangan terhadap lingkungan hidup relatif kecil jika dibandingkan faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi perubahan lingkungan. Namun demikian, perdagangan bebas dapat memperparah masalah pencemaran apabila tidak disertai dengan upaya-upaya untuk mengatasi kegagalan pasar ataupun kebijakan yang menjadi sebab utama masalah lingkungan. Dampak terhadap lingkungan akan terjadi apabila:

1. Apabila pasar dan pemerintah gagal memasukkan harga sumber daya dan jasa-jasa lingkungan. Gejala pasar tidak memberi informasi tentang produksi yang sesungguhnya. Semakin tinggi tingkat liberalisasi perdagangan akan semakin tinggi kegiatan ekonomi.

---

<sup>83</sup> Drossmann dan Grueger (1991), Black (1995) dalam Kursnya Roesad, Ibid., hal 118-119.

Dengan demikian akan mempengaruhi tingkat pencemaran ataupun

kegiatan-kegiatan yang bersifat merusak lingkungan.

2. Negara-negara pengeksport yang tidak mempunyai standar lingkungan yang tinggi akan mengurangi kemampuannya untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dengan membiarkan lingkungan mensubsidi pola konsumsi negara-negara pengimpor. Dalam jangka pendek, eksport tersebut memang mampu meningkatkan penerimaan devisa, tetapi dalam jangka panjang akan timbul kerusakan lingkungan dan pengelolaan sumber daya yang tidak berkelanjutan dan pada akhirnya akan mempengaruhi kinerja ekonomi negara tersebut.
3. Perdagangan bebas dan integrasi ekonomi juga menambah resiko bagi negara-negara dengan standar lingkungan yang tinggi untuk tersingkir dari pasar.

Globalisasi, di dalamnya, terdapat liberalisasi perdagangan. Perspektif lingkungan, menurut Sudharto P. Hadi, bisa bermakna ganda.<sup>84</sup> Hal ini dapat dilihat pada:

1. Globalisasi menuntut setiap negara untuk bisa menyesuaikan standar (kualitas barang) dengan kriteria internasional, yaitu dengan telah diadopsinya ISO 9000 (standar kualitas barang) dan ISO 14000 (standar kualitas lingkungan). ISO 14000 di antaranya mengatur pertama audit lingkungan (*environment audit*), kedua, label lingkungan (*eco labelling*), ketiga, sistem pengelolaan lingkungan (*environment*

---

<sup>84</sup> Sidharta P Hadi *Op Cit* hal 64

*management*), dan keempat, analisis daur hidup. Dalam

mengantisipasi tuntutan global tersebut, program-program lingkungan yang mulai digulirkan meliputi pengembangan audit lingkungan, label

lingkungan, dan produksi bersih (*cleaner production*).

Berkaitan dengan Iso 14000, suka atau tidak suka, para peng-

usaha harus menyesuaikan produk-produknya dengan kriteria lingkungan yang dikehendaki konsumen internasional. ISO (*In-*

*ternational Standardization Organization*) merupakan organisasi in-

dependen yang menjadi bagian dari *Bussiness Council on Sustainable Development* (BCSD), yakni badan kalangan bisnis yang turut

mengambil bagian pada konferensi bumi di Rio de Janeiro tahun 1992. Keikutsertaan kalangan bisnis ini untuk merumuskan bentuk peran

serta dalam lingkungan dan pembangunan yang tertuang dalam deklarasi Rio de Janeiro yang berisi serangkaian prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

2. Globalisasi juga bisa berpengaruh buruk terhadap lingkungan.

Perdagangan bebas tidak hanya berkaitan dengan bidang manufaktur, tetapi juga hewan, tumbuhan, dan jasad renik. Secara teoritis,

perdagangan bebas memberikan kemampuan suatu negara untuk membiayai kegiatan pelestarian daya dukung lingkungan. Namun

dalam praktek, kerusakan lingkungan secara global justru terjadi pada saat perdagangan bebas dipopulerkan selama dua dasa warsa

terakhir. Hal ini karena pola produksi dan konsumsi yang mendasari

perdagangan bebas bersifat eksploitatif dan merusak lingkungan.

Perdagangan bebas juga memungkinkan terjadinya transaksi limbah

beracun dan berbahaya (B3).

Investasi melalui penanaman modal asing merupakan upaya untuk

memperoleh modal melalui kerja sama, karena perusahaan multi nasional

yang akan menanamkan investasinya. Di samping akan membawa modal,

secara otomatis akan dapat mengembangkan industrialisasi negara

penerima modal sehingga peranannya dapat diterima dan memang

dibutuhkan dalam pembangunan (Raymon Vernon dalam Sumantoro,

1987: 19). Namun, investasi melalui penanaman modal asing yang

dilakukan dengan pahier domestik bisa jadi hanya akan menimbulkan

ketergantungan (*dependencia*) dalam posisi yang tidak seimbang antara

pengusaha asing dengan patner usaha domestik.

Investasi melalui Penanaman Modal Asing (PMA) memainkan peranan

penting dalam perekonomian nasional, baik dari segi peningkatan

pembangunan maupun dampaknya terhadap lingkungan. Pengaruh PMA

terhadap lingkungan hidup sulit ditentukan. Namun paling tidak menurut

Kurnya Roesad, ada beberapa kaitan antara PMA dan lingkungan hidup:

1. Tingginya tingkat PMA sangat berperan terhadap terbentuknya

daerah-daerah industri di mana pencemaran amat tinggi dan sering

melampaui daya serap lingkungan.

2. Upaya deregulasi dalam perekonomian nasional dan lonjakan arus

penanaman modal asing yang ditimbulkannya telah disertai dengan

masuknya teknologi baru yang dibawa oleh perusahaan PMA, yakni perusahaan multinasional (MING). Hasil pengamatan terhadap keberadaan industri, seperti industri kayu, tekstil, dan kulit menunjukkan bahwa peningkatan jumlah MING, secara signifikan, ternyata diikuti dengan kebijakan penggunaan standar lingkungan yang lebih tinggi yang dibawa dari negara asalnya.

3. Kerja sama antara pemerintah dan sektor swasta dapat mengurangi dampak persaingan yang merugikan. Melalui kerja sama tersebut, kebijakan yang dibuat mulai menampakkan hasil yang mengembirakan, seperti penghapusan atau perubahan senyawa kimia berupa *chlorofluorocarbon* (CFC) yang merusak lapisan ozon dalam setiap produk yang dihasilkan, sekalipun untuk itu dibutuhkan biaya tambahan produksi yang tinggi (5-10 persen). Langkah tersebut merupakan upaya untuk merealisasikan *Montreal Protocol* dan *Climate Change Convention*. Beberapa hal yang menjadi faktor penunjang kerja sama, antara lain:

- a. tersedianya produk pengganti dengan harga yang wajar;
- b. terbatasnya jumlah produsen, terutama MNC yang mempunyai akses terhadap teknologi baru dan berpatungan dengan perusahaan nasional;

- c. bantuan keuangan melalui dana khusus;

- d. rencana kerja yang baik dan didukung oleh pemerintah.



4. Masalah investasi yang tertarik karena standar pencemaran. lebih rendah, tampaknya sulit ditemukan. Hasil wawancara dengan beberapa produsen nampak bahwa faktor lingkungan belum dipandang sebagai faktor yang menentukan dalam melakukan pilihan investasi. Secara garis besar, desakan untuk menciptakan rezim perdagangan bebas tidak perlu bertentangan dengan desakan untuk menerapkan standar yang lebih ketat guna menjamin perlindungan lingkungan. Hal tersebut berkaitan bahwa standar lingkungan yang berlaku di Indonesia sekarang ini kurang tertata jika dibandingkan yang berlaku di negara-negara maju. Hingga taraf tertentu juga berlaku di negara seperti Malaysia dan Thailand. Karena itu, penyesuaian standar dalam negeri mendekati kinerja negara-negara industri tampaknya tidak akan mengancam kinerja ekspor Indonesia. Informasi yang akurat tentang biaya penanggulangan pencemaran sektor industri di Indonesia saat sekarang belum memadai. Namun, perkiraan Bank Dunia menunjukkan angka yang relatif masih rendah, yakni berkisar antara 3-5 persen dari total biaya investasi.
5. Desakan untuk menerapkan kebijaksanaan lingkungan di dalam negeri berdasarkan polluter pays principle (PPP) perlu mempertimbangkan beberapa persoalan pokok. Salah satunya adalah bahwa pengutamaan peraturan dan standar yang lebih ketat di sektor industri dan investasi yang mahal di bidang teknologi penanggulangan pencemaran mengakibatkan kenyataan bahwa investasi di bidang

sarana dan prasarana pokok (instalasi air bersih, sanitasi, dan lain-lain) dalam jangka panjang akan menghasilkan manfaat yang sangat besar bagi lingkungan. Pertimbangan lain bahwa peningkatan persiapan dan perbaikan lingkungan sering hanya menyangkut masalah peniadaan rezim harga yang menyimpang. Di samping itu, karena adanya kendala APBN dan tingginya biaya yang harus dipikul oleh pemerintah bagi penerapan dan pelaksanaan standar peraturan, karena pemerintah tidak dapat mengabaikan kemungkinan penggunaan perangkat kebijakan yang berorientasi pasar guna memaksa sektor swasta untuk lebih ramah lingkungan. Di sektor industri tekstil, misalnya, sebuah studi menunjukkan bahwa perusahaan tidak akan melakukan investasi di bidang instalasi pengolahan limbah, melainkan lebih memilih kepada upaya peningkatan produksi atau berproduksi pada tingkat yang sama dan membayar denda pencemaran (Ratnaningsih, 1995).

6. Deregulasi tidak perlu merugikan lingkungan. Berdasarkan studi CSJS (1996) menunjukkan bahwa PMA di Indonesia diluar sektor migas bukan hanya terkonsentrasi di sektor manufaktur, melainkan juga di subsektor manufaktur yang sangat padat sumber daya yang tidak dapat diperbaharui dan lebih lanjut ditandai oleh kegiatan-kegiatan yang bersifat padat modal, relatif kurang menyerap tenaga kerja dan menggunakan sumber daya alam. Alasan utama dari perkembangan tersebut karena kebijaksanaan yang bersifat proteksionis telah menjadi

daya tarik bagi PMA untuk melakukan investasi di sektor-sektor ini. Tingkat proteksi yang tinggi mendorong investor asing untuk memasuki pasar Indonesia guna berproduksi di sektor yang menikmati perlindungan, sekaligus juga mengurangi persaingan dan menjamin perolehan laba. Tingkat proteksi yang efektif yang mendorong ke arah industri manufaktur menguntungkan ekspor bahan baku atau bahan setengah jadi. Oleh karena itu, liberalisasi lebih lanjut dapat membantu pernuasan PMA ke sektor-sektor yang tidak padat sumber daya alam dan sektor-sektor yang menggunakan sumber daya alam yang dapat diperbaharui. sehingga memungkinkan pengurangan-pengurangan penggunaan sumber daya alam.

Salah satu problem besar yang dialami negara-negara berkembang adalah ketidakmampuannya untuk merumuskan strategi pembangunan yang mengkaitkan persoalan lingkungan sebagai bagian integral dari pembangunan yang dilakukan. Kondisi semacam itu dipacu sempitnya wawasan penentu kebijakan pembangunan akan persoalan dan pentingnya lingkungan sehingga dalam beberapa rumusan kebijakan cenderung lebih mengutamakan kepentingan ekonomi dan mengabaikan persoalan lingkungan. Akibatnya, pembangunan yang dilakukan menimbulkan persoalan baru berupa rusaknya lingkungan dan habisnya sumber daya alam yang disebabkan karena eksploitasi yang tidak mampu dikendalikan. Cara berpikir sesat seperti itu menggejala di mana-mana pada setiap sektor pembangunan sehingga persoalan lingkungan menjadi

semacam tumbal yang krusakannya semakin mencemaskan dan pada gilirannya akan mengancam keberadaan manusia itu sendiri.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Simpulan

1. Format pelaksanaan ADR pada kasus KLI menggunakan model negosiasi dan mediasi. Keterlibatan banyak komponen dalam penyelesaian kasus KLI tanpa unsur intervensi dalam pengambilan keputusan antara pihak yang bersengketa mencerminkan pendekatan negosiasi dan mediasi. Dalam kasus KLI juga menggunakan teknik negosiasi yang kompetitif. Teknik negosiasi kompetitif bercirikan mengajukan permintaan awal yang tinggi pada awal negosiasi, menjaga tuntutan agar tetap tinggi sepanjang proses negosiasi dilangsungkan, konsepsi diberikan sangat langka atau terbatas, secara psikologis perunding menganggap perunding lain sebagai musuh atau lawan serta seringkali menggunakan sikap yang berlebihan atau kasar dan melemparkan tuduhan-tuduhan untuk menciptakan ketegangan terhadap pihak lawan. Model mediasi dalam kasus KLI terlihat pada kesediaan para pihak untuk berunding menyelesaikan sengketa secara jujur dan diterima semua pihak. Dengan mengadakan perundingan secara jujur maka para pihak mengetahui hak dan kewajiban masing-masing. Kesediaan para pihak untuk menunjuk pihak ketiga netral untuk membantu dalam perundingan merupakan ciri dari mediasi.

1. Format ADR melalui negosiasi dan mediasi tetap dipertahankan dengan memberikan tekanan (*pressure*) oleh berbagai *stakeholders* yang terlibat apabila pihak utama, terutama PT KLI tidak konsisten dalam melaksanakan perundingan. Pemerintah Propinsi Jawa Tengah harus tegas dalam memberikan sanksi administrasi. Pihak akademisi harus cepat dan tepat dalam memberikan solusi atau jalan pemecahan baik dalam proses fasilitasi maupun dalam kajian ekologi. Harus ditanamkan sikap sabar dan konsisten pada masyarakat korban sehingga tidak mudah menyerah pada setiap

## B. Saran

2. Masalah-masalah yang terjadi dalam pelaksanaan ADR adalah kurang bersatunya masyarakat korban dalam setiap negosiasi, lambatnya keterlibatan pihak ketiga netral serta seringnya pihak KLI tidak hadir dalam perundingan. Solusi-solusi yang dihasilkan dalam tiap perundingan adalah berupa ganti kerugian kepada masyarakat korban.
3. Implikasi secara ekonomis keberadaan PT KLI bagi masyarakat sekitar pada dasarnya menguntungkan dan merugikan. Keuntungan dari keberadaan PT KLI adalah terserapnya tenaga kerja dari masyarakat sekitar, adanya pemondokan bagi pekerja luar daerah, ramainya warung/kios, bantuan insidentil untuk pembangunan desa. Kerugiannya adalah pencemaran limbah dan kerusakan terhadap tambak.

kasus yang terjadi. Penanaman kesadaran perlu ditanamkan secara terus-menerus sebab perundingan melalui jalan di luar pengadilan ini lebih menguntungkan dibanding masuk dalam wilayah pengadilan.

2. Masyarakat korban hendaknya tidak melangkah sendiri-sendiri

dalam memperjuangkan tuntutan-tuntutan. Kebersamaan harus dijaga dalam setiap perundingan. Apabila kelompok masyarakat terpecah belah maka mudah untuk dipermainkan oleh perusahaan.

Kesadaran dari para wakil-wakil kelompok sangat dibutuhkan dalam proses ini sehingga berbagai permasalahan yang terjadi dapat terselesaikan dengan baik. Selain ganti kerugian kepada masyarakat korban hendaknya solusi mengarah kepada rehabilitasi lingkungan

yang rusak akibat aktivitas PT KLI.

3. Keberadaan industri yang menyangkut lingkungan hidup sebaiknya memperhatikan kepentingan lingkungan dan masyarakat lokal. Rekrutmen karyawan hendaknya mengutamakan masyarakat sekitar, perbaikan sumber daya manusia (SDM) masyarakat harus diperhatikan seperti mengadakan pelatihan-pelatihan. Bantuan permodalan kepada petani tambak dan nelayan juga harus menjadi prioritas.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adiwirowo, S. dkk., 1995 *Bioteknologi dan Dampaknya terhadap Sosial, ekonomi dan Etika. Bioteknologi dan Keselamatan Hayati, Konphalindo : Jakarta.*
- Areif Budiman, 1994, *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*, P.T. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Barber, C.V., 1997 *Environmental Scarcities, state Capacity and Civil Violence ; The Case of Indonesia. Occasional Paper. Project on Environmental Scarcities, State Capacity and Civil Violence. American Academy of Arts and Sciences and the University of Toronto, Cambridge.*
- Black, Henry Cambell. 1990. *Black's Law Dictionary*. St. Paul Minn: West Publishing Co.
- Emil Salim, 1993. *Pembangunan Berwawasan Lingkungan*, LP3ES, Jakarta.
- GOI dan IIED, 1985. *Forest Policies in Indonesia ; The sustainable Development of Forest*. Jakarta.
- Hadimulyo. 1997, *Mempertimbangkan ADR Kajian Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Elsam, Jakarta.
- Hamzah, 1995, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Arikha Media Cipta, Jakarta.
- Harun M. Husein, 1992, *Lingkungan Hidup, Masalah, Pengelolaan, dan Penegakan hukumnya*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Hartiko, H., 1995. *Aspek Penerapan Bioteknologi dan Dampaknya Terhadap Lingkungan. Bioteknologi dan Keselamatan Hayati, Konphalindo : Jakarta*
- Ho. M.W., 1999 *Special Safety Concern of Transgenic Agriculture and Related Issues. Briefing Paper for Minister. Of State for the Environment*, May 1999.
- ISIS (Institute of Science in Society). *Open Letter from world Scientist to all Government Concerning Genetically Modified Organism (GMOs)*. ISIS, UK 2000



Jhamtani, H., 1997, *Perangkat hukum dalam pengelolaan hutan secara berkelanjutan*. Jurnal Hukum Lingkungan, Tahun IV, No 1. September 1997.

Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup dan UNDP, 1997. *Agenda 21 Indonesia. Strategi Nasional untuk Pembangunan Berkelanjutan*. Jakarta.

Kartodihardjo, H., 1999. *Hambatan Struktural pembahasan Kebijakan Pembangunan Kehutanan di Indonesia: Intervensi IMF dan word bank dalam reformasi kebijakan pembangunan kehutanan, world resources institute, Whashington (in print)*

\_\_\_\_\_, 1999. *Dampak Pembangunan Sektoral terhadap degradasi Hutan Alam: Kasus pembangunan HTI dan Perkebunan di Indonesia*. Laporan project I: Cifor, Jakarta.

Lin, L.L., 2000. *The Core issues in the Biosafety Protocol: An Analysis*. Third World Resurgence no. 114-115, June-July, 2000.

Lukman Sutrisno, *Menuju Masyarakat Partisipatif*, Kanisius Yogyakarta, 1995.

Mas Achmad Santosa & Anthony LP Hutapea. 1992. *Sebuah Pengalaman Mendayagunakan Mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa Lingkungan (MAPS) di Indonesia*, WALHI USAID, Jakarta.

Mohtar Masoed, 1994, *Ekonomi-Politik, International dan Pembangunan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Koesnadi Hardjasoemantri, 1999. *Hukum Tata Lingkungan*. Ed. Ketjuh.Cet. Keenambelas, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.

Kusnadi, 2002, *Konflik Sosial Nelayan, Kemiskinan dan Perebutan Sumberdaya Perikanan*, LKIS, Yogyakarta.

Otto Soemarwoto, 1994, *Ekologi Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Cetakan IV, Djambatan, Jakarta.

Pagestu, Mari, dkk, *Transformasi Industri Indonesia Dalam Era Perdagangan bebas*, CSIS, Jakarta, 1996.

- Protokol Kartagena tentang Keragaman Hayati, terjemahan bebas Kehati, 2000
- Rissler, J. dan Mellon, M., 1993. *Perils Amidst The promise Ecological Risk of The Transgenic Crops in a Global market. Union Concerned Scientists*. Cambridge.
- R.F Saragih, 2000, *Fungsionalisasi ADR dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup, Makalah dalam Jurnal Hukum*, diterbitkan oleh FHUII, vol. 7 tahun 2000.
- Ronny Hanitjo Soemitro, 1994, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Saleh, gazalba. *Pencemaran Lingkungan oleh Perusahaan Multinasional (Suatu Tinjauan Hukum Internasional)*, Majalah Hukum dan Pembangunan No.4 Tahun XXI bulan agustus, Fakultas Hukum UII, Jakarta, 1991.
- Siti Sundari Rangkuti, 1999, *Perbandingan UUPH dan Wet Milieun Beheer*, Universitas Airlangga dan Universitas Utrecht.
- Silalahi, 1996. *Hukum Lingkungan*, Alumni Bandung, Bandung.
- St. Munadjat Danusaputra, 1980, *Hukum Lingkungan Buku IV*, Global, Bina Cipta, Bandung.
- Shiva, V, 1994. *Bioteknologi dan Lngkungan dalam Perspektif Hubungan Utara-Selatan*. Konphalindo, Jakarta.
- Skephi, 1998 *The Mega-Rice Project Central Kalimantan IndonesiaAn Appeal for intervention to the International Community*. Skephi Support office in Europe, Netherlands.
- Soebekti, 1980, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Penerbit PT Intermasa, Jakarta.
- Takdir Rahmadi, 1994, *Aspek Pengelolaan Bahan Berbahaya. Bahan Penataran .Hukum Lingkungan*, Fakultas Hukum UNAIR, Surabaya.
- Words Bank, 1993. *Indonesia Forestry Sector Review*. Draft, Jakarta

William Hendriks, 1998. *Bagaimana Mengelola Konflik, Petunjuk Praktis Untuk Manajemen Konflik yang Efektif*, Sinar Grafika Jakarta.

Zuhud, 1994. *Pelestarian Pemanfaatan Keanekaragaman Hayati Tumbuhan Obat Hutan Tropika Indonesia*. Latin. Bogor.

## **Makalah**

Ahmad Ramli, 1999. *Tanggapan Atas Rancangan Undang-Undang Tentang Penyelesaian Sengketa*. Makalah disampaikan pada seminar Sosialisasi atas RUU APS. Diselenggarakan oleh Departemen Kehakiman RI. Jakarta.

Hamrat Hamid, *Penegakan Hukum Lingkungan Melalui Tindakan Administrasi, Perdata, dan Pidana*, Makalah Seminar Hukum Lingkungan Fakultas Hukum UNS, Surakarta.

Jhantani, 1997. *Komponen kebijakan Hutan Lestari*. Makalah disampaikan pada Forest Development Policy Dialogue, Jakarta

LBH Semarang, 2002 *"Pantaiku Sayang Pantaiku Malang, Perusakan Pantai Mangunhardjo, Tugu, Semarang"*

Koesnadi Hardjasoemantri, 1997, *"Penegakan Hukum dan Penyelesaian Sengketa dalam UU No.23 Tahun 1997"*, Makalah Penataran Hukum Lingkungan, Fakultas Hukum Unair.

Marsudi Triatmodjo, 1996, *Alternatif Penyelesaian Sengketa Lingkungan Industrialisasi vs Masyarakat*. Disampaikan dalam seminar Industrialisasi dan Dampaknya Terhadap Lingkungan Hidup. Diselenggarakan oleh LOKTIK X, KN Kimia-FMIPA, UGM. Yogyakarta..

Muladi, 1998, *Prinsip-Prinsip Dasar Hukum Pidana Lingkungan dalam Kaitannya dengan UU No.23 Tahun 1997*, Makalah & Seminar Fakultas Hukum UNDIP, Semarang.

Nandang Sutrisno, 1999, *Dasar-dasar Penyelesaian Sengketa Alternatif. Makalah yang disampaikan dalam Pelatihan Alternative Dispute Resolution (ADR) yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Ull berkerjasama dengan The Asia Foundation*. Yogyakarta.

Paulus Efeadie Lotulung, 1998, "Penegakan Hukum Lingkungan dalam UU No. 23 Tahun 1997, Tinjauan dari Aspek Hukum perdata", Makalah Seminar Fakultas Hukum UNDIP, Semarang.

Philippus Mandiri Hadjon, 1998, "UU No. 23 Tahun 1997 dan Penegakan Hukumnya, Ditinjau dari Aspek Hukum Administrasi", Makalah seminar Fakultas Hukum UNDIP, Semarang.

Soetandyo Wignjosoebroto, 1999, "Masalah Metodologi dalam Penelitian Hukum sehubungan dengan Masalah Keragaman Pendekatan Konseptualnya. Makalah pada Pelatihan Metodologi Penelitian, Fak. Hukum UNDIP, Semarang.

Sudharto P. Hadi, 1990, "AMDAL dan Audit Lingkungan dalam UU No. 23 Tahun 1997", Makalah Seminar Fakultas Hukum UNDIP, Semarang.

Zairin Harahap, 1999, "ADR Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Lingkungan. Disampaikan dalam diskusi *Alternative Dispute Resolution*, yang diselenggarakan oleh Pusdiklat FH UII Yogyakarta.

## Undang-undang

UU No 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPRH)

Kitab Undang-undang Hukum acara Pidana

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Kitab Undang-undang Hukum perdata